

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial
Volume 12 No 4 Desember 2013
ISSN 1412 - 6451

Daftar Isi

Editorial

1. Relasi Kuasa dan Pengelolaan Kesehatan Reproduksi Perempuan Pekerja Seks di Pantai Gunungkidul
The Power Relations and Reproduction Health Management of Sexual Workers in Gunungkidul Beach
(Victoria Sundari Handoko) 301 - 312
2. Menguak Budaya Masyarakat Jawa Pencegah Konflik Sosial
Revealing Javanese Community Culture as Social Conflict Prevention
(Warto) 313 - 326
3. Faktor yang Mempengaruhi Keterbatasan Perempuan dalam Mengakses Teknologi Komunikasi dan Informasi
The Influenced Factors on Women Limitation Access in Communication and Information Technology
(F. Anita Herawati, dkk.) 327 - 334
4. Pemberdayaan Keluarga Miskin Tenaga Kerja Wanita (TKW) melalui Model Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak Balita Terlantar
Poor-families Women Labors Empowerment through Social Service and Protection Model on Neglected Children Underfive
(Ikawati dan Tri Gutomo) 335 - 348
5. Implementasi Model Pelayanan dan Perlindungan Sosial Balita TKW Keluarga Miskin pada Forum Tunas Pelangi di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur
The Implementation of Protection and Social Service Model on Children Underfive in Poor Women Labors Families at Tunas Pelangi Forum Malang Regency, East Java Province.
(Chatarina Rusmiyati) 349 - 360
6. Dialektika Status dan Peran Perempuan dalam Struktur Sosial Masyarakat Petani
The Dialectic of Women Status and Role in Peasant Society Social Structure
(Munandar Sulaeman dan Siti Homzah) 361 - 366
7. Pemberdayaan Anak Jalanan melalui Sanggar Karya Anak Bangsa
Street Children Empowerment through Sanggar Karya Anak Bangsa
(Siti Aminatun) 367 - 378

8. Analisis Kebutuhan Korban Bencana Alam Gunung Meletus dan Upaya Penanggulangannya
Analysis on Natural Disaster Victim Needs and Its Prevention Effort
(Chulaifah) 379 - 388

Editorial

Relasi Kuasa dan Pengelolaan Kesehatan Reproduksi Perempuan Pekerja Seks di Pantai Gunungkidul (*The Power Relations and Reproduction Health Management of Sexual Workers in Gunungkidul Beach*) yang dibahas Victoria Sundari Handoko merupakan artikel pembuka JPKS volume 12 nomor 4, disambung oleh Wanto dalam Menguak Budaya Masyarakat Jawa Pencegah Konflik Sosial (*Revealing Javanese Community Culture as Social Conflict Prevention*). Faktor yang Mempengaruhi Keterbatasan Perempuan dalam Mengakses Teknologi Komunikasi dan Informasi (*The Influenced Factors on Women Limitation Accessin Communication and Information Technology*) dikemukakan oleh F. Anita Herawati, dkk. Disusul Ikawati dan Tri Gutomo dalam topik bahasan tentang Pemberdayaan Keluarga Miskin Tenaga Kerja Wanita (TKW) melalui Model Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak Balita Terlantar (*Poor-families Women Labors Empowerment through Social Service and Protection Model on Neglected Children Underfive*). Di sisi lain, Chatarina Rusmiyati mengungkap tentang Implementasi Model Pelayanan dan Perlindungan Sosial Balita TKW Keluarga Miskin pada Forum Tunas Pelangi di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur (*The Implementation of Protection and Social Service Model on Children Underfive in Poor Women Labors Families at Tunas Pelangi Forum Malang Regency, East Java Province*). Selanjutnya Munandar Sulaeman dan Siti Homzah membahas Dialektika Status dan Peran Perempuan dalam Struktur Sosial Masyarakat Petani (*The Dialectic of Women Status and Role in Peasant Society Social Structure*). Diikuti Siti Aminatun dalam Pemberdayaan Anak Jalanan melalui Sanggar Karya Anak Bangsa (*Street Children Empowerment through Sanggar Karya Anak Bangsa*). JPKS volume 12 nomor 4 ditutup dengan Analisis Kebutuhan Korban Bencana Alam Gunung Meletus dan Upaya Penanggulangannya (*Analysis on Natural Disaster Victim Needs and Its Prevention Effort*) oleh Chulaifah.

dari Redaksi

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial

ISSN 1412 - 6451

Vol 12 No 4 Desember 2013

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh digandakan tanpa ijin dan biaya
Keywords are extracted from articles. Abstract may be reproduced without permission and cost

Victoria Sundari Handoko (FISIP, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta)
Relasi Kuasa dan Pengelolaan Kesehatan Reproduksi Perempuan Pekerja Seks di Pantai Gunungkidul
The Power Relations and Reproduction Health Management of Sexual Workers in Gunungkidul Beach
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 4 Desember 2013, hal 301 - 312

Essentialist perspective with emphasis on binary opposition is still dominant in society. In general they assess human behavior in terms of “right” and “wrong” or “normal” and “abnormal”. This implies the attached stigmatization of women sex workers as people who behave “wrong” or “not normal” and the source of society’s illness. Several central and local government policies make women’s bodies of sex workers as objects, such as Law No 44, 2008, concerning pornography, also some regional regulations such discriminatory regulation on prohibition of prostitution or antiimmorality. Discrimination by the rules and gender injustice arise from the relation of sex workers with legal institutions, government, tourism industry, and health is a form of dominance of power over the body of sexual workers. It becomes an interesting study because it implies women that do not have authority over their own body. This study was conducted to analyze the relations of power and management of reproductive health and sexuality female sex workers in Gunungkidul Beach. The research used qualitative approach and the data collection techniques were interviews and observation. The results showed that sex workers can be grouped into two categories: first, sex workers who stay in the hotel and secondly, sex workers who were outside the hotel (food stalls and homes around the coast). The differences in the characteristics of sex workers led to the differences of power relations, meanwhile the differences in the management of reproductive health and sex were caused by the presence or absence of reproductive health and sex education that have been.

Keywords: Sexual Workers-Power Relations-Reproduction Health Management

Cara pandang esensialis dengan penekanan pada oposisi biner masih mendominasi pemikiran dalam masyarakat, yang menilai perilaku manusia dari sisi “benar” dan “salah”, “normal” dan “tidak normal”. Kondisi ini berimplikasi pada stigmatisasi yang selalu dilekatkan pada perempuan pekerja seks sebagai orang yang berperilaku “salah”, “tidak normal”, dan sumber penyakit masyarakat. Banyak kebijakan pemerintah dari pusat sampai dengan daerah yang dibuat untuk menjadikan tubuh perempuan pekerja seks sebagai obyek pengaturan, seperti UU nomer 44 tahun 2008 tentang pornografi dan peraturan daerah yang diskriminatif, seperti perda larangan pelacuran atau antimaksiat.

Diskriminasi melalui aturan dan ketidakadilan gender yang muncul dari relasi pekerja seks dengan institusi hukum, pemerintah, industri wisata, dan kesehatan adalah bentuk dari adanya dominasi kekuasaan atas tubuh pekerja seks. Relasi kuasa atas tubuh pekerja seks menjadi kajian yang menarik untuk diteliti karena kondisi ini menyiratkan bahwa mereka tidak mempunyai kuasa atas tubuhnya. Penelitian dilakukan untuk menganalisis relasi kuasa dan pengelolaan kesehatan reproduksi dan seksualitas pekerja seks di Pantai Gunungkidul. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja seks dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, pertama pekerja seks yang tinggal di dalam hotel. Kedua, pekerja seks yang berada di luar hotel (warung-warung makan dan rumah-rumah sekitar pantai). Perbedaan karakteristik pekerja seks menyebabkan adanya relasi kuasa yang berbeda, sementara itu perbedaan dalam pengelolaan kesehatan reproduksi dan seksualitas disebabkan oleh ada atau tidaknya pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas yang pernah diperoleh.

Kata Kunci: Pekerja Seks-Relasi Kuasa-Pengelolaan Kesehatan Reproduksi

Warto (Peneliti Madya Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta)
Menguak Budaya Masyarakat Jawa Pencegah Konflik Sosial
Revealing Javanese Community Culture as Social Conflict Prevention
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 4 Desember 2013, hal 313 - 326

The study on, Revealing Javanese Community Culture as Social Conflict Prevention, meant to indentify the form and meaning of Javanese community culture in rural area as social conflict prevention. The method used in this research is qualitative that reveal subjective meaning on the subject of social and culture phenomenon happening in some local area. The research was done in Krebet Village, Bantul Regency, as cultural tourism village. Informants were choosen purposivevely, they were key figures who know, understand, and have many informations on culture of local community. Data were gathered through in-depth interview, direct observation, and documentary analysis. Data were analysed descriptively, described the form, meaning, and local culture usefulness in prevention against social conflict. The result showed that to prevent any social conflict the community always used local culture, such as tradition, convention, communal expression, and traditional art. Based on the study was recommended to any related institutions that to set policy and program to eradicate social conflict should sincronize, unite, and vitalize local community culture.

Keywords: Local Culture-Prevention-Social Conflict

Kajian yang berjudul, Menguak Budaya Masyarakat Jawa Pencegah Konflik Sosial, bertujuan mengidentifikasi bentuk dan makna budaya masyarakat Jawa di perdesaan untuk mencegah terjadinya konflik sosial. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang mengungkap makna subjektif secara mendalam tentang gejala sosial pelaku (subjek) budaya sekaligus mengungkap proses dan dinamika gejala sosial budaya yang terjadi di daerah setempat. Penelitian dilakukan di Dusun Krebet sebagai

desa wisata budaya. Informan dipilih secara *purposive* yakni tokoh-tokoh kunci yang benar-benar mengetahui, memahami, dan memiliki banyak informasi mengenai budaya masyarakat setempat. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (*indepth interview*), pengamatan langsung, dan telaah dokumen. Analisis data dilakukan secara deskriptif, untuk menggambarkan bentuk, makna, dan pendayagunaan budaya lokal dalam mencegah terjadinya konflik sosial. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa dalam upaya mencegah terjadinya konflik sosial, masyarakat selalu mendayagunakan budaya lokal, dalam bentuk tradisi, adat-istiadat, ungkapan masyarakat, dan kesenian tradisional. Direkomendasikan, kepada berbagai pihak terkait agar dalam merumuskan kebijakan dan program kegiatan penanggulangan permasalahan konflik sosial perlu menyelaraskan, memadukan, dan mendayagunakan budaya masyarakat setempat.

Kata kunci: Budaya Lokal–Pencegahan-Konflik Sosial

**F. Anita Herawati, dkk. (Prodi Ilmu Komunikasi FISIP, Universitas Atmajaya Yogyakarta)
Faktor yang Mempengaruhi Keterbatasan Perempuan dalam Mengakses Teknologi Komunikasi dan Informasi**

The Influenced Factors on Women Limitation Access in Communication and Information Technology

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 4 Desember 2013, hal 327 - 334

Growing information based on internet technology is an opportunity for people to do easy activity, although not all of the people can get access to it. In fact, there is a limit internet access for women. It has been reflected among Indonesian and such a developed country like US, most of the internet users are male. In terms of Yogyakarta Special Territory internet user phenomena, only five percent women can access internet among 52 percent total users. The internet user gap among male and female in Yogyakarta are amplified by many reasons. This article focused on the Influences factors of internet access limitation and communication technology's tools ability among female, the internet use based on gender perspective. Social presence theory is used to crack the research question. The research approach used is qualitative, by focus group discussion to observe the information among target. It is hoped that the research has significant contribution for people to empower women community.

Keywords: Women-Communication Information Technology-Access-Social Presence Theory

Teknologi komunikasi dan informasi berbasis internet yang terus berkembang merupakan suatu peluang bagi masyarakat untuk mengerjakan aktivitas dengan mudah. Realitasnya tidak semua masyarakat mampu mengimbangi perkembangan yang makin pesat ini. Dilihat berdasarkan jenis kelamin, perempuan cenderung memiliki keterbatasan dalam mengakses internet. Realitas ini secara umum tercermin pada penggunaan internet di kalangan masyarakat Indonesia bahkan di negara maju seperti Amerika Serikat, pengguna internet masih didominasi oleh laki-laki. Secara khusus di wilayah Yogyakarta, dari 52 persen penduduk yang memiliki komputer dan juga internet, hanya lima persen perempuan yang bisa menggunakan fasilitas ini. Ketimpangan dalam mengakses media

informasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab. Kajian ini fokus pada: Faktor yang memengaruhi keterbatasan perempuan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan perspektif gender. Teori yang digunakan dalam kajian ini adalah teori *Social Presence Theory* yang mengarah pada interaksi dan partisipasi kaum perempuan melalui media komputer dan internet. Melalui pendekatan penelitian kualitatif dengan *focus group discussion*, penulis menggali informasi guna menjawab persoalan penelitian. Diharapkan, kajian ini mampu memberi kontribusi bagi masyarakat dalam memberdayakan komunitas perempuan.

Kata Kunci: Perempuan-Teknologi Komunikasi dan Informasi-Akses-Social Present Theory

**Ikawati dan Tri Gutomo (Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta)
Pemberdayaan Keluarga Miskin Tenaga Kerja Wanita (TKW) melalui Model Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak Balita Terlantar
Poor-families Women Labors Empowerment through Social Service and Protection Model on Neglected Children Underfive
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 4 Desember 2013, hal 335 - 348**

The research on empowerment of poor families women labors through service and social protection of children underfive is to examine the acceptability, applicability, effectivity, and to find the supporting and handicap factors in applying the model on service and social protection on children underfive of poor women labor families. The research used is an experimental one group pre-test post-test design. Research location are chosen purposively, based on problem solving of the previous research (2010). Research subjects are chosen purposively, they are work group consisting individual, community member group, organization, and related institutions committed to neglected children. Based on that method, taken 30 respondents and children underfive of women labor families left by their mother working abroad, and women labor families each 30 respondents. Data are gathered through test, interview, and observation. Data are analyzed through comparison test (t-test) and Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat (SWOT) techniques to see its supporting and handicap factors. After undergoing an experimentation, the model has shown acceptable, applicable, and effective in all research target, work group, neglected children underfive of women labor families, and their families. The model applicated is able to empower poor women labor families enhancing their knowledge and reference on children growth, role and family function, and any efforts to prevent children from negligence in women labor families. The existence of related institutions, work group, and community willing to applicate the model were supporting factor of the model, while its handicap factors are there is yet local regulation especially overseing the problem of children underfive from women labor families, inadequasy of knowledge and reference in the community, and there is yet data on the quantity of vulnerable children underfive from poor women labor families. It is recommended that the model that is proved its acceptability, applicability, and effectiveness be socialized to Directory of Children Welfare and Directory General of Social Rehabilitation, The Ministry of Social Affairs, and disseminate of the model so that can be applicated in all regions.

Keywords: Women Labor Families Empowement-Social Protection and Service -Children Underfive

Penelitian Pemberdayaan Keluarga Miskin TKW Melalui Model Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak Balita Terlantar bertujuan menguji model pelayanan dan perlindungan sosial anak balita TKW yang bersifat akseptabel, aplikabel dan efektif mampu memberdayakan keluarga miskin TKW dan menemukan faktor pendukung dan penghambat dalam pengaplikasian model tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian uji coba *one group pre-test post-test design*. Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive*, berdasarkan tindak lanjut dari pemecahan masalah yang ditemukan dalam penelitian sebelumnya (2010). Penentuan subjek secara purposif yaitu pokja yang terdiri dari perorangan, kelompok warga masyarakat, organisasi, dan instansi yang peduli terhadap anak balita. Berdasarkan hal tersebut ditentukan 30 responden dan anak balita TKW yang ditinggal ibunya bekerja di luar negeri serta keluarga TKW masing-masing 30 responden. Teknik pengumpulan data digunakan testing, wawancara, dan observasi. Teknik analisisnya digunakan uji komparasi (t-test) dan teknik SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat*) untuk melihat faktor pendukung dan penghambat. Setelah diuji secara empirik, ternyata model pelayanan dan perlindungan sosial anak balita terlantar TKW akseptabel, aplikabel, dan efektif baik pada sasaran garap yaitu pokja, anak balita terlantar TKW, maupun keluarganya. Model yang diterapkan mampu memberdayakan keluarga miskin TKW dalam peningkatan pengetahuan dan wawasan tentang tumbuh kembang anak, peran dan fungsi keluarga, serta upaya yang dilakukan agar tercegah keterlantaran anak balita TKW. Instansi terkait, pokja dan masyarakat untuk menerapkan dan melaksanakan model tersebut merupakan faktor pendukung pengaplikasian model pelayanan dan perlindungan sosial anak balita. Faktor penghambatnya adalah belum adanya dukungan perda khususnya dalam penanganan permasalahan yang dihadapi anak balita TKW, rendahnya tingkat pengetahuan dan wawasan masyarakat, dan belum adanya data jumlah anak balita TKW. Direkomendasikan agar model yang telah teruji keefektifan, akseptabilitas dan aplikabilitasnya disosialisasikan ke Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak dan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial RI, dan perlu diseminasi terhadap model tersebut agar dapat diterapkan di berbagai daerah.

Kata kunci: Pemberdayaan Keluarga TKW-Model Pelayanan dan Perlindungan Sosial-Balita Terlantar

Chatarina Rusmiyati (Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta)
Implementasi Model Pelayanan dan Perlindungan Sosial Balita TKW Keluarga Miskin pada Forum Tunas Pelangi di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur
The Implementation of Protection and Social Service Model on Children Underfive in Poor Women Labors Families at Tunas Pelangi Forum Malang Regency, East Java Province.
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 4 Desember 2013, hal 349 - 360

Social service and protection model on children underfive in poor women labor families is the implementation model of social service and protection to prevent any children underfive in poor women labor family form being neglected. The model was experimented in Donomulyo district, Malang Regence, East Java. The experimental subjects were 30 persons representing individual, societal group, non-government organization, and related institution having commitment on children underfive problems. The result showed that

social service and protection model (through Tunas Pelangi Forum) could effectively prevent children underfive from negligence. That can be seen from Tunas Pelangi Forum action planning on early childhood education program (PAUD), especially through a class for children underfive in poor labor family area. PAUD activities accommodate children underfive of poor women labor family having no sibling from heir parents. The forum gives an oriented place and educational facility under social guidance and supervision, and nutritious foods supplement. The forum also gives social guidance to their parents and surrogate parents on the importance of family role and function for children growth and development. It is recommended that local government should legalize any existence of forum (support, enhance, establish, train) for the sake of professionalism on social service and protection on children underfive. Setting joint network with related institutions on neglected children underfive service and protection. The model can be disseminated in other areas according to its own character and condition.

Keywords: Children Underfive-Social Service and Protection-Forum

Forum Pelayanan Perlindungan Sosial Anak Balita Tunas Pelangi merupakan implementasi model pelayanan perlindungan sosial untuk mencegah terjadinya keterlantaran anak balita TKW pada keluarga miskin. Model diujicobakan di Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang Jawa Timur. Sasaran ujicoba ditentukan sebanyak 30 orang yang mewakili baik perorangan, kelompok masyarakat, organisasi sosial/LSM maupun instansi terkait yang peduli pada masalah anak balita. Hasil ujicoba menunjukkan, bahwa model pelayanan perlindungan sosial anak balita TKW melalui pembentukan Forum Tunas Pelangi efektif dapat mencegah terjadinya keterlantaran pada anak. Hal tersebut dapat dilihat dari terlaksananya rencana aksi Forum Tunas Pelangi berupa pembentukan kelas PAUD khusus anak balita terlantar TKW. Kegiatan PAUD mewadahi anak balita TKW yang tidak mendapat asuhan dari orangtua. Mereka memperoleh tempat dan sarana pembelajaran yang lebih terarah di bawah pengawasan pendamping, serta tambahan makanan bergizi. Forum juga memberikan penyuluhan dan bimbingan sosial bagi orangtua/wali asuh anak tentang pentingnya peran dan fungsi keluarga untuk memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, diharapkan agar pemerintah daerah dapat melegalkan keberadaan forum, mendukung, dan melakukan pembinaan melalui pelatihan dalam rangka meningkatkan profesionalisme forum. Melakukan kerjasama dan jejaring dengan berbagai pihak yang peduli pada pelayanan dan perlindungan terhadap anak balita terlantar. Model dapat dikembangkan di wilayah lain sesuai karakteristik kondisi dan situasi wilayah masing-masing.

Kata Kunci: Pelayanan dan Perlindungan Sosial-Anak Balita–Forum

Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Laboratorium Sosiologi-Penyuluhan Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran)
Dialektika Status dan Peran Perempuan dalam Struktur Sosial Masyarakat Petani
The Dialectic of Women Status and Role in Peasant Society Social Structure
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 4 Desember 2013, hal 361 - 366

The aims of this study is to determine the status and role of women in family and social structure of dairy farmer; the role of women in the income earning and household

(domestic) work and; the dialectic process of status and role of women. The methods used on this research is case study with qualitative approach. Qualitative data analysis was done by categorizing and organizing data through in-depth understanding (verstehen understanding), both textual and contextual that were interpreted afterward. The result showed that the values of the status and role of women in family structure indicate a bargaining through a process of dialogue between husband and wife based on the potential and contribution in both the work of raising livestock and household; in social structure, the role of women as breadwinners have been accepted as a social reality through its participation in the dairy cattle business; working hours of women who poured out in the dairy cattle business and household activities for 8-10 hour per day, far greater than the man (6-10 hours per day); The process of dialectics in the aspect of culture, structure and the relational patterns indicate there has been a shift the values of culture where women have gained high appreciation in society of farmers and have been positioned strategically (as decision maker) in business of the family's livelihood and there are a functional partnership relations between men and women in dairy farmer community in the study area.

Key Words: Dialectic-Women Status and Role-Social Structure

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: Status dan peran perempuan pada struktur keluarga dan sosial masyarakat peternak; Peran perempuan dalam pekerjaan nafkah dan pekerjaan rumah tangga dan proses dialektika status dan peran perempuan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara mengategorisasi dan mengorganisasi data melalui pemahaman mendalam (*verstehen understanding*) baik secara tekstual maupun kontekstual, kemudian diinterpretasikan. Nilai status dan peran perempuan dalam struktur keluarga menunjukkan adanya proses tawar menawar (*bargaining*) melalui proses dialogis antara suami isteri didasarkan atas potensi dan kontribusi, baik dalam pekerjaan memelihara ternak maupun pekerjaan rumah tangga. Dalam struktur sosial, peran perempuan sebagai pencari nafkah sudah diterima sebagai kenyataan sosial melalui partisipasinya dalam usaha ternak sapi perah. Pencurahan tenaga kerja perempuan dalam usaha ternak sapi perah dan kegiatan rumah tangga sebesar 8–10 jam per hari, jauh lebih besar dari suami (6–10 jam/hari). Proses dialektika baik dalam aspek kultur struktur maupun pola relasional menunjukkan telah terjadi pergeseran nilai, saat perempuan telah mendapatkan penghargaan yang tinggi di masyarakat peternak dan telah diposisikan secara strategis (sebagai pengambil keputusan) dalam usaha nafkah keluarga, serta terjadi relasi kemitraan yang fungsional antara laki-laki dan perempuan pada masyarakat peternak di daerah penelitian

Kata Kunci: Dialektika-Status dan Peran Perempuan-Struktur Sosial

Siti Aminatun (Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta)
Pemberdayaan Anak Jalanan melalui Sanggar Karya Anak Bangsa
Street Children Empowerment through Sanggar Karya Anak Bangsa
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 4 Desember 2013, hal 367 - 378

This study meant to describe the activities done by Sanggar Karya Anak Bangsa (Kabasa) which committed to children vulnerable being in the street, street children, and ex-street children, to be motivated leaving the street. Data were gathered through observation, in-depth interview, and documentary analysis. The study showed that Sanggar Kabasa was set to educate children vulnerable being in the street, street children, and ex-street children, so they can escape street lives. Sanggar Kabasa as government partner has been participating actively to educate street children. Its funding limit was solved by joint venture with any institution committing to street children, such as Kemandirian Dompot Dhuafa, through vocational training to get a better job. Joint venture also done with individual committing to street children through fund and means of education. Sanggar Kabasa made administrative report routinely to donors on the use of the fund and aid to show that their commitment was very worthwhile for street children. Based on the study is recommended that any non-government institution committed to social affairs (street children) should be taken by the government as partner, so their existence should be supported by the government. The synergy among government, non-government institution, and communities committed to social problems (street children) when done hand-in-hand and social solidarity hopefully can solve existing social problem.

Keywords: Street Children-Empowerment-Sanggar Kabasa

Pengkajian ini bertujuan mendeskripsikan tentang kegiatan yang dilakukan oleh Sanggar Karya Anak Bangsa (Kabasa) yang peduli terhadap anak rentan jalanan, anak jalanan, dan mantan anak jalanan dan berusaha mendorong untuk meninggalkan jalanan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan dari pengurus Sanggar Kabasa, observasi dan telaah dokumen. Hasil kajian menunjukkan bahwa Sanggar Kabasa didirikan dengan tujuan membina anak rentan jalanan, anak jalanan, dan mantan anak jalanan agar bisa melepaskan diri dari kehidupan jalanan. Sanggar Kabasa sebagai salah satu mitra pemerintah telah berpartisipasi memberikan kontribusi bagi penanganan anak jalanan. Keterbatasan Sanggar Kabasa dalam memberikan penanganan diatasi dengan melakukan kerjasama dengan pihak yang peduli dengan kegiatan Sanggar Kabasa, misalnya kerja sama dengan Institut Kemandirian Dompot Dhuafa untuk pemberdayaan anak jalanan dengan cara pemberian pelatihan keterampilan untuk dijadikan modal mencari pekerjaan terhormat. Kerjasama juga dilakukan dengan perorangan peduli anak jalanan cara memberi dana atau barang. Sanggar Kabasa memberi laporan pertanggungjawaban kepada pihak yang memberi bantuan (donator), untuk menjaga kepercayaan donator bahwa kepedulian mereka sangat berarti bagi pemberdayaan anak jalanan. Berdasarkan hasil pengkajian tersebut direkomendasikan, bahwa lembaga swadaya masyarakat yang peduli dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (anak jalanan) merupakan mitra dari pemerintah, sehingga eksistensinya sebaiknya diberi dukungan oleh pemerintah. Sinergi antara pemerintah dan elemen masyarakat yang peduli terhadap berbagai permasalahan sosial anak jalanan yang terjadi di masyarakat

dengan semangat gotong royong dan kesetiakawanan sosial diharapkan dapat mengatasi permasalahan sosial yang ada.

Kata kunci: Pemberdayaan-Anak jalanan-Sanggar Kabasa

Chulaifah (Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta)

Analisis Kebutuhan Korban Bencana Alam Gunung Meletus dan Upaya Penanggulangannya

Analysis on Natural Disaster Victim Needs and Its Prevention Effort

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 4 Desember 2013, hal 379 - 388

Geographically, Indonesia is located at a cross section between Asia and Australia continents, and between Indonesia and Pasific ocean. The position is prone zone of natural disaster. Natural disaster happens because of several natural happening, such as erthquake, tsunami, flood, drought, hurricane, landslide, and mountain explosion. One of the enormous natural disaster was the Merapi expolsion that happened in 2010. The impact of that expolision was a lost, death, burned properties and animal farming, devastated houses, and left trauma on the victims, even longlive invalid. The research on analysis of Merapi explosion natural disaster victim needs and its preventive effort meant to know the victims need where the disaster happened. The result showed that the victims needs of disaster victims are physical, psychological, ans social. The preventive effort can be devided in three phases, predisaster (socializing the cause of natural disaster and environmental betterment), having disaster (saving lives), rehabilitation and reconstruction (recovering psychological, physical, social and economic condition, development activities). It is recommended that the Ministry of Social Affairs and its related institution should socialize to the communities prone disaster through social information and training program on natural disaster prevention, including pre-disaster, having disaster, and reconstruction and rehabilitation phases. For the communities prone to natural disaster should participate in the program in order to having skill on disaster prevention.

Keywords: Needs-Natural Disaster Vitims-Prevention

Secara geografis letak Indonesia berada pada posisi silang antara Benua Asia dan Australia, serta antara Samudera Indonesia dan Pasifik. Posisi tersebut merupakan zona rawan bencana alam. Bencana alam terjadi karena serangkaian peristiwa alam antara lain gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan gunung meletus. Salah satu bencana alam yang cukup dahsyat adalah meletusnya Gunung Merapi pada tahun 2010. Dampak dari letusan tersebut membawa korban, antara lain merenggut nyawa manusia, membunuh hanguskan harta benda dan ternak, meluluhlantahkan rumah, dan meninggalkan trauma pada korban bencana, bahkan ada yang cacat seumur hidup. Penelitian tentang Analisis Kebutuhan Korban Bencana Alam Gunung Meletus dan Upaya Penanggulangannya, bertujuan untuk mengetahui kebutuhan korban bencana di lokasi bencana. Hasil penelitian, menunjukkan kebutuhan korban bencana yang mendesak adalah fisik, psikis, dan sosial. Upaya penanggulangan korban bencana ada tiga tahapan: pra bencana (yakni menyosialisasikan tentang penyebab bencana alam, penataan

lingkungan), tanggap darurat (usaha penyelamatan diri), rehabilitasi dan rekonstruksi (pemulihan psikologis, sosial, ekonomi, dan kegiatan pembangunan). Rekomendasi kepada Kementerian Sosial dan jajarannya agar menyosialisasikan pada warga melalui kegiatan penyuluhan dan pelatihan sosial tentang usaha penanggulangan bencana alam, baik pada tahap pra bencana, tanggap darurat, maupun rekonstruksi dan rehabilitasi dan; bagi warga di lokasi bencana dianjurkan mengikuti pelatihan penyuluhan sosial penanggulangan bencana alam agar mau dan mampu serta terampil melakukan upaya penanggulangan bencana alam.

Kata kunci: Kebutuhan-Korban Bencana Alam-Penanggulangan

**Relasi Kuasa dan Pengelolaan Kesehatan Reproduksi
Perempuan Pekerja Seks di Pantai Gunungkidul**
*The Power Relations and Reproduction Health Management
of Sexual Workers in Gunungkidul Beach*

Victoria Sundari Handoko

FISIP, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, Jl. Babarsari 6 Yogyakarta 55281, Telpon (0274) 487711,
Faximile (0274) 487748, E-mail: <vicndariha@yahoo.com>

Diterima 16 Agustus 2013, direvisi 7 Oktober 2013, disetujui 16 Oktober 2013.

Abstract

Essentialist perspective with emphasis on binary opposition is still dominant in society. In general they assess human behavior in terms of "right" and "wrong" or "normal" and "abnormal". This implies the attached stigmatization of women sex workers as people who behave "wrong" or "not normal" and the source of society's illness. Several central and local government policies make women's bodies of sex workers as objects, such as Law No 44, 2008, concerning pornography, also some regional regulations such discriminatory regulation on prohibition of prostitution or antiimmorality. Discrimination by the rules and gender injustice arise from the relation of sex workers with legal institutions, government, tourism industry, and health is a form of dominance of power over the body of sexual workers. It becomes an interesting study because it implies women that do not have authority over their own body. This study was conducted to analyze the relations of power and management of reproductive health and sexuality female sex workers in Gunungkidul Beach. The research used qualitative approach and the data collection techniques were interviews and observation. The results showed that sex workers can be grouped into two categories: first, sex workers who stay in the hotel and secondly, sex workers who were outside the hotel (food stalls and homes around the coast). The differences in the characteristics of sex workers led to the differences of power relations, meanwhile the differences in the management of reproductive health and sex were caused by the presence or absence of reproductive health and sex education that have been.

Keywords:

Sexual Workers-Power Relations-Reproduction Health Management

Abstrak

Cara pandang esensialis dengan penekanan pada oposisi biner masih mendominasi pemikiran dalam masyarakat, yang menilai perilaku manusia dari sisi "benar" dan "salah", "normal" dan "tidak normal". Kondisi ini berimplikasi pada stigmatisasi yang selalu dilekatkan pada perempuan pekerja seks sebagai orang yang berperilaku "salah", "tidak normal", dan sumber penyakit masyarakat. Banyak kebijakan pemerintah dari pusat sampai dengan daerah yang dibuat untuk menjadikan tubuh perempuan pekerja seks sebagai obyek pengaturan, seperti UU nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dan peraturan daerah yang diskriminatif, seperti perda larangan pelacuran atau antimaksiat. Diskriminasi melalui aturan dan ketidakadilan gender yang muncul dari relasi pekerja seks dengan institusi hukum, pemerintah, industri wisata, dan kesehatan adalah bentuk dari adanya dominasi kekuasaan atas tubuh pekerja seks. Relasi kuasa atas tubuh pekerja seks menjadi kajian yang menarik untuk diteliti karena kondisi ini menyiratkan bahwa mereka tidak mempunyai kuasa atas tubuhnya. Penelitian dilakukan untuk menganalisis relasi kuasa dan pengelolaan kesehatan reproduksi dan seksualitas pekerja seks di Pantai Gunungkidul. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja seks dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, pertama pekerja seks yang tinggal di dalam hotel. Kedua, pekerja seks yang berada di luar hotel (warung-warung makan dan rumah-rumah sekitar pantai). Perbedaan karakteristik pekerja seks menyebabkan adanya relasi kuasa yang berbeda, sementara itu perbedaan dalam pengelolaan kesehatan reproduksi dan seksualitas disebabkan oleh ada atau tidaknya pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas yang pernah diperoleh.

Kata Kunci:

Pekerja Seks-Relasi Kuasa-Pengelolaan Kesehatan Reproduksi

A. Pendahuluan

Perempuan yang memilih hidup bekerja sebagai pekerja seks belum dapat diterima kehadirannya dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat melekatkan *stereotype* negatif kepada pekerja seks dan dianggap tidak pantas menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat. Pandangan masyarakat yang seperti itu muncul karena sebagaimana dinyatakan dalam Surat Kabar Pikiran Rakyat, masyarakat mempunyai kesan bahwa perempuan pekerja seks adalah perempuan jalang yang amoral, tidak tahu malu, dan penggoda lelaki. Kondisi ini menyebabkan pekerja seks tidak layak untuk dihargai. Kesan tersebut muncul karena konstruksi atas pekerja seks yang disosialisasikan oleh orang tua kepada anaknya sejak kecil, dimana mereka menyebut pekerja seks sebagai pelacur (perempuan yang tidak benar kelakuannya). Pekerja seks digambarkan sebagai orang yang kehidupannya glamour tetapi norak yaitu sering menggunakan parfum yang dibotolnya bergambar putri duyung (minyak si *nyong-nyong*). Orang yang pakai minyak wangi itu tentunya adalah pelacur (6 Maret 2007).

Konstruksi sosial atas pekerja seks yang dipandang sebagai sampah, penyakit masyarakat, dan perwujudan dari imoralitas merupakan cara pandang masyarakat yang esensial. Cara pandang esensial memberi penekanan pada oposisi biner yang menilai perilaku manusia dari sisi "benar" dan "salah", "normal" dan "tidak normal" dan bermoral dan tidak bermoral". Stigmatisasi masyarakat atas pekerja seks tersebut mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang menjadikan tubuh perempuan pekerja seks sebagai obyek pengaturan. Peraturan pemerintah yang dibuat tidak hanya peraturan pemerintah pusat seperti UU nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, tetapi juga pemerintah daerah yang sifatnya diskriminatif seperti perda larangan pelacuran atau anti maksiat.

Pemerintah Bantul merupakan salah satu pemerintah daerah yang mengeluarkan larangan tentang pelacuran, yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2007. Perda ini telah menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Mereka yang kontra menyatakan bahwa peraturan daerah tersebut

menyebabkan adanya pengaturan seksualitas yaitu dengan pelarangan pelacuran yang pelakunya sebagian besar adalah perempuan. Mereka diperlakukan sebagai kriminal dan terdapat hukuman kurungan dan denda bagi mereka yang tertangkap. Implikasinya banyak pekerja seks yang pindah ke daerah di atas pantai selatan yaitu Gunungkidul dan daerah lain karena mereka di kejar-kejar petugas tantib layaknya kriminal untuk ditertibkan. Mereka kemudian menjauhkan diri dari tempat yang sudah menerapkan aturan perda tersebut dan mengisolasi diri di tempat-tempat yang tidak begitu ramai dikunjungi wisatawan.

Peraturan Diskriminasi melalui aturan-aturan dan ketidakhadiran gender yang muncul dari relasi pekerja seks dengan institusi pemerintah dan hukum tersebut sebagai bentuk dari adanya dominasi kekuasaan atas tubuh pekerja seks. Relasi kuasa atas tubuh pekerja seks menjadi kajian yang menarik untuk diteliti karena kondisi ini menyiratkan bahwa mereka tidak mempunyai kuasa atas tubuhnya. Apalagi kaitannya dengan kesehatan reproduksi dan seksualitas pekerja seks yang dikategorikan sebagai pekerja seks terselubung ini. Kondisi ini berakibat kurangnya informasi tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas menyebabkan rendahnya pengetahuan mereka akan berbagai aspek kesehatan reproduksi dan seksualitas, serta menyulitkan untuk mengakses berbagai pelayanan yang dibutuhkan. Permasalahan penelitian yang diajukan adalah bagaimana relasi kuasa dan pengelolaan kesehatan reproduksi dan seksualitas pekerja seks di Pantai Gunungkidul, Yogyakarta?

Penelitian dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Jenis penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk meneliti masalah pekerja seks, dimana penelitian diarahkan pada penyelidikan bagaimana dunia ini dialami oleh aktor-aktor di lapangan, sehingga peneliti melakukan proses empati dalam relasi-relasi yang terjalin antara laki-laki pembeli jasa seks dan perempuan pekerja seks. Pemahaman atas kehidupan sehari-hari serta pengetahuan mereka dilaksanakan melalui metode *verstehen* (dari Weber) sebagai upaya

menghayati kehidupan serta konstruksi pengalaman hidup mereka. Sebagaimana diungkapkan oleh Locke, Spirduso, dan Silverman dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi “instrumen”: tempat dia harus berpartisipasi aktif dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kehadirannya secara terus menerus dan intensif, seperti metode etnografi yang membutuhkan waktu yang panjang, ataukah secara relatif singkat tetapi personal, seperti dalam penelitian *in-depth interview*, peneliti masuk ke dalam kehidupan mereka (Marshall dan Rossman, 1995: 59). Untuk keperluan penelitian maka nama pantai, hotel, subyek, dan informan penelitian disamarkan.

B. Kajian Teori

Seksualitas adalah suatu aspek inti manusia sepanjang hidupnya dan meliputi seks, identitas dan peran gender, orientasi seksual, erotisme, kenikmatan, kemesraan dan reproduksi. Seksualitas dialami dan diungkapkan dalam pikiran, khayalan, gairah, kepercayaan, sikap, nilai, perilaku, perbuatan, peran dan hubungan. Sementara seksualitas dapat meliputi semua dimensi ini, tidak semuanya selalu dialami atau diungkapkan. Seksualitas dipengaruhi oleh interaksi faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, politik, budaya, etika, hukum, sejarah, religi dan spiritual (WHO, definisi kerja 2002).

Seksualitas dapat dipahami dengan perspektif yang berbeda yaitu dari perspektif esensialisme dan perspektif konstruksi sosial. Esensialisme Seksual yaitu paham yang menganggap seksualitas adalah *given*, hukum Tuhan, tidak berubah, asosial, dan transhistoris. Perspektif ini memandang pekerja seks akan mendapatkan stigma sebagai penyimpangan (*deviance*) oleh masyarakat. Penyimpangan menurut Andersen, didefinisikan sebagai perilaku yang diakui sebagai melanggar aturan dan norma-norma yang sudah menjadi harapan sosial (2000:198). Pekerja seks dalam perspektif ini digolongkan sebagai perilaku penyimpangan sosial dan bahkan kriminal ketika sudah ada aturan dan sanksi hukumnya (seperti Peraturan Daerah tentang anti pelacuran). Perspektif Esensialisme ini menurut Gunawan membuat pandangan pengikutnya sangat kaku dan dominannya pandangan esensialisme selama berabad-abad

yang antara lain membentuk struktur patriarkhal dalam masyarakat. Pandangan ini bahkan memandang seksualitas sebagai dorongan biologis yang maskulin sehingga laki-lakilah yang harus dominan dan “dimenangkan” dalam aktivitas seks (2003:15-16).

Pandangan yang berbeda disampaikan oleh Gayle Rubin, Michel Foucault, dan tokoh-tokoh lain dari perspektif konstruksi sosial. Mereka menginterpretasikan seksualitas merupakan sebuah konstruksi sosial, bukan fakta kromosomik-biologis. Mereka menggugat ortodoksi teoritik tentang seksualitas, yang seluruh prinsip-prinsipnya didasarkan pada esensialisme seksual. Seksualitas sangat terikat dengan sejarah dan perubahan sosial.

Rubin melihat bagaimana seksualitas direpresi secara sistematis oleh politik, sosial, budaya maupun ekonomi. Ia menjelaskan bahwa seksualitas esensialisme menyatakan bahwa seksualitas yang dianggap “baik”, “normal”, dan “natural” adalah salah satunya yang non komersial. Seks yang buruk adalah di luar perkawinan, tidak prokreatif atau komersial. Sex yang dianggap menyimpang atau negatif harus diberikan hukuman (1984: 153-156). Hal ini terbukti dengan munculnya kebijakan kriminalisasi bagi pekerja seks melalui Peraturan Daerah tentang anti pelacuran. Tampaknya, politik negara berperan penting dalam mengkriminalkan seks yang dianggap negatif. Rubin seperti halnya dengan Michel Foucault menyatakan bahwa baik buruknya seksualitas ditentukan oleh kekuasaan dan pengetahuan. Seksualitas sebagaimana dinyatakan oleh Foucault merupakan nama yang terbentuk secara historis, bukan realitas alamiah yang susah dipahami, melainkan adalah sebuah jaringan besar yang didalamnya terdapat stimulasi tubuh, intensifikasi kenikmatan, perubahan ke diskursus, formasi pengetahuan tertentu, penguatan kontrol dan resistensi, yang saling berkaitan satu sama lain (1978: 103). Pada awal abad 17, jaman Ratu Victoria (Victorianisme), seks sangat tertutup, menabukan seks dan membatasinya dalam rumah, perkawinan keluarga, dan kebungkaman. Foucault mempersoalkan suatu pemahaman bahwa Victorianisme melakukan represi seksualitas secara umum dan diskursus seksual

secara khusus. Ada usaha menaklukkan seks pada tingkat bahasa, untuk menghilangkannya dari sesuatu yang dipahami masyarakat, untuk menyingkirkan kata-kata yang membuat seks sangat nyata (Ritzer, 2003:110).

Foucault (1978: 24-26) menganalisa bahwa pada jaman Victoria, kekuasaan menyediakan pandangan yang kokoh bagi obyek (seksual). Kekuasaan yang berkembang pada abad ke 17 ini menganalogikan tubuh sebagai mesin yang harus dididik, ditingkatkan berbagai kemampuannya, dirampas tenaganya, ditingkatkan sejarajar kegunaan dan kepatuhannya, diintegrasikan dalam berbagai sistem kendali yang efektif dan ekonomis. Semua itu telah dijamin oleh berbagai prosedur kekuasaan yang merupakan ciri khas berbagai disiplin politik anatomi bagi tubuh manusia. Kemudian sejak zaman pasca renaisans (Foucault 2008), kekuasaan berusaha masuk ke wilayah bio-etika untuk mengontrol pembentukan masyarakat Barat. Pembersihan, pengontrolan, praktek-praktek klinis, regulasi, normalisasi, prostitusi dan segala bentuk pen-disiplinan diterapkan. Kekuasaan berkerja sama dengan ilmu pengetahuan untuk menormalisasi tubuh manusia.

Pendisiplinan atas tubuh nampak dalam regulasi yang diterapkan pemerintah pada pekerja seks sebagai bentuk kegiatan yang masuk dalam kriminal. Kondisi ini membuat perempuan pekerja seks mengalami ketidakadilan karena pengetahuan hukum yang dihasilkan oleh orang-orang esensial yang mempunyai kekuasaan untuk mendefinisikan seksualitas yang "benar" dan "salah". Kekuasaan tersebut semakin kuat karena adanya penegakkan hukum oleh aparat kepolisian yang bertugas untuk mendisiplinkan tubuh pekerja seks untuk dinormalisasi kehidupannya. Resistensi dilakukan oleh pekerja seks atas kekuasaan tersebut.

C. Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas

Konsep Kesehatan Reproduksi tidak hanya terbatas pada kontrasepsi dan akibat dari penggunaannya tetapi terkait juga dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi fungsi dan reproduksi manusia, sebagaimana tertuang dalam kesepakatan Konferensi Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) tahun 1994 di Kairo.

Bab VII dari Plan of Action hasil ICPD tersebut mendefinisikan Kesehatan Reproduksi sebagai berikut :

"Reproductive health is a state of complete physical, mental and social well-being in all matters relating to the reproductive system and to its functions and processes. It implies that people have the capability to reproduce and the freedom to decide if, when and how often to do so. Implicit in this is the right of men and women to be informed and to have access to safe, effective, affordable and acceptable methods of family planning of their choice, as well as other methods of their choice for regulation of fertility, which are not against the law, and the right of access to health-care services that will enable women to go safely through pregnancy and childbirth. Reproductive health care also includes sexual health, the purpose of which is the enhancement of life and personal relations." (Jurnal Perempuan, 2007)

Definisi kesehatan reproduksi di atas tidak hanya sebatas definisi tentang kesehatan reproduksi saja, melainkan menyinggung juga tentang hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, kesehatan reproduksi yang aman, efektif, dan terjangkau. Selain itu, membicarakan tentang masalah kesehatan reproduksi tidak dapat lepas dari pembicaraan tentang kesehatan seksual karena pelayanan kesehatan reproduksi juga termasuk kesehatan seksual untuk meningkatkan kualitas hidup dan hubungan-hubungan pribadi.

Persoalan reproduksi tidak hanya mencakup alat dan proses reproduksi, tetapi juga terkait langsung dengan hubungan-hubungan sosial yang melibatkan laki-laki dan perempuan. Relasi dua jenis kelamin ini dibingkai oleh berbagai norma dan nilai yang dibentuk dan dilestarikan oleh berbagai pihak dengan berbagai kepentingan, yang ada berimplikasi pada bentuk interaksi yang ada mulai dari interaksi yang seimbang (egaliter) sampai dengan bentuk yang tidak seimbang bahkan sampai dengan eksploitasi satu dengan yang lain.

Ketidakamanan dalam hubungan seks terlihat dari banyaknya pelaku seks yang tidak

bersedia menggunakan kondom sehingga perempuan mengalami resiko tertular penyakit kelamin menular (STD). Penelitian Efo Suarmiarta, dkk (1992) menunjukkan bahwa 68,3 persen pengemudi truk Denpasar-Surabaya berhubungan seks dengan Pekerja seks tanpa menggunakan kondom. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelacuran dalam berbagai bentuknya dilakukan tanpa mematuhi standar kesehatan maka akan memunculkan resiko kesehatan reproduksi bagi pelakunya.

Pengetahuan pekerja seks yang minim akan kesehatan reproduksi dan ketakutan akan adanya penyakit menular seksual yang bisa dialami, mendorong pekerja seks untuk mengatasinya dengan cara mereka sendiri atau berdasar masukan dari orang lain yang belum tentu mempunyai pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. pemakaian antibiotik seperti Hasil penelitian yang dilakukan oleh I Made Arya Utama dan Rita Suhadi (2005) tentang pekerja seks Pasar Kembang, Yogyakarta menunjukkan bahwa tingkat pemakaian antibiotika subyek secara rutin baik pada waktu sakit maupun sehat relatif sangat tinggi. Penggunaan antibiotika setiap minggu 49,2 persen, setiap bulan 19 persen, dan pemakaian pada waktu sakit 31,8 persen. Alasan penggunaan antibiotika setiap minggu adalah untuk pencegahan penyakit IMS. Padahal antibiotika yang tidak tepat indikasi dan dosis akan menyebabkan resistensi bakteri akibatnya penyakit akan tambah parah dan biaya yang dikeluarkan untuk penanggulangan akan bertambah mahal.

Beberapa pendampingan telah diupayakan oleh LSM, meskipun hasil dari pendampingan tentang kesadaran kesehatan reproduksi belumlah mencapai hasil yang maksimal. Pengalaman pendampingan yang dilakukan Hudiono dari Yayasan Hotline Service Surya (1996) terhadap pekerja seks Surabaya menunjukkan bahwa upaya intensif pengembangan pendidikan dan pencegahan HIV/AIDS/PMS sudah dilakukan, meskipun demikian tingkat prevalensi PMS yang ada sangat sulit diturunkan. Dari program penjangkauan (*outreach*) yang dilakukan oleh staf melalui program pendidikan sebaya dengan mempergunakan pekerja seks itu sendiri. Hasilnya tingkat penggunaan kon-

dom masih sangat rendah (sekitar 30persen untuk para pendidik sebaya), prevalensi PMS juga sangat tinggi terutama kencing nanah dan jengger ayam. Kampanye penggunaan kondom menunjukkan salah satu bentuk kekerasan dan penindasan terhadap Pekerja seks Komersial, penolakan untuk mempergunakan kondom oleh para pemakai jasa seks sangat tinggi. Bahkan dua kasus yang cukup menakutkan, yang pertama seorang pekerja seks jalanan digampar ketika menawarkan pemakaian kondom, dan yang kedua seorang pekerja seks dari Tambak Asri ketika sudah di kamar dan menawarkan kondom, tamunya naik darah dan melempar pelacur yang sudah dalam keadaan telanjang bulat ke sungai.

Resiko tertularnya STD (*Sexual Transmitted Disease*) dan HIV/AIDS semakin hari semakin membesar mengingat berbagai praktek seks yang beresiko berlangsung terus. Pelacuran terselubung seperti pelacuran di pantai-pantai menghadirkan pelaku-pelaku pekerja seks dalam berbagai bentuk dan dari berbagai usia dan kelompok sosial susah untuk dideteksi sehingga masalah dan khususnya kesehatan reproduksi menjadi semakin sulit untuk dipecahkan. Pengetahuan yang terbatas bahkan sering tidak adanya pengetahuan tentang penyakit kelamin, sampai dengan HIV/AIDS, proses penularan, akibat-akibat yang ditimbulkan, serta gejala-gejalanya menjadi faktor penting dari kesehatan reproduksi yang perlu disadarkan ke pekerja seks.

Pentingnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas ini disebabkan minimnya pengetahuan yang mereka peroleh dari keluarga, sekolah, maupun petugas-petugas kesehatan desa, ditambah dengan banyaknya pekerja seks di pesisir pantai yang sudah bekerja pada usia dini, seperti lulus SD atau bahkan sesudah mendapatkan menstruasi yang pertama. Selain informasi dan pengetahuan kesehatan yang minim, pelayanan kesehatan untuk reproduksi juga menjadi kendala utama bagi mereka. Konstruksi masyarakat yang memberikan stigma negatif pada pekerja seks, menyebabkan mereka juga sulit mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.

D. Pekerja Seks di Pantai Gunungkidul

Sebutan Pekerja seks di Pantai Batu Putih adalah “jamu” dan “barang baru”. Pekerja seks sekitar pantai ini akan tinggal beberapa tahun dan kemudian kalau bosan atau mereka mendapat masalah di daerah tersebut, entah dengan “bos”-nya (sebutan bagi pengelola pekerja seks, yaitu pemilik hotel), ataupun dengan germo atau “mami”-nya (sebutan bagi germo perempuan) maka mereka akan pindah ke daerah yang lain. Tetapi kalau di daerah ini mereka merasakan nyaman maka mereka akan tinggal relatif lama.

Beberapa orang pekerja seks di daerah ini merupakan pekerja seks yang pindah dari Pantai Samas, Pantai Parangkusumo dan Pantai Parangtritis, Bantul. Peraturan Daerah Bantul memaksa mereka untuk pindah ke daerah ini karena mereka harus tetap *survive* dengan pekerjaan yang ada. Pendisiplinan atas tubuh melalui institusi hukum berimplikasi pada resistensi mereka pada aturan tersebut yaitu dengan melakukan gerakan bersama mencari “tempat yang aman dan nyaman” bebas dari kekuasaan yang mencoba mendisiplinkan tubuh mereka. Meskipun tubuh mereka tetap tidak lepas dari kekuasaan dan dikuasai serta diatur oleh agen-agen lain yaitu pengelola hotel, aparat hukum, germo atau mami dan konsumen.

Kekuasaan konsumen pengguna pekerja seks yang disebut sebagai “tamu” di daerah ini adalah penguasaan mereka atas tubuh pekerja seks melalui relasi seksual yang lebih banyak tidakimbang. Tamu berhak datang dan minta kapan saja relasi seksual tersebut dilakukan. Untuk membuat tamu kembali lagi datang kepada pekerja seks, maka mereka berusaha untuk melayani tamu dengan memberikan kepuasan secara seksual kepada mereka, merelakan sebagian besar uangnya untuk membeli kosmetik dan parfum, selalu berusaha ramah, baik, membuat tamu senang, dan yang paling penting adalah tidak membuat masalah dengan tamu. Tidak ada aturan yang ditekankan kepada tamu selain jumlah uang yang harus mereka bayar untuk pekerja seks, sewa hotel, dan germo atau mami sebagai perantara pekerja seks.

Dalam konstruksi relasi kuasa atas seks, Wolf (1991) menggambarkan bagaimana perem-

puan terjebak ke dalam yang disebut *the beauty myth*, mitos itu menjadikan mereka tersubjeksi oleh lelaki. Mitos di sini sesungguhnya sebuah meta narasi yang dalam derajat cukup kuat telah menjadi semacam kondisi yang tidak perlu dipertanyakan dan memiliki kekuatan yang bisa mempengaruhi orang dalam bertindak. Di dalam dunia pekerja seks perempuan, menurut Mundayat (2009: 45) *the beauty myth* dan dominasi *regime of value* lelaki banyak mengkonstruksi perilaku konsumsi pekerja seks perempuan sehingga mereka terjebak ke dalam persaingan antarsesama profesi melalui kompetisi penampilan. *Make up*, baju, sepatu, parfum, tas, dompet yang mahal dan bermerek terkenal merupakan bagian dari *fashion system* yang telah memerangkap mereka ke dalam dunia konsumsi yang berkaitan dengan penampilan.

Di dunia ini, lelaki selaku konsumen seksualitas perempuan mendapatkan dan menemukan ruang untuk memberikan nilai kepada pekerja seks sebagai komoditas yang memiliki nilai ekonomi. Bagi pekerja seks sendiri, penilaian itu telah menjebak dirinya untuk memmanfaatkannya, sehingga mereka beranggapan bahwa penilaian lelaki memiliki kemampuan untuk meningkatkan nilai tukar tubuhnya di arena ekonomi. Hal tersebut merupakan sebuah dunia ekonomi yang digerakkan oleh energi seksualitas yang pada gilirannya ikut mengkonstruksi “nilai” bagi *sexual commodity* itu sendiri. Pada saat yang bersamaan penilaian terhadap tubuhnya telah mengantarkan mereka ke dalam dunia konsumsi *fashion system* yang dipujanya sebagai sumber nilai yang sangat bermakna secara ekonomi, sosial dan politik (Mundayat, 2009: 45).

Pekerja seks di Pantai Batu Putih bisa dikategorikan ke dalam dua kategori, yaitu mereka yang bekerja di dalam hotel dan mereka yang bekerja di luar hotel. Mereka yang bekerja di hotel seperti Prima dan Karmilah menyatakan bahwa mereka relatif lebih aman bekerja sebagai pekerja seks di dalam hotel karena masyarakat mengira bahwa mereka adalah karyawan hotel ataupun warung yang dimiliki penginapan. Apabila sepi pengunjung, pengelola hotel ataupun germo akan aktif menelepon tamu untuk menawarkan “barang baru” kepada mereka. Kondisi ini menyebabkan pekerja seks

tetap selalu bisa bekerja apabila pantai sepi pengunjung, terutama pada hari biasa. Terkait sewa, keamanan dan makan, Prima menyatakan bahwa “sewa tempat tinggal yang murah, keamanan terjamin, dan makan juga gratis” (18 April 2011).

Pekerja seks yang tinggal di hotel harus mematuhi aturan seperti biaya kamar, biaya jasa, aturan kerja, dan sebagainya yang ditetapkan oleh hotel.

“Hotel Hojas memiliki 20 kamar. Tarifnya Rp 20.000 - Rp 25.000,- per kamar. Jika ada “tamun” yang ingin memakai jasa pekerja seks yang sudah terbiasa harga minimalnya Rp 25.000,-, kalau tamunya baru maka coba ditawarkan Rp. 40.000,- dan bisa ditawarkan sampai dengan Rp 30.000,-. Saya tahun-tahun sebelumnya, memiliki 4 orang pekerja seks dan 1 keamanan, tetapi sekarang hanya memiliki dua orang pekerja seks dan tidak ada penjaga keamanan. Semenjak penjaga keamanan saya pecat, saya sendiri yang bertindak sebagai keamanan hotel. Tarif pekerja seks ditentukan oleh pekerja seks sendiri. Saya tidak ikut campur dalam menentukan tarif, tahunya hanya bahwa mereka membayar sewa kamar saja setiap pemakaian yaitu Rp 25.000,-. Pekerja Seks bisa memasang tarif minimal Rp 150.000,- belum termasuk biaya kamar dan keamanan (germo). Penghasilan bersih mereka sekitar 150.000 per jasa. Untuk biaya tempat tinggal pekerja seks dan keamanan dihargai 5000 perhari. Seorang keamanan saya gaji Rp 100.000 per bulan. Penjaga keamanan tersebut juga merangkap sebagai germo, yang akan diberi upah sekitar Rp 50.000-Rp 150.000 oleh tamunya langsung, bukan dari pekerja seks.” Ungkap Toyo, 10 Januari 2011.

Peraturan bagi pekerja seks di dalam hotel harus melayani tamunya sebaik mungkin dan tidak boleh melayani tamu keluar dari area hotel. Aturan ini ditetapkan oleh pengelola hotel karena ada ketakutan bahwa pekerjaan mereka akan diketahui oleh masyarakat dan akan menimbulkan ketegangan hubungan dengan masyarakat sekitar. Pengelola hotel memberikan sanksi bagi

pekerja seks yang sudah tiga kali ketahuan melanggar aturan tersebut akan dikeluarkan dari hotel dan mereka harus mencari pekerjaan lain. Beberapa orang pekerja seks sudah mengalami mendapat sanksi tersebut dan terpaksa keluar dari hotel. Tidak dipatuhinya sanksi-sanksi yang diterapkan oleh pengelola hotel kepada pekerja seks ternyata sering menimbulkan konflik antara pekerja seks dengan pengelolanya. Pekerja seks berusaha untuk menentang sanksi tersebut tetapi pengelola yang tetap mempunyai kuasa dan menaklukkan keinginan pekerja seks asuhannya.

Pekerja seks yang menjalankan profesinya di luar hotel seperti Sita dan Tiurlan adalah orang-orang yang dahulu pernah bekerja sebagai pekerja seks di hotel dan kemudian keluar. Mereka merasakan bahwa ada sisi positif dan negatifnya bekerja di luar hotel. Sisi positifnya mereka bisa merasakan kebebasan dan tidak terikat pada aturan pengelola kamar. Mereka juga tidak terikat dengan germo atau mami karena bisa langsung bertemu dengan tamunya tanpa ada perantara. Keuntungannya mereka tidak perlu menyisihkan uang, tetapi tamu yang memberi uang untuk germo atau mami.

Pekerja seks yang bekerja di luar hotel merasakan sisi negatif dari keputusan bekerja di luar hotel, di antaranya adalah mereka tidak mungkin menutupi identitasnya sebagai pekerja seks, keamanan bagi dirinya tidak terjamin, dan mereka harus selalu berupaya semaksimal mungkin untuk mencari tamunya sendiri. Meskipun demikian, apabila sepi pengunjung mereka terpaksa meminta bantuan germo atau mami untuk mencarikan tamu bagi mereka. Pembayaran untuk germo atau mami antara Rp 50.000,- - Rp 100.000,-.

Ketidaknyamanan yang dialami pekerja seks di luar hotel tidak dialami oleh pekerja seks di dalam hotel. Pekerja seks di luar hotel sering harus menghadapi petugas keamanan sendirian, sedangkan pekerja seks di dalam hotel dilindungi oleh pengelola hotel. Hal tersebut tampak bahwa petugas keamanan yang sering melakukan kontrol di daerah tersebut menyempatkan diri untuk bermain di hotel yang mereka kontrol, bahkan tidak jarang pengelola hotel menawarkan “jamu” atau “barang baru” dan mereka

tak segan-segan menerima tawaran tersebut sebagai bagian dari “upeti”. Untuk keamanan hotel, pengelola hotel membayar pegawai keamanan untuk menjaga hotel, sedangkan keamanan di luar hotel biasanya dikelola oleh masyarakat.

Terkait dengan sikap memandang keberadaan pekerja seks, masyarakat di sekitar daerah tersebut banyak yang sudah mengetahui keberadaan mereka, banyak yang tidak setuju dan beberapa saja yang bisa menerima, karena sedikit dari masyarakat yang menjadi tamu pekerja seks. Pernah terjadi pertengkaran antara masyarakat dengan pekerja seks di daerah di Pantai Batu Putih, Gunungkidul, karena mereka dianggap telah mengotori daerah mereka dan membuat rusaknya rumah tangga penduduk.

Penyingkiran masyarakat pada pekerja seks berimplikasi pada pembentukan komunitas sendiri yang terisolasi dari kehidupan masyarakat. Pekerja seks akan mengalami suatu perasaan *Self-Fulfilling Phrophecy*, yaitu penurunan identitas diri karena tidak terpenuhinya hak atas identitas diri. Mereka akan menarik diri dalam relasinya dengan masyarakat sehingga akan mengalami berbagai hambatan dalam penyesuaian sosial dan pemenuhan diri, seperti pemenuhan atas hak kesehatan reproduksi dan seksualitas.

Dalam kondisi di atas yang terjadi kemudian kesehatan reproduksi dan seksualitas menjadi bagian yang kurang diperhatikan karena mereka akan lebih memperhatikan tubuh fisiknya, mereka berusaha mempercantik diri dan membuat semenarik mungkin untuk mengikat laki-laki melakukan relasi seksualitas. Selain kurangnya pendidikan reproduksi dan seksualitas, juga karena ketidakberdayaan untuk mendatangi puskesmas dan institusi kesehatan lainnya, karena menghindari stigma buruk atas mereka, dan ketakutan terkuak penyakit yang dideritanya.

Beberapa tamu dalam relasi seksual dengan pekerja seks ada yang sering menanyakan terkena atau tidak penyakit menular seksual (PMS). Hal ini berbeda halnya dengan pekerja seks di Pantai Batu Putih yang tidak pernah menanyakan kepada tamunya tentang PMS yang diderita tamunya. Alasannya, mereka mempunyai cara tersendiri untuk mengetahui

tamunya layak dilayani atau tidak, seperti turunan berikut.

“Saya pernah ada tamu, kita sudah masuk dalam kamar, kalau saya kan nggak suka melayani tamu kan nggak suka gelap, kalau orang itu penyakitan kan nggak tau, apa itu gatal apa nggak tahu. Apa kalau penisnya itu keluar cairan itu kan penyakit, saya kan pernah kaya gitu terus saya pegang badannya itu kan kasar, terus saya takut saya hidupin lampunya saya nggak jadi kok, takut saya. Iya kulitnya itu kasar di perut sampai paha kan kasar, nah itu penyakit kulit atau apa kan nggak tahu, terus keluar ada lendirnya kan saya nggak tahu nggak mau kan saya terus keluar.” Sita, 18 April 2011.

Di antara pekerja seks yang diwawancarai, satu orang saja yang pernah mendapatkan pendidikan seks dari Griya Lentera PKBI. Pekerja seks yang lain hanya mendapat pengetahuan dari teman-teman sesama pekerja seks yang tidak memiliki pengetahuan kesehatan reproduksi dan seksualitas secara cukup. Penyakit menular seksual yang mereka ketahui adalah raja singa, penyakit gatal-gatal di bagian alat kelamin, sampai dengan HIV/AIDS. Terkait dengan PMS yang mereka ketahui adalah sebagai berikut.

“Penis berlendir, bau tidak sedap badannya kasar, itu termasuk penyakit. Kalau melakukan hubungan seksual nanti jadi gatal-gatal dan panas.” Prima, 18 April 2011.

Terkait PMS yang diderita teman sesama pekerja seks, ada yang berusaha menyembunyikan dan ada pula yang menunjukkannya kepada teman-temannya. Tidak adanya pekerja seks yang sakit PMS disampaikan oleh Sita, bahwa “Selama ini tidak ada keluhan dari mereka. Entah disembunyikan atau memang tidak ada.” (20 April 2011). Berbeda dengan Tiurlan, yang menyampaikan bahwa “Temannya ada yang mengalami gatal-gatal dan biasanya yang bersangkutan periksa sendiri di bidan langganan atau puskesmas terdekat.” (23 April 2011). Pekerja seks harus menanggung biaya penyembuhan dan bertanggung jawab atas penyakitnya sendiri. Terkait dengan alat kontrasepsi, bebera-

pa pekerja seks menggunakan alat kontrasepsi seperti suntik KB untuk menghindari kehamilan dan kondom untuk melakukan kegiatan seks yang aman, sebagaimana terungkap sebagai berikut.

“Saya menggunakan suntik KB, kebanyakan pekerja seks disini menggunakan KB suntik. Agar tidak hamil ya tamu diminta memakai kondom.” Prima, 18 April 2011. “Saya selalu minta tamu menggunakan kondom, pernah satu kali tamu tidak memakai, saya takut terkena penyakit, terus saya putuskan untuk selalu minta tamu pakai supaya aman dan tidak terjadi kehamilan.” Tiurlan.

Pengetahuan pekerja seks tentang teman atau diri mereka yang mengalami kehamilan dan melahirkan anak dinyatakan bahwa tidak ada, walaupun ada biasanya mereka akan segera menggugurkan kandungannya. Meskipun pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas mereka masih terbatas, tetapi mereka mempunyai kebiasaan untuk memeriksakan diri ke bidan atau puskesmas di luar wilayah Pantai Batu Putih. Mereka tidak memeriksakan diri di puskesmas karena jarang buka, selain itu petugas puskesmas juga sering memberikan stigma buruk pada mereka, seperti mengatakan “*Wah iki mesti dodolan awak, ya, mbak?* (Wah, pasti kamu jualan tubuh, ya, Mbak?” Kondisi tersebut menyebabkan mereka tidak nyaman dan memilih pergi ke puskesmas atau institusi kesehatan yang lain, seperti diungkapkan sebagai berikut. “Saya ke bidan di Yogya, kalau di sini tidak pernah.” Prima, 18 April 2011. “Ke dokter praktek di Bantul setiap satu bulan sekali dan atas pengetahuan Pak Toyo.” Karmilah, 18 April 2011. “Jarang, jika terjadi keluhan saja kalau tidak, ya, tidak periksa.” Tiurlan, 20 April 2012. “Saya biasanya ke bidan di Tepus, tetapi tidak rutin, hanya kalau ingin periksa, ya, langsung pergi.” Susi, 20 April 2012.

Biaya untuk pengobatan yang mereka keluarkan bervariasi, tidak ada sumbangan yang diberikan dari pengelola hotel ataupun germo. Berikut variasi pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh pekerja seks: “Rp 30.000,- kalau cuma cek aja di bidan di Yogyakarta.” Prima, 18 April, 2011. “Kalau untuk yang di Bantul, Rp 50.000,-”

Karmilah, 18 April 2011. “Rp 50.000,- sudah sama obatnya sekalian.” Tiurlan). “Rp 50.000,- sudah termasuk dengan obatnya.” Susi.

Meskipun demikian, mereka juga sering meminta obat kepada pak mantri yang beberapa kali datang ke lokasi tempat menginap pekerja seks dan mereka memberikan obat antibiotik ampisilin untuk mengobati bakteri yang diderita pekerja seks. Mereka harus membayar sekitar Rp 70.000,- untuk antibiotik yang diminum selama tujuh hari. Aturan minumnya 3 x 1 tablet per hari. Teman-teman yang lain menurut Bu Siska juga banyak yang pakai, paling tidak dalam satu bulan pakatnya satu kali. Bapak Mantri sering datang ke sana untuk menjual obat antibiotik yang kemudian dipercaya manjur oleh pekerja seks, karena selama ini tidak ada keluhan-keluhan terkait PMS sejak minum antibiotik. Beberapa pekerja seks, obat tersebut membuat mereka menjadi nyaman dan tidak sakit, padahal berdasarkan informasi dokter dari PKBI adalah sebagai berikut.

“Secara medis, pemakaian antibiotik yang berlebihan dan tidak sesuai dengan penyakit yang diderita akan menyebabkan resistensi akan penyakit serta menyalahi aturan yang ada. Karena belum sakit kok minum obat anti bakteri dan ini terkait dengan pemahaman pekerja seks terkait penyakit yang dideritanya atau ada kecenderungan bahwa pekerja seks tidak mendapatkan pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas sehingga pengelolaan sakit dan penyakitnya tidak tepat sasaran. Atau ketakutan ke puskesmas atau rumah sakit karena stigma yang sering diberikan oleh petugas kesehatan untuk teman-teman yang berprofesi sebagai pekerja seks.”

Kondisi tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan pekerja seks tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas seperti terungkap di atas, serta pengobatan yang tepat sesuai dengan penyakit yang diderita. Selain tidak mendapatkan pendidikan dari luar, pengelola hotel dan penginapan pun tidak memberikan pendidikan tersebut, karena pengelola juga buta tentang pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas dan lebih menyerahkan urusan

tersebut langsung pada pekerja seks sendiri, baik pekerja seks baru maupun yang sudah lama (tua). Situasi ini menyebabkan pekerja seks sering mengalami kebingungan ketika mereka sendiri atau teman-temannya menderita PMS, sementara pengelola tidak mempunyai upaya untuk ikut membantu meringankan penderitaan penyakit mereka.

Untuk menghindari penyakit PMS karena pekerjaan mereka memang riskan dari penyakit ini, sudah ada upaya untuk menggunakan kondom pada saat relasi seksual. Walaupun baik dari pengelola hotel maupun pekerja seks sendiri tidak berani menyampaikan kepada tamu mereka untuk menggunakan kondom, karena menurut mereka itu hak tamu dan untuk kenyamanan tamu dibebaskan. Kondisi ini dibenarkan oleh dokter PKBI yang mendampingi pekerja seks Pasarkembang dan sering memberikan pemeriksaan kesehatan reproduksi bagi pekerja seks pesisir pantai selatan, dimana pekerja seks meskipun diberikan kondom gratis belum tentu menggunakannya.

Pekerja seks menyatakan bahwa mereka menggunakan kondom dan mendapatkan kondom dari warung yang ada di penginapan atau hotel, apotik, bidan tempat memeriksakan kesehatan, atau tamunya sendiri yang membawa kondom. Padahal, kenyataannya ketika ditanyakan kepada pengelola hotel dan warung di sekitar hotel, tidak ada yang menjual kondom, bahkan peneliti ditertawain karena menanyakan kondom di warung-warung atau hotel mereka. Kunjungan ke bidan di lokasi lain jarang sekali dilakukan karena memerlukan biaya transportasi, periksa, dan obat. Pernyataan pekerja seks yang menyatakan bahwa tamu mereka membawa sendiri kondomnya, tidak mungkin karena tamu merasa tidak nyaman melakukan relasi seks dengan kondom. Diperlukan upaya terkait kesehatan reproduksi dan seksualitas, sebagaimana disampaikan dokter PKBI berikut.

“Pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas harus diupayakan, jadi harus ada petugas kesehatan yang terjun kesana. Mereka harus memberikan pendidikan ke pekerja seks, terutama tentang PMS dan HIV dan AIDS, karena sekarang ini angka HIV dan AIDS di Yogyakarta cukup tinggi,

belum lagi yang berada di pesisir pantai karena sekarang ini mereka yang paling sulit mengakses institusi kesehatan. Sebaiknya sebelum mereka sakitpun karena mereka adalah pekerja dengan resiko tinggi, mereka harusnya rutin melakukan pemeriksaan. Jadi mereka sebelum ada keluhan mereka harus rutin periksa karena PMS awalnya tanpa ada keluhan, kalau sudah ada keluhan berarti sudah pada level yang tinggi dan itu akan sulit untuk diobati.”

Walaupun pekerja seks mendapatkan stigma negatif dari masyarakat, mereka adalah manusia yang mempunyai hak atas kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi dan seksualitas sebagaimana manusia dengan profesi lain yang dinilai positif oleh masyarakat. Pendidikan dan pendampingan oleh pemerintah, khususnya institusi kesehatan dan lembaga swasta peduli pekerja seks diperlukan. Pekerja seks butuh mengakses pengetahuan terhadap penularan dan bahaya PMS termasuk HIV dan AIDS, serta perlu perubahan perilaku seks yang beresiko, menjadi *safe seks* (seks aman) dengan menggunakan kondom.

E. Penutup

Pekerja seks pantai selatan di Gunungkidul merupakan pekerja yang belum mempunyai organisasi yang mampu menguatkan eksistensi mereka dalam menghadapi represi kekuasaan dari tamu, pengelola hotel, germo dan *mami*, serta aparat keamanan dan hukum. Ketidakterdayaan mereka dalam pengelolaan kesehatan reproduksi dan seksualitas disebabkan tidak adanya pengetahuan yang cukup tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas, stigmatisasi dari petugas kesehatan, serta keterbatasan pendapatan mereka. Mereka adalah manusia yang berhak untuk mendapatkan hidup yang aman dan nyaman, serta berhak untuk mendapatkan pengetahuan dan pelayanan kesehatan reproduksi dan seksualitas

Di India yang menurut Misra dan kawan-kawan (2005), mempunyai model pendampingan pekerja seks yang mengadopsi hak asasi manusia dalam bekerja sebagai pekerja seks. Programnya melibatkan komunitas-

komunitas pekerja seks. Dua contoh lembaga yang melakukan pendekatan tersebut adalah DMSC dan SANGRAM. DMSC dengan anggota 40.000 lebih pekerja seks bertujuan untuk menciptakan solidaritas dan kekuatan kolektif di antara mereka. Mereka ingin menunjukkan bahwa perempuan pekerja seks adalah seperti pekerja profesi lainnya, yang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari sakit, kekerasan dan eksploitasi, melalui kerjasama dengan pemerintah dan kelompok lain. SANGRAM seperti halnya dengan DMSC, bertujuan untuk menciptakan respons yang berkelanjutan terhadap penyakit HIV bagi pekerja seks.

Pustaka Acuan

- Andersen, Margaret L. dan Howard F. Taylor. (2000). *Sociology: Understanding diverse Society*. USA: Wadsworth/Thomson Learning.
- Azizah, Nur, 2007, Berbagi Cerita: Pengalaman Penyuluhan Reproduksi bagi Korban Trafiking (Daerah Rawa Malang, Jakarta Utara), dalam *Kesehatan Reproduksi: Andai Perempuan Bisa Memilih*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Foucault, Michel. (1978). *The History of Sexuality, vol. 1, An Introduction*, New York: Vintage.
- Foucault, Michel. (1997). *Sejarah Seksualitas: Seks dan Kekuasaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,.
- Foucault, Michel. (2008). *Ingin Tahu, Sejarah Seksualitas*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Gunawan, F.X. (2003). *Wild Reality: Refleksi kelamin dan Sejarah Pronografi*, Jakarta: Gagas Media.
- Hudiono, Esthi Susanti, (1996), Eksploitasi Perempuan Pelacur, dalam *Seminar Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual*, Yogyakarta: UGM.
- Kompas, 22 Juni 2004
- Mundayat, Aris Arif. (2009). *Seks: Wilayah Kekuasaan yang diperebutkan dan dikontestasikan*, dalam Working Papers volume 3 Nomor 1, Juni 2009, Yogyakarta: Laboratorium Sosiologi, FISIP, UAJY.
- Marshall, Catherine dan Gretchen B. Rossman (1995). *Designing Qualitative Research Second Edition*. California: Sage.
- Misra, Geetanjali, Ajay Mahal and Rima Shah (2005). Protecting the Rights of Sex Workers: The Indian Experience, in *Sexuality, Gender and Rights: Exploring Theory and Practice in South and Southeast Asia*, New Delhi: Sage.
- Hatib, Abdul Kadir. (2007). *Tangan Kuasa dalam Kelamin*. Yogyakarta: INSIST Press.
- Purnomo, Tjahyo. (1982) *Dolly: Membedah Dunia Pelacuran Kasus Kompleks Dolly Surabaya*, Jakarta: Grafiti.
- Ritzer, George. (2003). *Teori Sosiologi Postmodern (Terjemahan)*, Yogyakarta: Juxtapose research and publication study club dan Kreasi Wacana.
- Rubin, Gayle. (1984). Thingking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality. In *Pleasure and Danger : Exploring Female Sexuality*, Carol S. Ance, Editor. Routledge and K. Paul.
- Sasongko, ed..(1989). *Population reports: Family planning programs*, Johns Hopkins University,
- Sutama, I Made Arya dan Rita Suhadi. (2005). *Studi Pemilihan dan Penggunaan Antibiotika di Kalangan Pekerja seks Komersial (Pekerja Seks) di lokasi Pasar Kembang Yogyakarta*, penelitian tidak diterbitkan, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Taylor, Steven J. dan Robert Bogdan. (1984). *Introduction to Qualitative Research Methods: The Search for Meanings*. Canada: John Wiley dan Sons.
- Truong, Thanh-Dam. (1990). *Sex, Money, and Morality: Prostitution and Tourism in South-east Asia*, London and New Jersey: Zed.
- Wahyudin. (2003). *Pengakuan Pelacur Jogja*, Yogyakarta: Penerbit TriDe.

Wood, E. A. (2000) '*Working in the Fantasy Factory: The Attention Hypothesis and the Enacting of Masculine Power in Strip Clubs,*' *Journal of Contemporary Ethnography*, Vol. 29, pp. 5–31.

Yulana Sani Saputra, Jaka. (2007). *Makna Hidup Pekerja seks Komersial*. Surabaya: Fakultas Psikologi UNAIR. Skripsi: Tidak diterbitkan.

Menguak Budaya Masyarakat Jawa Pencegah Konflik Sosial

Revealing Javanese Community Culture as Social Conflict Prevention

Warto

Peneliti Madya Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Kementerian Sosial RI Yogyakarta, Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1 Nitipuran, Yogyakarta Telpn (0274) 377265.
Email: <wartos63@yahoo.com>. Diterima 3 September 2013, disetujui 11 Oktober 2013.

Abstract

The study on, Revealing Javanese Community Culture as Social Conflict Prevention, meant to indentify the form and meaning of Javanese community culture in rural area as social conflict prevention. The method used in this research is qualitative that reveal subjective meaning on the subject of social and culture phenomenon happening in some local area. The research was done in Kreet Village, Bantul Regency, as cultural tourism village. Informants were choosen purposivevely, they were key figures who know, understand, and have many informations on culture of local community. Data were gathered through in-depth interview, direct observation, and documentary analysis. Data were analysed descriptively, described the form, meaning, and local culture usefulness in prevention against social conflict. The result showed that to prevent any social conflict the community always used local culture, such as tradition, convention, communal expression, and traditional art. Based on the study was recommended to any related institutions that to set policy and program to eradicate social conflict should synchronize, unite, and vitalize local community culture.

Keywords:

Local Culture-Prevention-Social Conflict

Abstrak

Kajian yang berjudul, Menguak Budaya Masyarakat Jawa Pencegah Konflik Sosial, bertujuan mengidentifikasi bentuk dan makna budaya masyarakat Jawa di perdesaan untuk mencegah terjadinya konflik sosial. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang mengungkap makna subjektif secara mendalam tentang gejala sosial pelaku (subjek) budaya sekaligus mengungkap proses dan dinamika gejala sosial budaya yang terjadi di daerah setempat. Penelitian dilakukan di Dusun Kreet sebagai desa wisata budaya. Informan dipilih secara *purposive* yakni tokoh-tokoh kunci yang benar-benar mengetahui, memahami, dan memiliki banyak informasi mengenai budaya masyarakat setempat. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (*indepth interview*), pengamatan langsung, dan telaah dokumen. Analisis data dilakukan secara deskriptif, untuk menggambarkan bentuk, makna, dan pendayagunaan budaya lokal dalam mencegah terjadinya konflik sosial. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa dalam upaya mencegah terjadinya konflik sosial, masyarakat selalu mendayagunakan budaya lokal, dalam bentuk tradisi, adat-istiadat, ungkapan masyarakat, dan kesenian tradisional. Direkomendasikan, kepada berbagai pihak terkait agar dalam merumuskan kebijakan dan program kegiatan penanggulangan permasalahan konflik sosial perlu menyelaraskan, memadukan, dan mendayagunakan budaya masyarakat setempat.

Kata kunci:

Budaya Lokal–Pencegahan-Konflik Sosial

A. Pendahuluan

Secara umum sebenarnya masyarakat Indonesia memiliki karakter menghindari terjadinya suatu konflik sosial, yang oleh Soetrisno (2003: 13) digambarkan sebagai masyarakat yang berusaha hidup dengan *guyup rukun*. Karakter masyarakat tersebut bahkan dipertegas oleh Suseno (dalam Sunit Agus Tri Cahyono, 2012: 1) yang menyatakan, bahwa secara umum berbagai tradisi budaya di Indonesia mengutamakan keselarasan hubungan orang per orang dalam masyarakat yang dilandasi prinsip rukun dan

hormat. Secara tradisi, masyarakat Indonesia pada umumnya memandang bahwa kekerasan bukan merupakan watak yang terpuji.

Namun pada realitasnya, sejak tahun 1996 masyarakat masih sering dilanda konflik sosial. Kerusakan terus terjadi di berbagai daerah, bermula dari peristiwa kerusakan di Situbondo tahun 1996, Sanggauledo tahun 1996 dan 1997, Tasikmalaya tahun 1997, Rengasdengklok tahun 1997, Poso tahun 1998, Ambon tahun 1999, dan kerusakan di Mataram tahun 2000 (Taufik, 2000: 1). Meskipun melalui pasang

surut, kenyataannya konflik sosial di beberapa daerah masih terus berlanjut sampai sekarang, misalnya pada tahun 2012 kerusuhan juga masih terjadi di Mesuji Lampung Utara. Dilihat dari jumlah kasus, Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa konflik sosial yang terjadi pada tahun 2010 sebanyak 93 kasus, dan pada tahun 2011 menurun menjadi 77 kasus. Namun hingga akhir 2012 jumlah kejadian konflik sosial meningkat lagi menjadi 89 kasus. Kementerian Sosial berhasil mengidentifikasi terdapat 189 titik rawan konflik sosial yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Konflik sosial yang terjadi di beberapa daerah tersebut disebabkan oleh banyak faktor, antara lain kondisi masyarakat Indonesia yang plural dengan keanekaragaman suku, agama, dan ras. Kondisi tersebut cenderung membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat jika ada ketimpangan pembangunan, ketidakadilan, kepentingan sosial ekonomi, serta dinamika politik yang tidak terkendali, seperti pelaksanaan pemilihan legislatif, bupati, dan kepala desa. Menurut Setyo Sumarno, dkk, terjadinya konflik sosial secara umum disebabkan oleh tiga faktor, pertama motif sosial yakni sikap kurang saling menghormati di antara warga masyarakat yang berbeda latar belakang sosial, sehingga perbedaan kepentingan mengakibatkan terjadinya letupan sosial yang mengganggu ketenteraman masyarakat. Kedua, motif ekonomi berupa perbedaan kemampuan di antara warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, sehingga jika terjadi gesekan kepentingan dalam mendayagunakan sumberdaya ekonomi mendorong terjadinya konflik sosial di masyarakat. Ketiga, motif politik yakni kepentingan politik sehingga jika terjadi gesekan kepentingan dalam proses perebutan kekuasaan dapat menimbulkan konflik sosial.

Berdasar data tersebut dan didukung pengamatan peneliti menunjukkan, bahwa berbagai kasus konflik sosial ternyata cenderung tidak terjadi dalam komunitas masyarakat Jawa (baca: Suku Jawa). Mengacu pendapat Suseno yang menegaskan, bahwa budaya Jawa pada satu sisi mengutamakan keselarasan hubungan di antara individu, dan di sisi lain kasus konflik sosial cenderung jarang terjadi dalam

masyarakat Jawa, peneliti terdorong untuk mengungkap dan mengkaji budaya masyarakat Jawa yang didayagunakan untuk mencegah terjadinya konflik sosial.

Atas dasar latar belakang penelitian di muka, permasalahan penelitian yang diajukan adalah bagaimana bentuk dan makna budaya masyarakat Jawa yang didayagunakan untuk mencegah terjadinya konflik sosial. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi bentuk dan makna budaya masyarakat Jawa yang didayagunakan untuk mencegah konflik sosial. Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat, pertama bagi Kementerian Sosial dan berbagai pihak terkait dalam menetapkan kebijakan pembangunan ketahanan sosial, terutama masyarakat di daerah rawan konflik, agar mampu mencegah dan berdaya menanggulangi konflik sosial berbasis nilai budaya lokal. Kedua, menambah perbendaharaan khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang keragaman bentuk dan makna budaya lokal masyarakat Jawa, yang didayagunakan untuk mencegah terjadinya konflik sosial.

B. Kajian Teori

Budaya Lokal. Budaya, yang istilah lengkapnya kebudayaan oleh antropolog didefinisikan secara berbeda-beda, bergantung dari cara pandang mereka masing-masing. Deddy Mulyana, dkk (2001: 23) mendefinisikan budaya sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hirarki, agama, waktu, peranan, hubungan, ruang, konsep alam semesta, objek materi dan milik, yang diperoleh sekelompok orang dari suatu generasi ke generasi berikutnya melalui usaha individu dan kelompok. Lebih lanjut dikemukakan, bahwa budaya menampakkan diri dalam pola, bentuk kegiatan, dan perilaku yang berfungsi sebagai model tindakan penyesuaian diri ataupun gaya komunikasi, yang memungkinkan individu tinggal dalam suatu masyarakat di lingkungan, tingkat perkembangan, dan dalam waktu tertentu.

Masih berkaitan dengan perihal budaya, Roger Keesing dan Godenough (1999: 68) menempatkan budaya (baca: kebudayaan) ke dalam dua domain. Pertama, kebudayaan merupakan sistem ideasional yakni suatu konsep gagasan

yang dimiliki oleh setiap individu yang menjadi panduan dalam hidupnya. Sebagai suatu sistem ideasional, budaya berada di dalam alam kognitif setiap individu dan berada pada alam pikiran (*mind*) masing-masing individu, bahkan dimiliki secara bersama dalam suatu komunitas. Budaya dalam perspektif ini merupakan pola kehidupan suatu komunitas dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan dengan berulang secara teratur.

Budaya dalam pengertian tersebut dapat dipandang sebagai suatu sistem pengetahuan yang memberikan pedoman bagi individu guna menentukan suatu objek kegiatan, yang dirasakan dan dilakukan, serta cara melakukannya. Kebudayaan dalam pernyataan lain, merupakan suatu “alat” atau media yang digunakan masyarakat di dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Di dalam kehidupan masyarakat, budaya dalam bentuk sistem gagasan sebagaimana dikemukakan oleh antropolog, antara lain dapat ditemui dalam berbagai tradisi (adat-istiadat), ungkapan masyarakat, dan kesenian.

Kedua, budaya merupakan suatu sistem makna yang selalu berkait dengan berbagai simbol tertentu dan diketahui atau dikenal serta disebarluaskan oleh warga masyarakat yang menjadi pendukungnya. Budaya dipandang sebagai suatu simbol yang mengandung makna tertentu, di dalamnya pasti terdapat suatu pengertian yang perlu diterjemahkan dan ditafsirkan maknanya. Lebih lanjut, dari hasil terjemahan dan penafsiran berbagai simbol tersebut dapat diketahui makna, yang kemudian akan disebarluaskan oleh pendukungnya kepada warga masyarakat yang lain. Budaya dalam perspektif ini diartikan sebagai hasil pemaknaan dari sejumlah simbol oleh suatu masyarakat pendukungnya dalam memandang berbagai peristiwa alam ataupun gejala sosial yang sedang terjadi.

Mengacu konsep tersebut, dalam masyarakat Jawa telah dikenal secara luas berbagai simbolisasi berikut pemaknaan yang selalu mewarnai semua aspek kehidupan warga masyarakat pendukungnya. Setiap sikap, perilaku, perbuatan ataupun suatu peristiwa tertentu dalam kehidupan sosial masyarakat selalu dikaitkan

dengan simbol yang bermakna tertentu, dan senantiasa dihubungkan dengan keadaan atau kondisi masyarakat setempat. Meskipun tetap disadari, bahwa era modernisasi dan globalisasi cenderung mempengaruhi warga masyarakat untuk meninggalkan budaya leluhurnya. Atik Triratnawati, dkk (2012: 12) dalam kaitan ini mengemukakan, bahwa suatu budaya akan ditinggalkan pendukungnya apabila dianggap tidak lagi mampu memenuhi harapan dan manfaat, sebagai gantinya akan muncul budaya baru baik sebagai alternatif maupun tandingan yang dipandang mampu memenuhi harapan dan bermanfaat bagi masyarakat setempat.

Konflik Sosial, sebagaimana ragam definisi budaya, pengertian konflik sosial juga bermacam-macam. Menurut Istiana Hermawati, dkk (2012: 13), konflik sosial berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial di antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok), salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuat tidak berdaya (Konflik Sosial: www.google.co.id, diunduh tanggal 11 Maret 2012). Adam dan Jesica (2000: 45) mendefinisikan konflik sosial ke dalam dua sudut pandang. Pertama, konflik sosial dipandang merupakan suatu peristiwa yang diyakini selalu terjadi dalam interaksi antarindividu ke dalam struktur sosial. Kedua, konflik sosial diartikan secara jelas sebagai bentuk perselisihan secara terbuka, seperti unjuk rasa, gerakan perlawanan, pertikaian antarkelompok, permusuhan antargolongan, dan peperangan antarbangsa.

Apabila ditelusuri secara mendalam, konflik sosial terjadi karena berbagai faktor penyebab, antara lain fanatisme dari perbedaan ras, suku, ataupun agama. Selain itu, juga akibat adanya pertentangan paham ataupun tujuan, mulai dari yang bersifat sederhana tetapi memiliki nilai tinggi misalnya menyangkut harga diri, hingga yang bersifat sangat kompleks seperti perebutan harta benda, perselisihan tanah, dan penguasaan sumberdaya lingkungan. Konflik sosial juga sering muncul apabila harga diri dan martabat salah satu kelompok masyarakat diusik atau disinggung oleh komunitas lain.

Pada hakikatnya, kehidupan masyarakat (Suku Jawa) senantiasa menjauhi terjadinya konflik sosial. Hakikat kehidupan masyarakat ini selaras dengan penegasan Myers (dalam Istiana Hermawati, dkk, 2012: 15) yang menyatakan, bahwa dalam pandangan tradisional konflik sosial dianggap sebagai sesuatu yang buruk dan harus dihindari. Pandangan ini sangat menjauhi terjadinya konflik sosial karena dinilai sebagai faktor penyebab pecahnya suatu kelompok masyarakat. Oleh karena itu, menurut pandangan tradisional ini terjadinya konflik sosial perlu dicegah. Apabila potensi konflik tidak dapat dicegah, semua pihak yang terlibat mengupayakan untuk tidak dilakukan secara terang-terangan. Tindakan tersebut dilakukan atas dasar filosofi dan pandangan hidup masyarakat Jawa yang selalu mengutamakan *guyup*, keharmonisan hubungan, dan kedamaian sosial. Setiap warga memiliki pandangan hidup yang senantiasa menjunjung tinggi nilai keselarasan, keserasian, dan keseimbangan tatanan sosial yang berlaku di daerah setempat. Oleh karena itu, warga masyarakat yang masih menjunjung tinggi budaya Jawa selalu berusaha membuang jauh perilaku permusuhan.

Namun demikian, tidak dipungkiri bahwa di dalam masyarakat suku Jawa juga sering muncul terjadinya konflik, terutama jika pihak lain telah menyinggung apalagi melecehkan harga diri dan martabat individu ataupun kelompok. Konflik dalam masyarakat juga sering muncul karena perselisihan kedua belah pihak yang berkaitan dengan ketidakadilan dan diintervensi pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Berkaitan dengan munculnya konflik, sebenarnya filosofi budaya Jawa telah berpandangan, bahwa perselisihan apalagi *perkaratan* (penyelesaian masalah ke pengadilan) merupakan tindakan yang *saru* (memalukan). Masyarakat sangat memahami dan menyadari, bahwa perselisihan apalagi konflik sosial tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi hanya akan menimbulkan masalah bahkan malapetaka bagi kedua belah pihak yang berkonflik. Menurut Istiana Hermawati, dkk (2012: 22), konflik sosial akan menimbulkan akibat: retaknya persatuan kelompok yang berkonflik; hancurnya harta benda, dan apabila konflik sudah berubah menjadi kekerasan akan berakibat jatuhnya

korban jiwa manusia; berubahnya sikap dan kepedulian individu; munculnya dominasi kelompok yang menang terhadap kelompok yang kalah.

C. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dusun Krebbe, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, sebagai kawasan desa wisata budaya yang selama ini masih berkomitmen *nguri-nguri* (melestarikan) budaya Jawa seperti tradisi *memetri dusun*, kegiatan *mocopatan*, dan wayangan secara periodik. Sumber data ditentukan berdasar kriteria tertentu yang mengacu pada tujuan penelitian, yaitu memilih informan yang benar-benar mengetahui, memahami, dan memiliki banyak informasi serta mampu menjelaskan mengenai nilai-nilai budaya setempat yang relevan untuk mencegah terjadinya konflik sosial. Berdasar kriteria tersebut yang ditetapkan sebagai informan yakni tokoh informal (kepala dusun dan ketua RT), tokoh informal (tetua dusun, pemuka adat, pemuka agama, pendidik), dan pengurus perkumpulan yakni ketua peguyuban seni karawitan, *mocopatan*, dan ketua sanggar tari.

Pengumpulan data menggunakan studi etnografi untuk mengungkap budaya lokal berkaitan dengan tradisi, ungkapan masyarakat, kesenian, dan norma masyarakat Jawa. Studi etnografi ini dimaksudkan untuk menggali data melalui wawancara secara mendalam, menurut Catherine Dawson (2010: 29-30) disebut juga wawancara tidak berstruktur yang merupakan pendekatan favorit dalam mengungkap kehidupan manusia. Dalam wawancara jenis ini, peneliti berusaha untuk mendapatkan pemahaman holistik dari sudut pandang yang diwawancarai atau situasinya. Informan bebas untuk berbicara tentang apa yang dia anggap penting dengan sedikit arahan dari peneliti. Wawancara digunakan untuk mengungkap tentang berbagai perihal diangan-angankan, dipikirkan, dicita-citakan, dan dilakukan masyarakat yang memiliki budaya tersebut. Peneliti bertindak memberi makna atas perilaku warga masyarakat setempat sesuai dengan yang mereka angan-angankan, dipikirkan, dan dicita-citakan (Hudon dalam Atik Triratnawati. 2012: 13).

Data yang terkumpul dianalisa secara deskriptif untuk menggambarkan bentuk, makna, dan pendayagunaan budaya lokal masyarakat untuk mencegah terjadinya konflik sosial. Proses analisis dimulai dengan menghimpun dan merumuskan makna atau nilai dari keterangan informan, mengelompokkan data ke dalam klasifikasi berdasar kriteria keterangan yang ditetapkan. Menghubungkan baik antara pernyataan informan, antara pernyataan informan dengan informasi hasil studi dokumen ataupun hasil pengamatan lapangan. Memaknai data dengan menguraikan dan menjelaskan secara deskriptif mengenai arti fenomena yang berkaitan dengan budaya masyarakat yang didayagunakan untuk mencegah terjadinya konflik sosial.

D. Budaya Lokal Masyarakat Pencegah Konflik Sosial

Secara garis besar diungkap tradisi/adat-istiadat, ungkapan masyarakat, dan kesenian tradisional yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal dalam upaya mencegah timbulnya bencana konflik sosial dapat dideskripsikan sebagai berikut.

1. **Tradisi/Adat Istiadat:** Pertama, *Rembug Desa*, yang dalam istilah bahasa Indonesia adalah musyawarah merupakan salah satu tradisi masyarakat Jawa di pedesaan termasuk di Dusun Krebet sebagai lokasi kajian. *Rembug desa* atau bermusyawarah dilakukan oleh warga setempat dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan dalam menentukan suatu langkah bersama (yang oleh warga setempat diistilahkan *saeyeg saeko kapti*) dalam rangka menyelesaikan suatu pekerjaan yang membutuhkan banyak tenaga ataupun mengatasi suatu permasalahan tidak terkecuali masalah sosial yang berkaitan dengan potensi persekutuan dan konflik diantara warga dalam lingkup dusun atau desa. Kegiatan *rembug desa* warga masyarakat di Dusun Krebet menurut informan biasanya diprakarsai oleh tokoh dusun baik tokoh formal (ketua RT, kepala dusun/dukuh) maupun tokoh non formal (ketua adat atau pemuka agama). Kegiatan pengambilan keputusan melalui *rembug desa* untuk mencapai kesepakatan

ini dilakukan warga masyarakat lokasi kajian dengan maksud agar keputusan yang telah disepakati secara mufakat tersebut dapat diketahui dan dipahami oleh seluruh warga masyarakat yang berkepentingan. Tujuannya adalah agar semua warga masyarakat dalam satu dusun bertanggung jawab untuk menjunjung tinggi dari setiap keputusan penyelesaian masalah, sehingga diantara warga tidak saling menyalahkan ataupun terjadinya suatu pertentangan dalam melaksanakan keputusan yang telah disepakati.

Menurut sejumlah informan penelitian ini, *rembug desa* juga mereka lakukan dalam upaya meredam potensi terjadinya konflik diantara kelompok warga. Sumber data tersebut mencontohkan, bahwa sebelum dilakukan penelitian ini di Dusun Krebet pernah beberapa kali terjadi kecenderungan timbulnya konflik diantara warga setempat. Pemicu potensi terjadinya konflik diantara warga dari kasus satu dengan yang lain menurut mereka berbeda, misalnya pernah terjadi perseteruan batas pekarangan antara kedua keluarga yang masing-masing memiliki pengaruh, pertikaian antara kedua kubu pendukung dalam pemilihan Kepala Dusun/Dukuh, dan kesalahpahaman antara kedua penganut agama tertentu. Namun demikian, semua potensi terjadinya konflik diantara warga masyarakat tersebut dapat diatasi melalui musyawarah dalam wadah *rembug desa*.

Makna dari keberadaan budaya lokal masyarakat Jawa yang berbentuk tradisi *rembug desa* ini adalah bahwa masyarakat setempat (warga Dusun Krebet) memiliki langkah yang arif dan kerjasama dalam upaya mencegah dan meredam terjadinya konflik sosial, sehingga mampu mencapai kondisi kedamaian dan keharmonisan hubungan sosial antara warga. Kaitan dengan ketahanan sosial masyarakat (*tansosmas*) adalah, bahwa masyarakat di lokasi kajian memiliki kearifan lokal dalam bentuk budaya berupa tradisi *rembug desa* sebagai sumberdaya sosial yang masih didayagunakan untuk menuju ketahanan masyarakat.

Kedua, *Gugur Gunung*, secara harfiah *gugur* berarti roboh/hancur sehingga arti *gugur gunung* adalah menghancurkan atau meratakan gunung, yang sudah barang tentu memerlukan banyak tenaga. Berkait dengan tradisi ini lebih lanjut informan menjelaskan, bahwa yang dimaksud *gugur gunung* adalah bergotong royong, yakni merupakan kebersamaan dalam melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan pekerjaan sebagai salah satu tradisi masyarakat di lokasi kajian (Dusun Krebet). *Gugur gunung* pada hakikatnya adalah kebersamaan masyarakat pedesaan dengan saling membantu diantara mereka terutama dalam menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan tenaga banyak orang. Informan mencontohkan, *gugur gunung* perlu dilakukan warga dalam membantu salah satu keluarga yang *ngedekake omah* (mendirikan rumah tradisional) yang masih menggunakan sejumlah *soko/cagak* (tiang), yang biasanya membutuhkan bantuan tenaga hampir seluruh warga dusun setempat. *Gugur gunung* di dusun ini tidak hanya dilakukan dalam membantu salah satu keluarga yang membutuhkan tenaga banyak, tetapi juga dilakukan masyarakat dalam menyelesaikan pekerjaan yang bersifat untuk kepentingan bersama seperti mengeruk saluran air (*selokan*), memperbaiki jalan dusun yang rusak, dan mengerjakan pembangunan gardu ronda ataupun balai dusun.

Berkait dengan tradisi tersebut sumber data juga menjelaskan, bahwa *gugur gunung* yang dilakukan warga masyarakat setempat memiliki beberapa tujuan. Selain bertujuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang harus dilakukan dengan banyak tenaga, juga bertujuan untuk menjalin silaturahmi melalui interaksi sosial selama bekerja bersama. Di samping itu, juga bertujuan untuk membina rasa kekeluargaan diantara warga dan yang lebih penting untuk menanamkan nilai kebersamaan dan nilai kerukunan kepada para generasi muda.

Berdasar pengertian, hakikat, dan tujuan dari *gugur gunung* sebagaimana diuraikan di atas, dapat ditegaskan bahwa tradisi

masyarakat tersebut pada dasarnya merupakan warisan leluhur mereka dalam upaya membina sikap toleransi, rasa kebersamaan dan kerukunan, serta rasa kesetiakawanan sosial diantara warga masyarakat pedesaan setempat. Dengan demikian, *gugur gunung* yang dilakukan warga Dusun Krebet sebagai lokasi kajian merupakan suatu bentuk kegiatan yang bernilai kearifan lokal dalam upaya menghindari terjadinya persengketaan, pertikaian, permusuhan, yang apabila tidak diredam dapat menjadi potensi timbulnya konflik diantara warga. Oleh karena itu, secara tersirat *gugur gunung* juga merupakan wahana masyarakat setempat untuk mencegah terjadinya konflik diantara warga dalam rangka menuju masyarakat yang berketahanan sosial.

Ketiga, *Merti Dusun*, menurut informan merupakan upacara adat yang bertujuan *memetri* (memelihara) dalam rangka mempertahankan atau memperbaiki situasi dan kondisi wilayah/kawasan tertentu dalam hal ini lingkup Dusun Krebet. Tradisi *merti dusun* pada hakikatnya adalah kegiatan ritual secara adat Jawa berbentuk doa bersama. Upacara adat ini diikuti oleh seluruh warga masyarakat Dusun Krebet dari semua golongan dengan tidak membedakan agama yang dianut dan status sosial ekonomi. Kegiatan berdoa bersama ini dilaksanakan di pendopo dusun dan diselenggarakan secara rutin setiap setahun sekali setelah panen raya. Berkait dengan tradisi ini Mbah Suro Paijan selaku informan mengemukakan: "*Rikala semanten wekdal sak perangan ageng warga tasih "abangan" inggih menika warga sampun anggadhahi agami namung dereng nindakaken sedaya syareatipun, upacara merti dhusun wonten ing Krebet dipun pandhegani dening sesepuh adat. Upacara wekdal semanten tujuanipun kormat lan ugi memuji dateng Dewi Sri (satunggaling lambang suburipun pantun), kangge pratandha ngaturaken agunging panuwun amargi saget panen pantun ingkang kathah*".

Apabila pernyataan informan tersebut dialihbahasa Indonesia maksudnya "Pada waktu dahulu sebagian besar masyarakat

masih “*abangan*” yaitu masyarakat telah memeluk suatu agama tetapi belum menjalankan syariat, upacara *merti dusun* di Kreet ini dipimpin oleh tetua adat. Upacara pada waktu itu bertujuan untuk menghormati dan memuja Dewi Sri yang merupakan lambang kesuburan tanaman padi. Sebagai tanda terima kasih atas hasil panen padi yang melimpah”.

Berdasar hasil pengamatan di lapangan dalam perkembangannya, Islam sebagai agama mayoritas penduduk dan rerata mereka telah menjalankan syariat, ternyata upacara *merti dusun* dipimpin oleh seorang pemuka agama Islam yang oleh warga Dusun Kreet dikenal dengan sebutan Mbah Rois atau Mbah Imamudin (Imam=pemimpin, mudin=agama). Tujuan upacara adat ini telah disesuaikan dengan ajaran agama Islam, yaitu berdoa dengan melafalkan puji dzikir dan tahlil bersama untuk memohon kepada Allah SWT atas rejeki yang melimpah. Oleh karena Dusun Kreet merupakan daerah pegunungan tandus, maka upacara tradisi tersebut dilaksanakan sebagai rasa syukur atas melimpahnya segala rejeki baik dari hasil panen *palawija* (singkong, jagung, dan ubi-ubian) maupun hasil dari usaha kerajinan batik kayu sebagai andalan warga setempat.

Rangkaian upacara berbentuk satu *gunungan lanang* dan satu *gunungan wadon* yang dibuat dari bahan makanan mentah hasil panen. Selain itu juga disajikan sejumlah nasi *ambengan* dengan *uborampe* (perlengkapan lauk pauk). Kemudian rangkaian upacara tersebut diarak dari rumah Kepala Dusun menuju balai dusun yang berjarak sekitar satu kilometer, untuk selanjutnya di tempat tersebut diadakan doa bersama dan diakhiri makan bersama yang oleh warga setempat disebut *kembol bujana* atau *keprung bareng*.

Upacara adat ini oleh masyarakat setempat juga disebut *majemuk* yang berarti beranekaragam. Lebih lanjut informan menjelaskan, istilah *majemuk* diartikan selain dalam upacara tersebut dirangkai dan dihidangkan bermacam-macam panganan yang

dibuat dari bahan makanan hasil panen, juga mengandung makna para partisipan terdiri dari berbagai golongan agama dengan status sosial ekonomi yang berbeda, sehingga melalui penyelenggaraan tradisi *merti dusun* diharapkan akan terjaga kesatuan diantara warga dalam rangka menuju masyarakat yang adil dan makmur serta berkesejahteraan sosial. Kondisi yang diharapkan warga Dusun Kreet ini juga digambarkan oleh media massa Kedaulatan Rakyat (Sabtu, 15 Juni 2013, hal. 4), yang mewartakan bahwa “tradisi *merti dusun* atau *majemuk* yang digelar secara turun temurun sejak nenek moyang menjadi media perekat dan pemersatu masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu dari peringatan *merti dusun* atau *majemuk* tersebut semua elemen masyarakat lintas generasi ikut ambil bagian di dalamnya. Termasuk digelarnya pentas kesenian *reog* dan *jatilan* di sepanjang jalan untuk mengiringi gunung *lanang* dan gunung *wadon*”.

Kaitan dengan pencegahan konflik sosial, penyelenggaraan *merti dusun* merupakan salah satu wahana perekat dan pemersatu masyarakat dalam lingkup wilayah tertentu. Dalam hal ini sebagai wahana pemersatu baik antarberbagai elemen masyarakat maupun lintas generasi. Setiap tahun diselenggarakan tradisi tersebut, berarti setiap warga masyarakat selalu diingatkan untuk senantiasa menyadari betapa pentingnya hidup dengan prinsip *guyub rukun*, saling membantu, dan saling menolong. Tradisi *merti dusun* dengan demikian, sebagai salah satu sarana untuk mencegah terjadinya konflik sosial untuk menuju masyarakat yang berketahanan sosial.

2. **Ungkapan Lokal:** pertama, *Crah Agawe Bubrah, Rukun Agawe Sentosa*, secara tersurat arti yang terkandung dalam ungkapan ini adalah permusuhan membuat rusak, kerukunan membuat kekuatan (*crah*: permusuhan; *agawe*: membuat; *bubrah*: rusak; *rukun*: kerukunan, *sentosa*: kesentosaan). Arti yang tersirat dari ungkapan lokal tersebut adalah bahwa permusuhan apalagi konflik sosial hendaknya dihindari

karena hanya akan menimbulkan banyak kerugian yakni kerusakan bahkan kehancuran. Sebaliknya, kerukunan seyogyanya perlu terus dibina dan dikembangkan karena dengan bermodal kerukunan masyarakat akan memiliki kesentosaan.

Berkait dengan perihal ini informan menjelaskan, bahwa ungkapan tersebut mengandung nilai petuah dan nasehat bagi masyarakat setempat, baik dalam kelompok terbatas maupun kelompok besar agar senantiasa membina dan menggalang kerukunan dan persatuan secara terus menerus. Lebih lanjut informan mengemukakan suatu filosofi yang melatarbelakangi keberadaan ungkapan ini. Menurutnyanya, masyarakat setempat mengumpamakan sapu lidi untuk melambangkan betapa besar peranan suatu kerukunan atau persatuan. Batang lidi yang kecil dan lemah jika telah dihimpun dalam suatu ikatan yang kuat, ternyata menjadi suatu kekuatan yang sangat besar manfaatnya. Setelah diikat menjadi sapu, maka seseorang yang memiliki cukup kekuatan pun tidak akan mampu mematahkan. Sebaliknya, jika batang-batang lidi itu dilepas dari ikatannya, maka dengan cukup mudah seseorang mampu mematahkan satu persatu. Sehubungan dengan filosofi tersebut, untuk menggambarkan betapa lemahnya kekuatan akibat perpecahan atau konflik sosial, warga setempat menggambarkan dengan istilah lokal "*kaya sapu ilang suhe* (*kaya*: seperti, *sapu*: sapu lidi, *ilang*: hilang, *suhe*: ikatannya), artinya seperti sapu lidi hilang ikatannya.

Ungkapan ini menurut informan pengaruhnya masih sangat besar terhadap sikap dan perilaku masyarakat setempat. Berlandaskan ungkapan tersebut, setiap warga merasa terdorong untuk senantiasa memahami dan menyadari pentingnya kerukunan dan persatuan, baik dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan di lingkungan ketetangga, maupun dalam kehidupan masyarakat secara lebih luas. Kerukunan warga ternyata terus dijaga kelestariannya dalam rangka menciptakan kondisi dan suasana damai sejahtera dan terhindar

dari terjadinya konflik sosial. Menurut tokoh masyarakat selaku informan, setiap ada persengketaan diantara warga ataupun antar kelompok masyarakat, senantiasa diselesaikan secara kekeluargaan dan diusahakan untuk tidak sampai terjadinya perpecahan, pertikaian, permusuhan apalagi konflik sosial. Kenyataan di lokasi kajian menunjukkan, bahwa kedudukan ungkapan "*crah agawe bubrah, rukun agawe sentosa*" masih dijunjung tinggi oleh warga masyarakat setempat selaku pendukungnya. Ungkapan tersebut masih terus dipegang teguh sebagai salah satu pandangan hidup warga masyarakat setempat dalam upaya mencegah dan meredam potensi terjadinya konflik sosial untuk menuju ketahanan masyarakat.

Kedua, *Ana Rembug Becik Dirembug*, pengertian ungkapan lokal ini secara tersurat adalah jika ada persoalan atau permasalahan lebih baik dimusyawarahkan, (*ana*: ada, *rembug*=permasalahan yang perlu diselesaikan, *becik*=baik, *dirembug*=dimusyawarahkan). Sementara, makna yang tersurat dalam ungkapan masyarakat tersebut adalah bahwa segala persoalan ataupun permasalahan terlebih yang menyangkut banyak orang, sebaiknya diselesaikan dengan cara musyawarah sehingga tercapai kesepakatan (mufakat).

Penggalian data lebih lanjut diperoleh informasi, bahwa munculnya ungkapan tersebut dilatarbelakangi falsafah masyarakat Jawa dalam konteks ini warga Dusun Kreet yang secara turun temurun sejak dulu menghargai dan menghormati hukum atau peraturan yang mengatur sekaligus mengontrol perilaku dan perbuatan setiap warga di daerah setempat. Masyarakat di lokasi kajian tidak hanya menghargai hukum ataupun peraturan yang tercantum di dalam pasal atau ayat undang-undang dan peraturan pemerintah, tetapi juga menghargai dan menghormati peraturan lokal yakni adat-istiadat dan tradisi yang selama ini masih berlaku di dalam kehidupan masyarakat setempat. Informan lebih lanjut menjelaskan dengan pernyataan lain, bahwa hidup

bernegara di samping harus mematuhi hukum negara, sebaiknya juga perlu mematuhi aturan lokal yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat setempat. Demikian sikap dan pandangan warga lokasi kajian sebagai bagian masyarakat yang berbudaya Jawa. Di tengah kehidupan masyarakat lokasi kajian juga terdapat ungkapan yang berbunyi "*negara mawa tata, desa mawa cara*" yang artinya negara memiliki hukum, desa memiliki adat-istiadat. Berlandaskan ungkapan inilah maka segala persoalan atau permasalahan seberat apapun termasuk persengketaan dan konflik antar warga di lingkungan masyarakat setempat tidak perlu diselesaikan melalui jalur hukum negara. Apabila dimungkinkan cukup diselesaikan di tingkat lokal dengan cara yang arif dan bijak melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Ungkapan "*ana rembug becik dirembug*" sampai saat penelitian ini dilakukan masih sangat dihargai dan dijunjung tinggi oleh warga masyarakat di lokasi kajian. Hasil wawancara dan didukung pengamatan menunjukkan, bahwa di Dusun Krebbe sebagai lokasi kajian masih dilestarikan budaya "*rembug desa*" yang diselenggarakan setiap selapan (35 hari) di balai dusun setempat. Menurut informan, *rembug desa* merupakan wadah untuk menampung berbagai persoalan yang perlu dimusyawarahkan oleh seluruh warga dusun setempat, agar permasalahan tidak meluas menjadi suatu pertikaian, persengketaan ataupun menimbulkan terjadinya konflik diantara kelompok warga masyarakat. Oleh karena itu, berbagai persoalan atau permasalahan yang dialami warga masyarakat dari waktu ke waktu mampu diselesaikan secara cepat, tepat, dan tuntas, karena berlandaskan filosofi yang terkandung dalam ungkapan "*ana rembug dirembug*".

Ketiga, *Kena iwake, aja nganti buthek banyune*, secara harfiah ungkapan ini berarti dapat tertangkap ikannya jangan sampai keruh airnya (*kena*: tertangkap, *iwake* = ikannya, *aja*=jangan, *nganti*=sampai, *buthek*=keruh, *banyune*=airnya). Semen-

tara, secara tersirat pengertian ungkapan tersebut adalah, bahwa persoalan atau permasalahan (yang dikisahkan dengan ikan) diupayakan dapat tertangkap dalam arti mampu diselesaikan tanpa merusak suasana kehidupan bermasyarakat pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut (yang dikisahkan "jangan sampai keruh airnya").

Menurut informan, makna yang terkandung dalam ungkapan lokal ini adalah, bahwa dalam menyelesaikan suatu perkara ataupun permasalahan yang melibatkan banyak warga termasuk yang terlibat dalam konflik sosial, pihak berkompeten perlu mengupayakan penyelesaian secara arif dan bijaksana, sehingga tidak merusak hubungan baik diantara warga masyarakat yang telah dijalin sebelumnya. Pernyataan lain, tindakan penyelesaian persoalan benar-benar diarahkan secara cermat dan memperoleh hasil optimal dengan ditandai mampu mengatasi permasalahan sekaligus tetap mampu memelihara hubungan baik seluruh warga yang terlibat dalam pertikaian. Sumber data tersebut menambahkan, bahwa ungkapan lokal ini secara filosofi sangat tepat untuk melandasi upaya penyelesaian pertikaian yang terjadi diantara warga masyarakat dalam suatu komunitas, baik penyelesaian antarwarga, antar kelompok, maupun penyelesaian antar komunitas secara luas yakni konflik sosial.

Lebih lanjut informan yang lain mengemukakan, secara filosofi ungkapan tersebut memberi pelajaran agar dalam penanganan terjadinya konflik sosial perlu secara hati-hati serta dilakukan secara arif dan bijaksana. Maksudnya, mediator atau penengah senantiasa mengusahakan agar penyelesaian terjadinya konflik sosial tidak berdampak negatif sekecil apapun dan selalu berupaya agar tidak timbul masalah sosial baru yang justru meningkatkan intensitas terjadinya konflik sosial. Berkait dengan penanganan permasalahan sosial ini perlu diterapkan format yang benar-benar arif dan bijaksana, yakni penyelesaian konflik sosial tanpa menyinggung harkat dan martabat kedua belah pihak, tanpa mengusik perasaan masing-

masing pihak, dan tanpa mengakibatkan perasaan rendah diri atau perasaan kalah diantara satu pihak dengan pihak yang lain. Menurut informan, cara penyelesaian permasalahan konflik antar warga seperti inilah yang dikembangkan di desa lokasi kajian, sehingga harmoni sosial diantara warga Dusun Krebet selama ini masih tetap terpelihara secara baik.

Berdasar uraian/pengertian dan makna ungkapan "*kena iwake aja nganti buthek banyune*" sebagaimana dikemukakan informan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa cara mencegah terjadinya konflik sosial antar warga didasari filosofi/sikap dasar leluhur mereka *wani ngalah luhur wekasane* (berani mengalah sejatinya lebih tinggi harkat dan martabatnya). Di samping itu, juga dilandasi filosofi *ngluruk tanpa bala, menang tanpa ngasorake* (menyerang tidak mengerahkan bala tentara, dan menang tidak membuat lawan merasa kalah). Pada intinya adalah, bahwa dalam menyelesaikan terjadinya konflik sosial senantiasa mengutamakan upaya diplomasi untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak yang berkonflik. Upaya penyelesaian masalah seperti inilah yang dikembangkan di Dusun Krebet sebagai lokasi kajian, yakni bersikap arif dan bijaksana dengan semua pihak mengupayakan terciptanya kehidupan harmoni yang oleh warga setempat diistilahkan dengan *urip guyub ayem tentrem* (hidup rukun damai dan tenteram).

Ungkapan ini masih sangat besar pengaruhnya bagi warga masyarakat setempat dalam upaya membangun kedamaian sosial. Pada prinsipnya, setiap anggota masyarakat di Dusun Krebet dituntut untuk mengemban amanat sosial yakni menjaga hubungan baik dengan semua warga, termasuk dengan pihak yang mungkin sedang bermasalah. Ungkapan ini merupakan salah satu modal sosial warga masyarakat yang selanjutnya perlu dilestarikan dan didayagunakan dalam mencegah terjadinya konflik sosial untuk menuju ketahanan sosial masyarakat.

3. **Kesenian Lokal**, beberapa kesenian masyarakat yang menjadi *setting* kajian ini

meliputi jathilan, slawatan, wayang kulit, dan kethoprak. Berikut disajikan uraian secara ringkas keempat jenis kesenian yang masih dilestarikan untuk menggalang rasa kebersamaan dan kerukunan diantara warga masyarakat setempat.

Jathilan adalah salah satu seni tarian rakyat yang sampai saat ini masih eksis di lokasi kajian. Sebagai tarian rakyat, kesenian jathilan dilakukan pemain yang jumlahnya antara 8-10 orang dengan formasi berpasangan. Setiap pemain memegang kuda-kudaan yang terbuat dari bambu (jawa: *kepeng*), sehingga kesenian tersebut oleh warga setempat juga dikenal tarian kuda kepeng. Kuda kepeng pada umumnya dicat dengan warna gelap yang biasanya warna hitam dan dihias sedemikian rupa agar mempunyai sosok seekor kuda. Jathilan dipertunjukkan hanya dengan iringan beberapa instrumen musik gamelan yang relatif sederhana. Pementasan tari *jathilan* ini dipimpin oleh seorang pawang yang tangan kanannya selalu memegang sebatang *pecut* (cambuk). Dalam mengawali tarian cambuk tersebut oleh sang pawang dipukul-pukulkan ke tanah ataupun ke udara dengan suara melengking bertubi-tubi untuk memberi aba bagi pemain dan penabuh gamelan. Pada saat tarian telah mencapai klimaks, cambuk tersebut disarangkan ke badan pemain jathilan yang diyakini kerasukan roh halus dan oleh warga setempat disebut dengan istilah *ndadi* (*entranced*). Sebagai tarian rakyat tontonan masyarakat setempat, kesenian jathilan juga memunculkan tokoh Pentul dan Bejer (*Tembem*), yang selalu melantunkan berbagai tembang Jawa dengan selingan berbagai *lelucon* (lawakan/humor) yang bertujuan menghibur seluruh penonton.

Slawatan merupakan kesenian yang juga masih berkembang di lokasi kajian dengan penduduk secara mayoritas memeluk agama Islam. Secara etimologi *Slawatan* berasal dari kata Salawatan (Salawat Nabi), sehingga diperkirakan kesenian tersebut muncul bersamaan agama Islam masuk dan meresap pada kalangan masyarakat Jawa

setempat. Slawatan merupakan tarian rakyat yang dipertunjukkan oleh sejumlah pemain dengan melantunkan paduan suara yang diiringi instrumen musik beberapa *terbang* (gendang kecil) dan *jidar* (gendang besar). Para peraga yang biasanya pria dalam menari umumnya berposisi duduk meskipun ada kalanya dalam posisi berdiri. Mengenai gerakan tarian lebih dipusatkan pada lengan dan tangan serta liukan kepala yang merupakan sentuhan spiritual keagamaan (Islam) dan kadangkala juga dibarengi gerak ataupun liukan badan. Sementara paduan suara pada umumnya berisi pujian yang mengagungkan Nama Allah SWT dan Rasul SAW.

Wayang kulit sebagai bagian kesenian masyarakat Jawa juga masih dilestarikan oleh warga di lokasi kajian. Pergelaran wayang kulit dilakukan oleh seorang dalang dengan diiringi gamelan Jawa oleh sekelompok penabuh disebut *pradongga* atau *wiyaga* dan lantunan tembang-tembang Jawa oleh beberapa pesinden (penyanyi Jawa). Cerita yang dibawakan dalam pementasan wayang kulit biasanya mengacu Kitab Mahabarata karya Empu Wiyasa dan Kitab Ramayana karya Empu Walmiki, keduanya merupakan pujangga ternama Negeri India. Pementasan wayang kulit biasanya berdurasi antara 7-8 jam mulai saat setelah ibadah Sholat Isya' hingga menjelang Subuh, yang oleh warga setempat disebut pergelaran *sedalu natas* (semalam suntuk). Mengenai tema cerita berkisar pada perjuangan melawan keburukan/kejahatan, yang benar mengalahkan yang salah, dan yang hak mengalahkan yang batil. Oleh karena itu, pergelaran kesenian wayang kulit selain sebagai tontonan yang menghibur warga, juga sebagai tuntunan dan tatanan yang memandu pandangan, sikap, dan tindakan masyarakat sesuai norma yang mereka jalani.

Kethoprak merupakan seni pertunjukan dramatari menggunakan alur cerita yang pementasannya juga diiringi tabuhan seperangkat gamelan Jawa oleh *pradongga* (*wiyogo*) dan lantunan tembang-tembang Jawa

oleh pesinden. Tema yang dibawakan dapat mengambil cerita fiktif karya seorang pujangga, cerita bersifat legenda masyarakat setempat, dan cerita kepahlawanan yang mampu mendorong tergugahnya semangat patriotisme dan jiwa nasionalisme. Mengenai tema legenda masyarakat misalnya cerita Sri Tanjung yang menggambarkan asal mula terjadinya Kota Banyuwangi atau cerita Roro Jonggrang yang menggambarkan proses terjadinya Candi Prambanan dalam waktu semalam. Sementara pementasan *kethoprak* yang bertema kepahlawanan misalnya cerita atau sejarah penyerangan Batavia oleh Raja Sultan Agung dan perlawanan Pangeran Diponegoro ataupun Trunajaya atas kesewenang-wenangan penjajah Belanda.

Dari wawancara peneliti dengan informan yang didukung hasil pengamatan menunjukkan, bahwa keempat jenis kesenian sering dipentaskan di lokasi kajian. Pementasan dilakukan baik dalam acara hajatan perseorangan maupun acara gelar seni budaya yang diselenggarakan secara kolektif diprakarsai pemerintah dusun bersama warga masyarakat, dalam rangka membina rasa kebersamaan, kerukunan, dan kegotongroyongan diantara warga dusun tersebut. Pada saat penyelenggaraan *merti dusun* yang dilaksanakan setahun sekali di pedesaan tersebut, sebagai rangkaian seluruh kegiatan keempat jenis kesenian tersebut selalu dipentaskan. Biasanya setelah penyelenggaraan *merti dusun* secara resmi dibuka oleh Kepala Dusun, selanjutnya untuk mengawali seluruh rangkaian acara *merti dusun* dipentaskan kesenian tarian *jathilan* selama setengah hari pertama. Kemudian dalam pertengahan waktu penyelenggaraan tradisi tersebut dilaksanakan acara pengajian mujahadah, yang oleh warga setempat disebut dengan istilah "*umbul dongo basuki*" dan biasanya dilaksanakan pada malam hari. Tujuannya adalah memohon keselamatan kepada Tuhan YME dan tasakuran atas keberhasilan warga dalam segala aspek kehidupan. Dalam mengawali acara "*Umbul Donga Basuki*" selalu dipentaskan beberapa

kesenian yang bernuansa agama Islam termasuk seni *Slawatan*. Pada malam terakhir penyelenggaraan *meriti dusun* sesuai waktu yang telah ditentukan, warga masyarakat Dusun Krebet selalu mementaskan wayang kulit dan kethoprak secara bergantian dari tahun ketahun. Maksudnya jika tahun ini acara *meriti dusun* ditutup dengan pagelaran wayang kulit, maka tahun berikutnya penyelenggaraan tradisi tersebut diakhiri dengan pementasan seni kethoprak.

Lebih lanjut informan menjelaskan, bahwa dengan melestarikan budaya lokal berbentuk pementasan kesenian tersebut, secara sosial warga masyarakat setempat memetik banyak manfaat. Pertama adalah lestariannya nilai kerukunan, kebersamaan, dan kegotongroyongan dalam masyarakat setempat. Menurut informan, untuk pementasan sejumlah kesenian tersebut seluruh warga yang diwakili kepala keluarga telah melakukan *rembug desa* yang menghasilkan beberapa kesepakatan seperti menetapkan jumlah dana iuran setiap keluarga, waktu/hari pelaksanaan, yang tidak kalah penting adalah pembagian peran dan tugas pekerjaan yang harus diselesaikan. Sewaktu pelaksanaan tugas dan penyelesaian pekerjaan secara otomatis setiap warga masyarakat telah mengamalkan nilai-nilai kegotongroyongan. Dalam praktiknya, penyelesaian setiap pekerjaan oleh warga dilaksanakan dengan cara bekerjasama, saling membantu, dan saling menolong dengan prinsip "*abot entheng disangga bareng*" (ringan sama dijinjing, berat sama dipikul).

Manfaat lain adalah diperolehnya nilai-nilai pendidikan dan pembelajaran yang terkandung dalam alur cerita pementasan kesenian. Sebagai contoh misalnya dari pementasan kethoprak dan wayang kulit akan memperoleh pelajaran bahwa yang benar mengalahkan yang batil, persengketaan antara Kurawa dan Pandawa yang tidak terkendali dapat menyebabkan terjadinya peperangan yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban. Cerita kethoprak terutama yang bertema kepahlawanan, misalnya warga masyarakat dapat memperoleh pel-

ajaran tentang pentingnya rasa persatuan, kebulatan tekad, dan kekompakan dalam bertindak. Sementara dari kesenian *Slawatan* warga masyarakat dapat memetik hikmah mengenai pentingnya nilai-nilai yang bersifat religius yang diharapkan mampu memperkuat dan mempertebal keimanan setiap warga pendukungnya.

Atas dasar uraian tentang kesenian yang masih berkembang di lokasi kajian, dapat ditegaskan, bahwa warga masyarakat setempat masih berusaha mempertahankan dengan melestarikan budaya dalam bentuk kesenian. Sejumlah kesenian lokal dan tradisional tersebut oleh warga setempat dipandang sebagai sumberdaya sosial yang ternyata masih didayagunakan untuk memelihara ketahanan sosial masyarakat setempat. Terpeliharanya ketahanan sosial masyarakat (*Tansosmas*) di pedesaan lokasi kajian tersebut secara otomatis membuat warga masyarakat setempat senantiasa terhindar dari terjadinya bencana konflik sosial.

Berdasar hasil kajian mengenai budaya lokal masyarakat untuk mencegah timbulnya konflik sosial di atas dapat ditegaskan, bahwa masyarakat lokasi kajian telah memanfaatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial khususnya sumberdaya sosial dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial. Sebagaimana diketahui, bahwa pembangunan kesejahteraan sosial dapat diwujudkan hanya dengan usaha kesejahteraan sosial, yang salah satu fungsinya adalah pencegahan yakni mencakup kegiatan mencegah timbul, meluas, dan kambuhnya permasalahan kesejahteraan sosial dalam kehidupan perorangan, keluarga, kelompok, dan komunitas masyarakat. Diantara permasalahan kesejahteraan sosial tersebut tentunya termasuk terjadinya bencana konflik sosial. Pelestarian dan pengamalan nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan keseharian, berarti masyarakat telah ikutserta dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial menuju masyarakat yang berkesejahteraan sosial.

E. Penutup

Lestariannya budaya lokal di pedesaan lokasi kajian yang diekspresikan dalam tradisi, ungkapan, seni, dan norma yang masih dilakukan oleh masyarakat dapat disimpulkan, bahwa bentuk, makna, dan nilai yang terkandung di dalam budaya lokal merupakan panduan penuntun kehidupan sosial masyarakat pendukungnya. Melalui pelestarian tradisi, ungkapan, kesenian, dan norma warisan leluhur warga setempat dapat mengembangkan rasa kekeluargaan, kebersamaan, kerukunan, kegotongroyongan, serta sikap saling membantu dan menolong, sehingga mampu menciptakan kedamaian sosial yang ditandai keharmonisan hubungan diantara warga masyarakat. Dengan demikian, pelestarian dan pendayagunaan budaya lokal yang dilakukan warga masyarakat lokasi kajian merupakan “perisai pamungkas” guna mencegah timbulnya berbagai permasalahan sosial yang mengancam termasuk peredam terjadinya konflik diantara warga masyarakat.

Pada saat ini di beberapa daerah kenyataannya masih sering terjadi bentrok (konflik) antar warga, sehingga mengancam kerukunan masyarakat bahkan merongrong persatuan dan keutuhan bangsa. Oleh karena itu, nilai budaya yang sarat etika dengan mengedepankan kearifan lokal perlu digali, dilestarikan, dan didayagunakan. Meskipun pada satu sisi patut disadari, bahwa keberadaan budaya lokal tersebut dari waktu ke waktu terus tergerus oleh gelombang modernisasi. Akan tetapi warga pedesaan yang menjadi *setting* kajian ternyata masih berusaha melestarikan dan mendayagunakan budaya lokal sebagai acuan dalam hidup bermasyarakat, khususnya sebagai perekat bagi keutuhan komunitas dalam lingkungan pedesaan setempat. Keanekaragaman budaya lokal yang termanifestasikan dalam berbagai tradisi, ungkapan, seni, dan norma terbukti berperan dalam menciptakan rasa kekeluargaan, kerukunan, kebersamaan, dan keselarasan hubungan sosial diantara warga masyarakat, dan sekaligus meredam ataupun mencegah terjadinya konflik sosial.

Di era perubahan paradigma pelaksanaan pembangunan yang bertumpu otonomi daerah, maka perlu memberi kesempatan kepada se-

tiap daerah untuk menumbuhkan budaya lokal tidak terkecuali budaya Jawa sebagai salah satu dimensi kearifan lokal untuk didayagunakan menjadi panduan hidup warga masyarakat dalam menanggulangi berbagai permasalahan sosial, termasuk mencegah, meredam ataupun mengatasi konflik sosial. Nilai budaya lokal dapat digunakan sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan ketahanan sosial masyarakat (Tansosmas). Di samping itu, pelestarian, pengembangan, dan pendayagunaan nilai budaya lokal (tradisi, ungkapan, kesenian, dan norma) juga memperkuat terbentuknya jatidiri serta mendorong terciptanya kemandirian masyarakat. Dengan demikian, nilai yang terkandung dalam budaya lokal merupakan ciri khas dan jatidiri warga masyarakat. Akhirnya direkomendasikan, agar kehidupan suatu komunitas masyarakat mengacu pada budaya lokal (tradisi, ungkapan, seni, dan norma), dengan menekankan pada nilai kekerabatan serta mengutamakan sikap kekeluargaan, kerukunan, kebersamaan, dan kegotongroyongan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera serta terhindar dari kondisi konflik sosial.

Pustaka Acuan

- Atik Triratnawati, dkk. 2012. *Revitalisasi Kesenian Sintren di Kota/Kabupaten Pekalongan*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya UGM dan Balai Pelestarian Nilai Budaya.
- Catherine Dawson. 2010. *Metode Penelitian Praktis Sebuah Panduan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Christriyati Ariani. 2006. *Mengembangkan Budaya Lokal dalam Meredam Konflik Sosial*. Yogyakarta: Makalah Seminar Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Deddy Mulyana, dkk. 2001. *Komunikasi Antarbudaya. Panduan Berkomunikasi dengan Orang-orang Berbeda Budaya*. Bandung: Remaja Rusdakarya.
- Istiana Hermawati, dkk. 2012. *Faktor-faktor Diterminan Penyebab Konflik Sosial di Kota Makassar*. B2P3KS Press.

Setya Sumarna, dkk. 2013. *Evaluasi Program Keserasian Sosial dalam Penanganan Konflik*. Makalah disajikan dalam Seminar Hasil Penelitian Badiklit Kesos 2013.

Sunit Agus Tri Cahyono. 2012. *Menelisik Akar Konflik Sosial di Kota Makassar, Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: B2P3KS Press.

Sutrisno. 2003. *Konflik Sosial Studi Kasus Indonesia*. Yogyakarta: Tajidu Press

Taufik Tuhana. 2000. *Konflik Maluku*. Yogyakarta: Gama Global Media.

Warto. 2008. *Menguak Kesalahan Sosial dalam Penanggulangan Korban Gempa di Bantul*. Yogyakarta: B2P3KS Press.

Adam dan Jesica. 2000. *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.

www.google.co.id. diunduh tanggal 11 Maret 2012.

Faktor yang Mempengaruhi Keterbatasan Perempuan dalam Mengakses Teknologi Komunikasi dan Informasi

The Influenced Factors on Women Limitation Access in Communication and Information Technology

F. Anita Herawati, dkk.

F. Anita Herawati, Dhyah Ayu Retno Widyastuti, Th. Diyah Wulandari, Yonathan Dri Handarkho, Prodi Ilmu Komunikasi FISIP, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Jl Babarsari No 6 Yogyakarta. E-mail: <anita_hera@yahoo.com>. Diterima 26 September, direvisi 8 Oktober 2013, disetujui 16 Oktober 2013.

Abstract

Growing information based on internet technology is an opportunity for people to do easy activity, although not all of the people can get access to it. In fact, there is a limit internet access for women. It has been reflected among Indonesian and such a developed country like US, most of the internet users are male. In terms of Yogyakarta Special Territory internet user phenomena, only five percent women can access internet among 52 percent total users. The internet user gap among male and female in Yogyakarta are amplified by many reasons. This article focused on the Influences factors of internet access limitation and communication technology's tools ability among female, the internet use based on gender perspective. Social presence theory is used to crack the research question. The research approach used is qualitative, by focus group discussion to observe the information among target. It is hoped that the research has significant contribution for people to empower women community.

Keywords:

Women-Communication Information Technology-Access-Social Presence Theory

Abstrak

Teknologi komunikasi dan informasi berbasis internet yang terus berkembang merupakan suatu peluang bagi masyarakat untuk mengerjakan aktivitas dengan mudah. Realitasnya tidak semua masyarakat mampu mengimbangi perkembangan yang makin pesat ini. Dilihat berdasarkan jenis kelamin, perempuan cenderung memiliki keterbatasan dalam mengakses internet. Realitas ini secara umum tercermin pada penggunaan internet di kalangan masyarakat Indonesia bahkan di negara maju seperti Amerika Serikat, pengguna internet masih didominasi oleh laki-laki. Secara khusus di wilayah Yogyakarta, dari 52 persen penduduk yang memiliki komputer dan juga internet, hanya lima persen perempuan yang bisa menggunakan fasilitas ini. Ketimpangan dalam mengakses media informasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab. Kajian ini fokus pada: Faktor yang memengaruhi keterbatasan perempuan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan perspektif gender. Teori yang digunakan dalam kajian ini adalah teori *Social Presence Theory* yang mengarah pada interaksi dan partisipasi kaum perempuan melalui media komputer dan internet. Melalui pendekatan penelitian kualitatif dengan *focus group discussion*, penulis menggali informasi guna menjawab persoalan penelitian. Diharapkan, kajian ini mampu memberi kontribusi bagi masyarakat dalam memberdayakan komunitas perempuan.

Kata Kunci:

Perempuan-Teknologi Komunikasi dan Informasi-Akses-Social Present Theory

A. Pendahuluan

Isu kesetaraan gender selama bertahun-tahun menjadi inspirasi banyak elemen masyarakat untuk mengupayakan aksi dan strategi pemberdayaan perempuan di segala bidang dengan tujuan kesejahteraan. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam artikel UN Millenium Project (2005) menyebutkan bahwa penting untuk membahas kesejahteraan perempuan dan

pembangunan lingkungannya, salah satunya melalui pendidikan dan pelatihan. Harapannya, perempuan memiliki kesamaan posisi dengan laki-laki di bidang ekonomi, memanfaatkan aset produksi, dan terbebas dari tekanan, kekerasan, serta penindasan.

Sementara itu di era yang serba digital, pemakaian internet masih terkena imbas isu bias gender. Penelitian di Amerika Serikat menyebut-

kan, jumlah pengguna internet di negara tersebut masih didominasi laki-laki (Fallows, 2009: 6). Demikian juga di Indonesia. Data indikator telematika (2005) menyebutkan pengakses internet di Indonesia masih didominasi laki-laki (75,86 persen), dan perempuan (24,14 persen). Ini menunjukkan bukti bahwa internet masih dianggap sebagai komoditas kaum laki-laki dan kecenderungan bersifat maskulin. Hal ini diperkuat dengan pendapat Enochsson (2010) yang mengatakan bahwa alasan dominasi laki-laki terhadap piranti komputer dan internet karena laki-laki lebih tertarik dengan teknologi internet jika dibandingkan dengan perempuan.

Realitas di Indonesia, internet merupakan bentuk media komunikasi yang relatif baru dan terus berkembang selama beberapa dekade terakhir. Data World Bank menyebutkan sepanjang 2000-2009, jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat dari hanya 2 juta pengguna menjadi mencapai lebih dari 30 juta pengguna, atau meningkat 1400 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lebih dari 87 persen penduduk Indonesia dari total penduduk mencapai lebih dari 240 juta jiwa mengakses internet (www.data.worldbank.org).

Namun dari keseluruhan jumlah pengguna tersebut, hanya sedikit yang memanfaatkan untuk kepentingan peningkatan ekonomi. Sebagai contoh realitas yaitu komunitas Kampung Cyber di RT 36 RW 09, Kelurahan Patehan, Kecamatan Kraton, Yogyakarta¹. Bisnis kreatif warga Kampung Cyber juga turut terangkat berkat adanya jaringan internet tersebut. Keterbatasan akses informasi, keterbatasan sumber daya masih menjadi persoalan dalam komunitas tersebut.

Hasil penelitian Perbawaningsih, Wulandari dan Arifin (2012) menunjukkan tingkat penggunaan internet di Kampung Cyber cenderung banyak dimanfaatkan oleh kaum laki-laki, di mana sebagian dari mereka sudah memanfaatkan jaringan internet untuk kegiatan perekonomian. Sebaliknya, kaum perempuan belum memanfaatkan sarana tersebut untuk peningkatan kegiatan perekonomian karena adanya keterbatasan dalam akses informasi penggunaan internet dan pemanfaatannya.

Beberapa contoh pemanfaatan internet untuk kegiatan perekonomian oleh warga laki-laki Kampung Cyber antara lain pemanfaatan website untuk mempromosikan produk dari Oemah Pancing, usaha batik, sablon, dan usaha-usaha lain. Sementara itu kaum perempuan hanya berperan sebagai pendukung, bukan inisiator.

Sejatinya internet dapat dimanfaatkan sebagai piranti penunjang pembedayaan perekonomian perempuan. Rhodes (2008) dalam jurnalnya menjadi bukti pemanfaatan jaringan internet untuk meningkatkan kegiatan pemberdayaan perempuan, khususnya di bidang ekonomi. Dalam penelitiannya Rhodes mengatakan *Rural Women's Association* (RWA) pada wilayah daerah Sekhuhkuneland-Afrika Selatan mampu memberdayakan potensi perempuan serta meningkatkan perekonomian dari anggota-anggotanya dengan membantu memperluas usaha pemasaran dari berbagai usaha kecil yang dikelola oleh mereka melalui pemanfaatan ICT (*Information, Communication & Technology*). Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keterbatasan perempuan dalam mengakses teknologi komunikasi dan informasi.

B. Kajian Teori

Penelitian ini merupakan suatu tindak lanjut dari penelitian yang sudah dilakukan pada tahun 2011/2012 tentang "*Pergeseran Pola Komunikasi Antarpersonal Warga Kampung Pasca Pemasangan Internet: Studi Pemberdayaan Warga Kampung Cyber RT 36 Tamansari Yogyakarta*". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan internet di Kampung Cyber belum maksimal. Keberadaannya belum bisa dirasakan secara merata oleh masyarakat. Selain sebagai media informasi, internet sudah dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan produksi misalnya pemasaran produk namun implementasinya masih dalam jumlah yang terbatas. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dirasa perlu untuk menggali lebih dalam faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keterbatasan perempuan dalam mengakses teknologi komunikasi dan informasi.

¹) Selanjutnya disebut Kampung Cyber.

Secara khusus kajian ini mengedepankan teori kehadiran sosial (*Social Presence Theory*) yang menjadi cikal bakal kemunculan *Communication Mediated Computer Theory* (CMC Theory), di mana teori ini memaparkan temuan adanya interaksi bersama dengan orang lain dalam ruang seperti berbagi emosi atau pikiran antara mereka yang saling berinteraksi melalui komunikasi yang termediasi. Teori kehadiran sosial mempertimbangkan cara-cara kesuksesan media membawa makna partisipan-partisipannya seperti hadir secara fisik; meski komunikasi tatap muka digunakan sebagai standar untuk penilaian (Rice, 1993; 1987). Konsep mediasi dalam berinteraksi bersama inilah yang diwujudkan dalam kegiatan penelitian ini, di mana kaum perempuan dapat saling berinteraksi dengan mediasi piranti komputer dan internet dan pentingnya partisipasi meski dalam media komputer.

1. *Community Literacy*

Secara teori, *community literacy* (komunitas literasi) adalah program keaksaraan berbasis masyarakat yang umumnya disponsori luar lembaga formal atau tradisional belajar (perguruan tinggi, sekolah, universitas) bentuk pembelajaran. *Community literacy* yang dikenal sejak 15 tahun yang lalu awalnya dipandang sebagai sebuah eksklusivitas dari *culture literacy* namun kemudian muncul perubahan analisis oleh Jeffrey Grabill (2010) yang mengatakan bahwa *community literacy* merupakan dorongan bagi orang maupun komunitas untuk mencari dan mendapatkan profesi yang lebih luas di ranah publik. Meski demikian dalam prakteknya literasi masyarakat lebih pada memperluas jaringan, terdiri dari perpaduan antara kemahiran budaya dan kritis sebagai aktivitas retorik baru yang terdiri dari aktivitas yang meliputi seperangkat tujuan, praktik, sumber daya, dan hubungan yang unik. Artinya pada konsep awal, literasi berbasis masyarakat merupakan sebuah pencarian wacana alternatif, cara bagi orang untuk mengakui berbagai bentuk masing-masing keahlian melalui seni bicara dan teks untuk menarik perbedaan mereka sebagai sumber

daya untuk mengatasi masalah bersama (Peck, Bunga, Higgins, 2009: 205).

Era selanjutnya, *community literacy* mengacu pada seluruh praktik melek huruf yang melibatkan keluarga dan sosial untuk pengorganisasian tindakan masyarakat dalam: Menggunakan tulisan untuk mendukung penyelidikan kolaboratif mengenai masalah masyarakat; Memanggil publik lokal di sekitar sasaran penelitian menggunakan prosedur yang demokratis; Mengubah pengetahuan pribadi melalui dialog/musyawarah terbuka antara individu dan kelompok lintas perbedaan.

Pemanfaatan teknologi komunikasi berbasis internet atau dalam bahasa asing dikenal sebagai *information, communication, and technology* (ICT) telah menjadi bagian penting dan vital dari perkembangan sebuah negara. Oleh karena itu seluruh elemen masyarakat di belahan dunia manapun banyak melakukan upaya untuk melakukan pengembangan komunitas berbasis inklusivitas terhadap dunia digital. Demikian juga di negara berkembang. Media konvensional yang sebelumnya digunakan, kini beralih pada media digital yang dikenal dengan *digital literacy*.

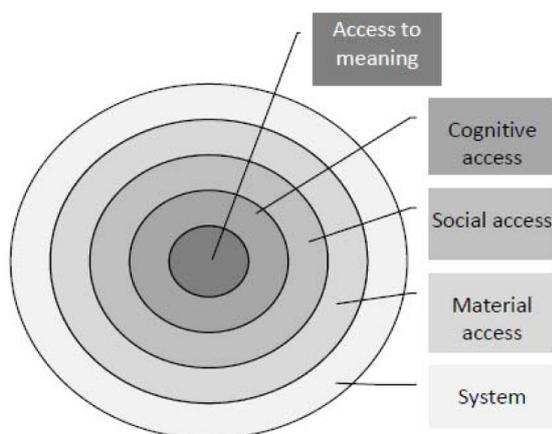
2. *Digital Literacy*

Digital Literacy menyediakan dasar-dasar untuk memahami pentingnya informasi, yang secara sadar akan meningkatkan pemahaman seseorang terhadap sumber dan saluran informasi secara digitalisasi. Hal ini dikaitkan dengan kebutuhan publik terhadap kemampuan untuk memahami dan melakukan evaluasi integrasi informasi dalam berbagai bentuk dan format yang ditawarkan oleh dunia digital. Agar teknologi dapat efektif digunakan dalam pemberdayaan masyarakat, ada tiga aspek utama yang perlu diperhatikan.

Pertama, akses yang bermakna. Akses internet saat ini sangat dibutuhkan masyarakat. Bila seseorang memiliki intensitas untuk mengakses internet, faktor yang perlu diperhatikan bukan saja hanya dari segi infrastruktur, tetapi juga dari segi tingkat literasi atau kemampuan menggunakan tek-

nologi dan kompetensi kognitif. Oleh karena itu untuk meningkatkan kehidupan sosial melalui pemanfaatan teknologi, publik harus menyadari makna dari penggunaan ICT dari sudut pandang kapasitas masyarakat untuk menggunakan teknologi tersebut.

Model pada Gambar 1 di bawah ini dapat menjelaskan karakteristik yang memengaruhi keputusan seseorang untuk menggunakan atau tidak menggunakan internet.



Gambar 1.
Linear acces to meaning-Bucy,
E.P. Newhagen (2004)

Kedua, motivasi. Tidak hanya bagaimana publik menggunakan teknologi tersebut, namun sampai pada usaha mereka untuk menggunakan teknologi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. *Ketiga*, daya dukung sosial. Merupakan daya dukung sosial yang mampu membuat seseorang merasa percaya diri untuk menggunakan teknologi secara aktif dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan dan perekonomian. Individu yang lebih banyak terekspos teknologi dalam lingkungannya, dialah yang lebih mampu untuk mengadopsi teknologi dalam pengembangan kehidupannya.

3. Perempuan dan Teknologi

Gender tidak hanya dipahami sebagai satu kategori sosial dan alat analisis untuk melihat perempuan dalam relasinya dengan laki-laki dalam masyarakat. Dalam penger-

tian abstrak, gender dipahami dengan arti "ideologi" untuk menerangkan realitas sosial yang menempatkan perempuan dan laki-laki dalam peran dan posisi yang berbeda.

Dalam kehidupan riil, "ideologi" gender mempengaruhi tingkah laku dan pilihan-pilihan perempuan dan laki-laki yang menentukan hubungan sosial-ekonomi di antara mereka dalam masyarakat (termasuk dalam keluarga dan dunia kerja). Perempuan mensosialisasikan diri sebagai kelompok dengan ciri (*stereotype*) yang subordinat atau mensubordinatkan diri. "Ideologi" gender mempengaruhi proses identifikasi pekerjaan-pekerjaan publik sesuai dengan sifat perempuan yang lebih feminin dan keterlibatannya sesuai dengan ukuran-ukuran atau nilai yang dikenakan pada perempuan sebagai jenis kelamin yang disubordinatkan. Dalam dunia kerja, perempuan banyak terlibat dalam pekerjaan yang dekat dengan "naluri perempuan" misalnya sebagai orang yang bekerja di wilayah domestik sedangkan laki-laki lebih diposisikan pada area publik.

Pemakaian piranti digital juga masih terkena imbas isu bias gender. Penelitian di Amerika Serikat menyebutkan, jumlah pengguna internet di negara tersebut masih didominasi laki-laki. Laki-laki lebih tertarik mengakses internet dibanding perempuan. Jika ada perempuan mengakses internet, kebutuhannya hanya sebatas untuk kegiatan kekeluargaan, pertemanan, dan sosial. Sementara laki-laki, cenderung memanfaatkan internet untuk kegiatan yang lebih kompleks, misalnya untuk informasi pekerjaan, rekreasi, dan bisnis (Fallows, 2009: 6). Angka ini ternyata berbanding lurus dengan fakta pengguna internet di Indonesia. Data indikator telematika melalui situs www.iptek.net pada 2011 menyebutkan bahwa pengakses internet di Indonesia masih didominasi laki-laki (75,86 persen), sedangkan sisanya adalah perempuan (24,14 persen). Hal ini menunjukkan bukti kuat bahwa internet masih dianggap sebagai komoditas kaum laki-laki dan kecenderungan sifatnya maskulin. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam realitas

teknologi pekerjaan perempuan cenderung jauh dari wilayah teknologi atau hanya dalam kapasitas yang terbatas.

Sebagaimana diakui oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan, teknologi masih sangat dekat dengan identitas laki-laki sedangkan perempuan sering kali hanya sebagai obyek. Padahal kuantitas jumlah perempuan hampir separuh dari penduduk Indonesia yang merupakan potensi jika diberdayakan dengan baik. Maguire (2001) melaporkan hasil studi yang dilakukan oleh *Academy for Educational Development*, bahwa berdasarkan data sekitar 30 negara terlihat bahwa pengguna internet di negara-negara berkembang kurang dari 1 persen dari total populasi sedangkan perempuan pengguna internet hanya 22 persen di Asia, 38 persen di Amerika Latin, 6 persen di Timur Tengah, dan hanya sedikit di Afrika.

Berbagai kendala yang dihadapi kaum perempuan dalam mengakses teknologi informasi diantaranya adalah tingkat keterampilan dan pendidikan yang rendah, masalah bahasa, keterbatasan waktu, masalah biaya akses internet, keterbatasan lokasi fasilitas koneksi, norma budaya dan sosial, serta keterampilan manajemen dan komputer yang tidak memadai. Tentunya menjadi tantangan yang sangat menarik tentang bagaimana keterbatasan yang dimiliki perempuan dijumpai dalam memanfaatkan teknologi internet.

4. Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam *Community Literacy*

Sejatinya internet dapat dimanfaatkan sebagai piranti penunjang pemberdayaan perekonomian perempuan. Rhodes (2008) dalam jurnalnya yang berjudul *Can E-Commerce Enable Marketing in an African Rural Women's Community Based Development Organisation?* menjadi bukti pemanfaatan jaringan internet untuk meningkatkan kegiatan pemberdayaan perempuan, khususnya di bidang ekonomi. Usaha sebuah lembaga swadaya *Rural Women's Association* (RWA) pada wilayah daerah Sekhukuneland-Afrika Selatan mampu memberdayakan

potensi perempuan serta meningkatkan perekonomian dari anggota-anggotanya dengan membantu memperluas usaha pemasaran dari berbagai usaha kecil yang di kelola oleh mereka melalui pemanfaatan ICT (*Information, Communication & Technology*). RWA mencoba membantu dengan menyediakan berbagai fasilitas dan infrastruktur yang terkait dengan ICT seperti komputer, telpon, fax, akses internet, serta pelatihan yang terkait penggunaan teknologi tersebut. Diharapkan melalui fasilitas tersebut para wanita di wilayah Sekhukuneland dapat memperoleh akses informasi yang lebih luas, terutama terkait strategi marketing yang bertujuan untuk mengembangkan usaha kecil yang sudah dirintis. RWA juga membangun sebuah model *E-Commerce* yang dapat membantu memasarkan produk-produk yang di miliki oleh kaum perempuan di wilayah tersebut.

Demikian juga di Malaysia, pemanfaatan teknologi komunikasi berbasis internet (ICT) tidak hanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan skala besar, namun turut diadopsi oleh para pelaku UKM (Rosnafisah, 2012). Pemanfaatan ICT terbukti mampu memberi perubahan yang signifikan dalam kinerja usaha, budaya, strategi bisnis, dan peningkatan produktivitas para pelaku bisnis UKM. Oleh karena itu model-model semacam ini tentunya dapat juga diadopsi untuk kegiatan-kegiatan perekonomian berbasis ICT di Yogyakarta yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan pemberdayaan kaum perempuan sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan.

C. Penggunaan Metode Penelitian

Untuk dapat menggali informasi tentang apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keterbatasan perempuan dalam mengakses teknologi komunikasi dan informasi dilakukan dengan melakukan *Focus Group Discussion* (FGD). Pelaksanaan FGD disesuaikan dengan pertemuan rutin yang diselenggarakan oleh ibu-ibu warga Kampung *Cyber* yaitu dalam arisan bulanan. Jumlah peserta FGD sebanyak 21 orang.

Lokasi penelitian ini adalah Kampung Cyber di RT 36 RW 09, Kelurahan Patehan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta. Pemilihan tempat ini karena pertimbangan; Kampung Cyber RT36 telah mempelopori pengadaan sambungan internet secara kolektif sejak tahun 2008 secara swadaya dan merupakan yang pertama kali di DIY; Warga Kampung Cyber RT36 telah memiliki gerakan pemanfaatan teknologi internet untuk mengembangkan perekonomian masyarakat; Karakter masyarakat Kampung Cyber RT36 yang memiliki etnografis hampir sama dengan kawasan-kawasan kantong kemiskinan di Yogyakarta; Kampung Cyber menjadi rujukan referensi beberapa komunitas lain yang ingin membuat model serupa. Data dianalisis secara kualitatif dengan menitikberatkan pada faktor perempuan di lokasi penelitian, Kelurahan Kraton, Kecamatan Patehan, Kota Yogyakarta, DIY.

D. Akses Perempuan di Kampung Cyber Yogyakarta

Melalui kegiatan FGD, peneliti sekaligus dapat memperoleh data tentang peta persebaran internet. Berdasarkan hasil FGD tersebut terungkap bahwa kepemilikan atas komputer/laptop sebagai perangkat keras untuk bisa mengakses internet beserta kepemilikan akses internet. Berdasar data yang diperoleh dapat diidentifikasi dari 21 warga di Kampung Cyber yang mengikuti FGD terdapat 61 persen memiliki komputer atau laptop dan 42 persen sudah tersambung dengan internet.

Selain informasi tentang kepemilikan komputer/laptop dan internet, dari hasil FGD dapat ditemukan hal-hal berikut. Perempuan (ibu-ibu) di Kampung Cyber tidak memiliki cukup waktu untuk belajar komputer. Hal ini disebabkan oleh aktivitas rutin mereka sebagai ibu rumah tangga ataupun karena kesibukan beberapa ibu yang lebih banyak mengelola usaha.

Kecenderungan yang terjadi dalam rumah tangga para ibu tersebut, komputer lebih banyak digunakan oleh anak-anak mereka untuk mengerjakan tugas sekolah ataupun untuk bermain *games*. Beberapa ungkapan dari para ibu seperti, "*Mboke ngalah* (Ibunya mengalah) atau *wong tuwa rasah* (*sinau komputer*), *men-*

ding masak trus ngumbahi (orang tua tidak perlu belajar komputer, lebih baik memasak dan mencuci)". Selain itu akses komputer juga lebih banyak digunakan oleh para suami, dan kaum ibu tidak banyak yang berkesempatan untuk mengakses komputer.

Beberapa ibu juga menyatakan enggan belajar komputer sendiri karena merasa lebih mudah berkomunikasi dengan menggunakan *handphone* daripada menggunakan komunikasi berbasis komputer. Hal ini berhubungan dengan kesan sebagian warga yang mengidentikkan komputer dengan akses Facebook, *email*, atau *chatting* untuk berkomunikasi dengan orang lain.

Beberapa ibu belum mengetahui nilai lebih dari penggunaan komputer, sehingga dominasi aktivitas penggunaan komputer diserahkan kepada anak atau suami. Para ibu juga merasa bersalah jika menggunakan waktunya untuk menggunakan internet, karena dirasa mengabaikan tugas rutin sebagai ibu rumah tangga. Para ibu di Kampung Cyber ini tinggal dengan lokasi yang masih masuk dalam Beteng Kraton Kasultanan Yogyakarta, di mana pengaruh budaya Jawa sangat kuat. Dalam pandangan masyarakat di Kampung Cyber, perempuan yang menggunakan waktunya untuk mengakses internet, masih dianggap *saru* (tabu), karena dianggap mengabaikan kewajiban untuk melakukan tugas sebagai ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci, mengurus anak dan suami, dan lain-lain.

Sementara itu dari sisi kemampuan, perempuan Kampung Cyber dalam mengoperasikan komputer memiliki kemampuan bervariasi. Ini digambarkan dari beberapa ungkapan seperti *Ndemok wae, urung dong* (Hanya memegang saja, belum mengerti cara mengoperasikan komputer), atau *Mbukak password durung isa* (Membuka *password* belum bisa). Meskipun demikian, ada beberapa orang ibu yang sudah biasa menggunakan internet untuk akses Facebook dan email. Beberapa ibu dari generasi yang lebih muda, bahkan sudah menggunakan Facebook sebagai media untuk memasarkan produk usahanya.

Ketika pada ibu ditawarkan untuk diberi pelatihan tentang internet dan komputer, mereka

memilih waktu pelatihan disesuaikan dengan kesibukan warga. Beberapa alasan yang diungkapkan para ibu tersebut antara lain bahwa “*Ibu-ibu tidak ada yang nganggur*” karena disibukkan dengan usaha dagang dan urusan domestik rumah tangga. Mereka tertarik untuk mengikuti pelatihan komputer agar dapat lebih maju, misalnya dapat memudahkan pembuatan undangan-undangan rapat, menjual barang, mendesain produk, berkomunikasi dengan orang lain, dan lain-lain.

Selain itu mereka berkeinginan agar ketika diberi pelatihan diberi tes terlebih dahulu, sehingga dapat diketahui sejauh mana pemahamannya dan kemampuan mereka dalam menggunakan komputer. Berdasarkan hasil tes tersebut dapat dilakukan pentahapan bagi ibu-ibu yang sama sekali belum mengenal komputer dan internet, diawali dengan tahap pengenalan. Setelah mereka paham dan mahir, baru bergabung dengan para ibu lainnya yang sudah lebih mahir. Oleh karena itu, proses pelatihan yang dilakukan secara bertahap, yaitu pengenalan, penggalan kemampuan, dan keterampilan menggunakan komputer.

E. Penutup

Berdasarkan penelitian di lapangan dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keterbatasan perempuan dalam mengakses teknologi komunikasi dan informasi: Kecenderungan rendahnya kemampuan perempuan dalam menggunakan komputer, belum merasa membutuhkan, serta belum mengetahui manfaat komputer dan internet. Perempuan cenderung mengalah dengan anak dan suami dalam hal kesempatan mengakses komputer. Pengaruh budaya di mana pandangan sosial di masyarakat yang dianggap wajar, baik oleh perempuan maupun keluarga, perempuan lebih cocok bekerja di ranah domestik sehingga tidak membutuhkan fasilitas komputer. Dengan kata lain perempuan cukup di ranah domestik. Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh perempuan untuk mengakses internet karena kewajiban mengurus kegiatan rutin rumah tangga. Konsep maskulinitas *Information Technology*, di mana piranti berbasis teknologi informasi hanya milik kaum laki-laki saja

Saran yang bisa disampaikan adalah sebagai berikut. Memberikan pelatihan tentang komputer dan internet untuk kaum perempuan. Memberikan sosialisasi manfaat komputer dan internet untuk dirinya sendiri, keluarga maupun untuk kegiatan usaha produktif. Membentuk kelompok *focal point* untuk menjadi fasilitator bagi kelompok perempuan yang lain. Diperlukan partisipasi dari suami dan anak untuk memberikan kesempatan kepada istri/ibu mereka untuk belajar mengakses komputer dan internet baik secara mandiri maupun dalam kelompok-kelompok. Diperlukan partisipasi dari pihak eksternal untuk mengupayakan pemberdayaan perempuan, misalnya dengan memberikan pelatihan-pelatihan ICT

Pustaka Acuan

- Bucy, E. P., Newhagen, J. E. (2010), *Media access: Social and psychological dimensions of new technology use*. Mahwah (NJ): LEA.
- Fallows, Deborah. 2009. *How Women and Men Use the Internet*. New York: Pew Internet & American Life Project:
- Grabill, Jeffrey T. (2010). *Community Literacy Programs and the Politics of Change*. Albany, New York: SUN.
- Higgins, L., Long, E., & Flower, L., (2009). *Community Literacy: A Rhetorical Model for Personal and Public Inquiry*. Pittsburgh, PA: Carnegie Mellon.
- Maguire, Martin. 2010. Methods to Support Human-Centred Design *dalam International Journal Human-Computer Studies*. No. 55. Halaman 587-634.
- Peck, Wayne Campbell, Flower, Linda and Lorraine Higgins. 2009. *Community Literacy. College Composition and Communication*. 46.2 (): 199-22.
- Perbawaningsih, Yudi, Pupung Arifin dan Theresia D. Wulandari. 2012. Pergeseran Pola Komunikasi Antarpersonal Warga Kampung Pasca Pemasangan Jaringan Internet (Studi Pemberdayaan Warga Kampung Cyber Rt.36 Tamansari Yogyakarta)

- Rice, R. (2008). *Computer-mediated communication and Organizational Innovation*. Journal of Communication, 37(4), 65-94.
- Rice, R. (2010). *Media Appropriateness; Using social presence theory to compare traditional and new organizational media*. Human Communication Research, 19(4).
- Rhodes, Jo. (2008). *Can E- Commerce Enable Marketing in an African Rural Women's Community Based Development Organisation?*. Informing Science Journal: Special Series on Community Informatics Volume 6, Cape Town University, South Africa.
- Rosnafisah, Sulaiman., et.al., (2009). *The e-Business Potential for Home-Based Businesses in Malaysia: A. Qualitative Study*. International Journal of Cyber Society and Education, Vol. 2 Issue June 1, 2009
<http://data.worldbank.org>, 5 Maret 2012.
- UN Millenium Project (2009) dalam <http://www.unmillenniumproject.org/reports/fullreport.htm>, diakses 5 Maret 2013.
- Williams, F., & Rice, R. E. (2012). *Communication research and the new media technologies*. In R. N. Bostrom (Ed.), *Communication Yearbook 7* (pp. 200-224). Beverly Hills, CA: Sage.

Pemberdayaan Keluarga Miskin Tenaga Kerja Wanita (TKW) melalui Model Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak Balita Terlantar

Poor-families Women Labors Empowerment through Social Service and Protection Model on Neglected Children Underfive

Ikawati dan Tri Gutomo

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS),
Jl Kesejahteraan Sosial No 1 Nitipuran Yogyakarta, Telpon (0271) 377265, E-mail: ikawati.susatyo@yahoo.com.
Diterima 30 September 2013, direvisi 3 Oktober 2013, disetujui 11 Oktober 2013.

Abstract

The research on empowerment of poor families women labors through service and social protection of children underfive is to examine the acceptability, applicability, effectivity, and to find the supporting and handicap factors in applying the model on service and social protection on children underfive of poor women labor families. The research used is an experimental one group pre-test post-test design. Research location are chosen purposively, based on problem solving of the previous research (2010). Research subjects are chosen purposively, they are work group consisting individual, community member group, organization, and related institutions committed to neglected children. Based on that method, taken 30 respondents and children underfive of women labor families left by their mother working abroad, and women labor families each 30 respondents. Data are gathered through test, interview, and observation. Data are analyzed through comparison test (t-test) and Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat (SWOT) techniques to see its supporting and handicap factors. After undergoing an experimentation, the model has shown acceptable, applicable, and effective in all research target, work group, neglected children underfive of women labor families, and their families. The model applicated is able to empower poor women labor families enhancing their knowledge and reference on children growth, role and family function, and any efforts to prevent children from negligence in women labor families. The existence of related institutions, work group, and community willing to applicate the model were supporting factor of the model, while its handicap factors are there is yet local regulation especially overseing the problem of children underfive from women labor families, inadequacy of knowledge and reference in the community, and there is yet data on the quantity of vulnerable children underfive from poor women labor families. It is recommended that the model that is proved its acceptability, applicability, and effectiveness be socialized to Directory of Children Welfare and Directory General of Social Rehabilitation, The Ministry of Social Affairs, and disseminate of the model so that can be applicated in all regions.

Keywords:

Women Labor Families Empowement-Social Protection and Service -Children Underfive

Abstrak

Penelitian Pemberdayaan Keluarga Miskin TKW Melalui Model Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak Balita Terlantar bertujuan menguji model pelayanan dan perlindungan sosial anak balita TKW yang bersifat akseptabel, aplikabel dan efektif mampu memberdayakan keluarga miskin TKW dan menemukan faktor pendukung dan penghambat dalam pengaplikasian model tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian uji coba *one group pre-test post-test design*. Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive*, berdasarkan tindak lanjut dari pemecahan masalah yang ditemukan dalam penelitian sebelumnya (2010). Penentuan subjek secara *purposive* yaitu pokja yang terdiri dari perorangan, kelompok warga masyarakat, organisasi, dan instansi yang peduli terhadap anak balita. Berdasarkan hal tersebut ditentukan 30 responden dan anak balita TKW yang ditinggal ibunya bekerja di luar negeri serta keluarga TKW masing-masing 30 responden. Teknik pengumpulan data digunakan testing, wawancara, dan observasi. Teknik analisisnya digunakan uji komparasi (t-test) dan teknik SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat*) untuk melihat faktor pendukung dan penghambat. Setelah diuji secara empirik, ternyata model pelayanan dan perlindungan sosial anak balita terlantar TKW akseptabel, aplikabel, dan efektif baik pada sasaran garap yaitu pokja, anak balita terlantar TKW, maupun keluarganya. Model yang diterapkan mampu memberdayakan keluarga miskin TKW dalam peningkatan pengetahuan dan wawasan tentang tumbuh kembang anak, peran dan fungsi keluarga, serta upaya yang dilakukan agar tercegah keterlantaran anak balita TKW. Adanya dukungan sasaran garap, instansi terkait, pokja dan masyarakat untuk menerapkan dan melaksanakan model tersebut merupakan faktor pendukung pengaplikasian model pelayanan dan perlindungan sosial anak balita. Faktor penghambatnya adalah belum adanya dukungan perda khususnya dalam penanganan permasalahan yang dihadapi anak balita TKW, rendahnya tingkat pengetahuan dan wawasan masyarakat, dan belum adanya data jumlah anak balita TKW. Direkomendasikan agar model yang telah teruji keefektifan, akseptabilitas dan aplikabilitasnya disosialisasikan ke Direktorat Kesejahteraan Sosial

Anak dan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial RI, dan perlu diseminasi terhadap model tersebut agar dapat diterapkan di berbagai daerah.

Kata kunci:

Pemberdayaan Keluarga TKW-Model Pelayanan dan Perlindungan Sosial-Balita Terlantar

A. Pendahuluan

Masa anak merupakan masa strategis sekaligus kritis, strategis karena masa ini merupakan masa peka untuk memperoleh stimulan dan pembelajaran yang memungkinkan anak dikondisikan untuk memperoleh keberhasilan di dalam kelompoknya, kritis karena bila terjadi salah asuh dapat menyebabkan gangguan pada perkembangan anak selanjutnya (Aswarni Sujud, 1999). Selain itu, masa usia dini juga dikatakan sebagai periode emas (*golden age*) bagi perkembangan anak untuk memperoleh proses pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan usia dini sangat penting dan merupakan tahun yang berharga bagi anak untuk mengenali, mendapatkan berbagai macam fakta di lingkungannya sebagai stimulan perkembangan kepribadian, psikomotor, kognitif dan sosial (Direktorat Pelayanan Sosial Anak, 2009).

Banyak anak balita yang mengalami keterlantaran, diantaranya karena ditinggal ibu bekerja baik di luar kota/ di luar negeri, sehingga tidak memperoleh perawatan sebagaimana mestinya dan tumbuh kembang anak menjadi terhambat. Oleh karena itu anak balita terlantar perlu mendapatkan penanganan agar kebutuhan fisik, psikis, sosial anak terpenuhi dan sesuai dengan hak anak. Berangkat dari kenyataan tersebut Ikawati, dkk (2010) telah melakukan penelitian Pengkajian Kebutuhan dan Perlindungan Balita Terlantar Tenaga Kerja Wanita (TKW) di lima propinsi yaitu NTB, NTT, Jabar, Jatim, dan Jateng. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa permasalahan sosial anak balita TKW adalah terjadi ketidakterpenuhan kebutuhan fisik, psikis, dan sosial yang menyebabkan keterlantaran fisik (28,67 % s/d 76,67 %), psikis (41 % s/d 62,67 %), dan sosial (45% s/d 76,33%). Penyebab terjadinya keterlantaran antara lain kemiskinan (100 %), perceraian (7,67 %), kematian suami (0,33 %), tidak ada tanggung jawab ayah (61 %), tidak ada tanggung jawab ibu (49 %), tingkat pengetahuan keluarga tentang tumbuh kem-

bang anak balita rendah (64,67 %), dan tingkat kepedulian masyarakat tentang pentingnya pengetahuan tumbuh kembang anak rendah (53 %) (Ikawati, dkk: 2010).

Keterlantaran pada anak balita TKW tersebut menyebabkan tumbuh kembang anak menjadi terhambat dan berdampak pada kondisi anak balita TKW secara fisik (58,33% s/d 69,3%), psikis (27% s/d 78 %), serta sosial (61,33% s/d 64%). Keterlantaran pada balita TKW juga terjadi karena rendahnya upaya yang dilakukan baik keluarga, masyarakat dan instansi terkait pada tahap pencegahan antara (6,67 % s/d 86,67 %), pada tahap rehabilitasi/pemulihan (<20%) dan pada tahap pengembangan/ pembinaan lanjut (<20%). Teridentifikasinya keterlantaran pada anak balita TKW tersebut membutuhkan adanya pelayanan dan perlindungan sosial bagi anak balita terlantar TKW baik pada tahap pencegahan, tahap rehabilitasi/pemulihan, dan tahap pengembangan pembinaan. Dari hasil penelitian tersebut disusun konsep model pelayanan dan perlindungan sosial anak balita TKW yang mampu memberdayakan keluarga miskin agar tercegah keterlantaran (Ikawati, dkk: 2010).

Untuk mengetahui kelayakan model yang telah disusun, diperlukan serangkaian pengujian terhadap akseptabilitas, aplikabilitas dan efektivitas model melalui pemberdayaan keluarga miskin TKW. Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut. Apakah model pelayanan dan perlindungan sosial anak balita TKW bersifat akseptabel, aplikabel dan efektif sehingga mampu memberdayakan keluarga miskin TKW?. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pengaplikasian model pelayanan dan perlindungan sosial anak balita TKW?.

Berdasarkan dari rumusan masalah yang diajukan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Ditemukan model pelayanan dan perlindungan sosial anak balita TKW yang bersifat akseptabel, aplikabel dan efektif mampu mem-

berdayakan keluarga miskin TKW. Ditemukan faktor pendukung dan penghambat dalam pengaplikasian model pelayanan dan perlindungan sosial anak balita TKW. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat: Memberikan alternatif pedoman dalam pengembangan program pelayanan dan perlindungan anak balita terlantar khususnya anak balita TKW yang mengalami keterlantaran dan pemberdayaan keluarga miskin TKW pada Kementerian Sosial RI melalui Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Kesehatan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang pelayanan dan perlindungan anak balita terlantar.

B. Kajian Teori

1. Model Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak Balita TKW Keluarga Miskin

Model pelayanan sosial dapat menghasilkan output yang berkualitas, diperlukan peningkatan efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dipengaruhi faktor kebijakan publik, karakteristik dan lingkungan masyarakat serta kontrol pemenuhan terhadap penyedia layanan. Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas, maka dengan Model Pelayanan Perlindungan Sosial Anak Balita TKW tersebut diharapkan dapat mendorong seluruh stakeholder dan masyarakat ikut terlibat dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelayanan dan perlindungan sosial anak balita TKW.

Model Pelayanan Perlindungan Sosial Anak Balita TKW dibangun berdasar prinsip pembangunan yang berorientasi pemenuhan kebutuhan nyata masyarakat setempat, didasarkan pada keadaan sumber daya masyarakat bersangkutan dan pengelolaan pembangunan oleh masyarakat bersangkutan. Paradigma tersebut memberi peluang bagi masyarakat untuk menjadi subjek dan penentu program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi, serta sumberdaya yang dimiliki, sehingga memberi peran lebih luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses pembangunan.

Dalam pengaplikasian Model Pelayanan Perlindungan Sosial Anak Balita TKW dilaku-

kan dengan membentuk Pokja/Forum yang terdiri dari perseorangan, kelompok warga masyarakat, organisasi sosial dan instansi terkait yang peduli terhadap permasalahan anak balita terlantar. Penerapan Model Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak Balita Terlantar TKW diimplementasikan melalui pemberian pengetahuan dan wawasan tentang pentingnya peran dan fungsi keluarga, strategi mengatasi permasalahan sosial dalam keluarga, strategi pemecahan masalah melalui pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial di lingkungannya, pengelolaan remitan secara tepat dan bermanfaat, kewirausahaan/ UEP/ UKS, serta bimbingan keterampilan manajemen.

Suatu program dapat dikatakan efektif apabila dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan berdampak secara positif terhadap sasaran yang dikenai program. Kriteria dalam mengukur efektivitas program diperlukan: Produktivitas dari tujuan program yang akan diekspresikan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Pencapaian hasil dampak dari pelayanan kepada individu yang tercermin dari fungsi dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dampak program terhadap komunitas (R. Elkin dan Cornick dalam Istiana Hermawati, dkk: 2005). Menurut Earl Babbie, keefektifan suatu program sosial dapat dilihat dari aspek: kemandirian masyarakat secara sosial dan ekonomi; organisasi bergerak sesuai dengan kebutuhan nyata menurut arahan program; dan masyarakat dapat membuat hasil program (Gunanto Surjono, 2001).

Suatu model dalam pelayanan dan perlindungan anak balita TKW dikatakan efektif apabila dapat dilihat dari *output* (hasil langsung) yang diperoleh setelah model diterapkan dan *outcome* (manfaat) program tersebut, yaitu tercegahnya keterlantaran. *Output* yang dimaksud adalah peningkatan kemampuan kelompok kerja/forum dalam: Mengidentifikasi permasalahan, potensi, sumber dan kebutuhan pelayanan dan perlindungan sosial anak balita terlantar TKW. Merencanakan program pelayanan dan penanganan anak balita terlantar TKW. Melaksanakan program pelayanan dan perlindungan anak balita terlantar TKW. Mengendalikan program pelayanan dan perlindungan anak balita terlantar TKW.

Manfaat dan *outcome* dari model tersebut dapat dilihat dari ada tidaknya peningkatan kesejahteraan anak balita (tercegah keterlantaran pada keluarga TKW) dengan indikator: Terpenuhinya kebutuhan anak balita terlantar TKW secara fisik, psikis dan sosial. Peningkatan pengetahuan dan wawasan keluarga TKW tentang pentingnya tumbuhkembang anak balita. Peningkatan pengetahuan dan wawasan keluarga TKW tentang peran dan fungsi keluarga. Peningkatan upaya keluarga TKW dalam mencegah keterlantaran anak. Selanjutnya model dikatakan aplikabilitasnya tinggi apabila masyarakat mudah mendapatkan informasi terkait dengan program-program yang ada dalam model tersebut, selain itu kemudahan jangkauan masyarakat mendapatkan pelayanan dari program-program yang ada. Model pelayanan dikatakan akseptabel apabila model pelayanan tersebut mendapat dukungan program-program pelayanan baik dari masyarakat, instansi terkait maupun sasaran garap.

2. Penyuluhan dan Bimbingan Sosial (PBS) Perwujudan Pemberdayaan Masyarakat

Penyuluhan merupakan upaya pemberdayaan masyarakat kearah kemandirian dan perbaikan kesejahteraan. Oleh karena itu, peran ilmu penyuluhan pembangunan merupakan landasan bagi percepatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah (Toto Mardikanto, 2007). Selanjutnya disebutkan bahwa penyuluhan merupakan kegiatan penyampaian informasi, penerangan, perubahan perilaku, proses pendidikan, rekayasa sosial (*social engineering*) pemasaran sosial (*social marketing*), perubahan sosial (*social change*), fasilitasi, pendampingan, pemberdayaan (*empowerment*) dan penguatan komunitas (*community strengthening*), maka kegiatan penyuluhan pembangunan harus semakin bersifat "partisipatif" yang diawali dengan analisis tentang keadaan dan kebutuhan masyarakat melalui kegiatan penilaian desa partisipatif atau *participatory rural appraisal*/PRA (Chambers, 1996).

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa penyuluhan merupakan proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan

masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua pihak (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlihat dalam proses pembangunan demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya dan semakin sejahtera secara mandiri, partisipatif dan berkelanjutan. Penyuluhan dan bimbingan sosial merupakan suatu metode pekerjaan sosial yang efektif untuk menggerakkan masyarakat. Penyuluhan dan bimbingan sosial merupakan inti pokok dari praktek pekerjaan sosial yang merupakan suatu kegiatan penting dalam menggerakkan atau memotivasi masyarakat yang dapat mendukung program pembangunan kesejahteraan sosial.

Kegiatan penyuluhan sosial mempunyai arti penting dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Penyuluhan sosial didasari prinsip-prinsip komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) sebagai kegiatan pelayanan atau intervensi sosial untuk mempengaruhi individu, keluarga dan kelompok-kelompok atau masyarakat sebagai satu kesatuan dalam tiga aspek yaitu aspek kognitif, timbul, bertambahnya kesadaran dan pengetahuan, aspek afektif timbulnya minat dan sikap, serta aspek konatif yang berarti timbulnya inisiatif atau prakarsa untuk berbuat yang konstruktif. Peranserta masyarakat merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan upaya pembangunan kesejahteraan sosial baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil-hasilnya. Partisipasi masyarakat atau peranserta masyarakat adalah keadaan ketika masing-masing individu, keluarga dan masyarakat ikutserta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat di lingkungan. (Mantra, 1984).

Hakekat partisipasi adalah kemandirian artinya seseorang melakukan kegiatan atas kemauan diri sendiri bukan karena paksaan dari orang lain. Menurut Craig dan Meyo (dalam Istiana Hermawati, dkk: 2004) bahwa partisipasi merupakan komponen penting dalam membangkitkan kemandirian dari proses pemberdayaan. Pemberdayaan dan partisipasi ini merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial dan transformasi budaya. Sementara strategi pemberdayaan meletakkan partisipasi aktif masyarakat ke da-

lam efektifitas, efisiensi dan sikap kemandirian (keswadayaan) (Direktorat Pemberdayaan Keluarga, 2010). Keterlibatan partisipasi masyarakat dimaksudkan sebagai proses untuk memungkinkan masyarakat menggunakan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam dengan cara memotivasi dan menggerakkan mereka untuk menggapai kehidupan dan harapan di tangan sendiri (Sutaat, dkk., 2011).

C. Penggunaan Metode Penelitian

Tipe Penelitian: Tipe penelitian ini adalah penelitian ujicoba, yang akan menguji kelayakan model pelayanan dan perlindungan sosial anak balita TKW, dengan menggunakan rancangan penelitian *Quasi Exsperimen Design* dalam bentuk *One Group Pretest Post Test Design*. Esensi

analisis yang terkandung dalam rancangan penelitian ini adalah perbandingan antar kelompok subjek penelitian dan antar waktu yang tercermin dalam perbedaan nilai dari sejumlah variabel antara sebelum dan sesudah treatment/ perlakuan. Treatment yang berupa Penyuluhan dan Bimbingan Sosial (PBS) sebagai tindak lanjut temuan dari kajian tahun sebelumnya (Ikawati, dkk: 2010) melalui pokja yang terbentuk, kemudian Pokja mempunyai kemampuan memberikan intervensi kepada keluarga TKW yang mempunyai anak balita agar dapat tercegah keterlantarannya. PBS yang diberikan harus dilaksanakan secara professional berdasarkan kompetensi dan mempunyai target dari kegiatan yang akan dicapai. Untuk lebih jelasnya PBS tersebut dapat dilihat dalam silabus di bawah ini.

No	Materi Pelatihan	Penyuluh	Target yg akan dicapai	Keterangan
1	Peran dan fungsi keluarga	Biro Pemberdayaan perempuan	Tersosialisasinya peran dan fungsi keluarga	Peserta paham ttg peran dan fungsi keluarga
2	Strategi mengatasi permasalahan keluarga	1. Dinas Sosial 2. Dinas kesehatan	Teridentifikasinya cara mengatasi permasalahan keluarga	Peserta dapat menyusun program prioritas dan strategi penanganan
3	Strategi pemecahan masalah melalui pen-dayagunaan potensi dan sumber kesos	Bappeda	Teridentifikasinya cara pemecahan masalah melalui pemberdayaan potensi dan sumber kesos	Peserta dapat menyusun program prioritas mengacu potensi dan sumber kesos
4	Pengolahan remitan secara tepat dan bermanfaat	Disnakertrans	Teridentifikasinya pengelolaan remitan secara tepat dan bermanfaat	Peserta paham tentang pengelolaan remitan secara tepat dan bermanfaat
5	Kewirausahaan/ UEP	Dunia usaha	Tersosialisasinya pengetahuan tentang kewirausahaan	Peserta paham tentang kewirausahaan
6	Dinamika kelompok	Dinas Sosial	Teridentifikasinya pembentukan kelompok kerja	Peserta paham tentang cara membentuk kelompok kerja
7	Bimb. keterampilan manajemen kesos	Dinas Sosial, panitia, TIM	Tersusunnya program, rencana aksi Pokja	Peserta paham tentang rencana aksinya

Lokasi Penelitian: Penelitian ini dilaksanakan di tiga lokasi, yaitu Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah, sebagai suatu tindak lanjut pemecahan masalah yang ditemukan dalam penelitian pengkajian tahun 2010. **Penentuan Sasaran Subjek:** Sasaran subjek penelitian adalah pokja/forum yang terdiri dari perorangan, kelompok warga masyarakat, organisasi sosial dan instansi terkait yang peduli terhadap anak balita terlantar. Anak balita TKW dan keluarganya yang telah mendapatkan intervensi dari kelompok kerja atau pokja/forum.

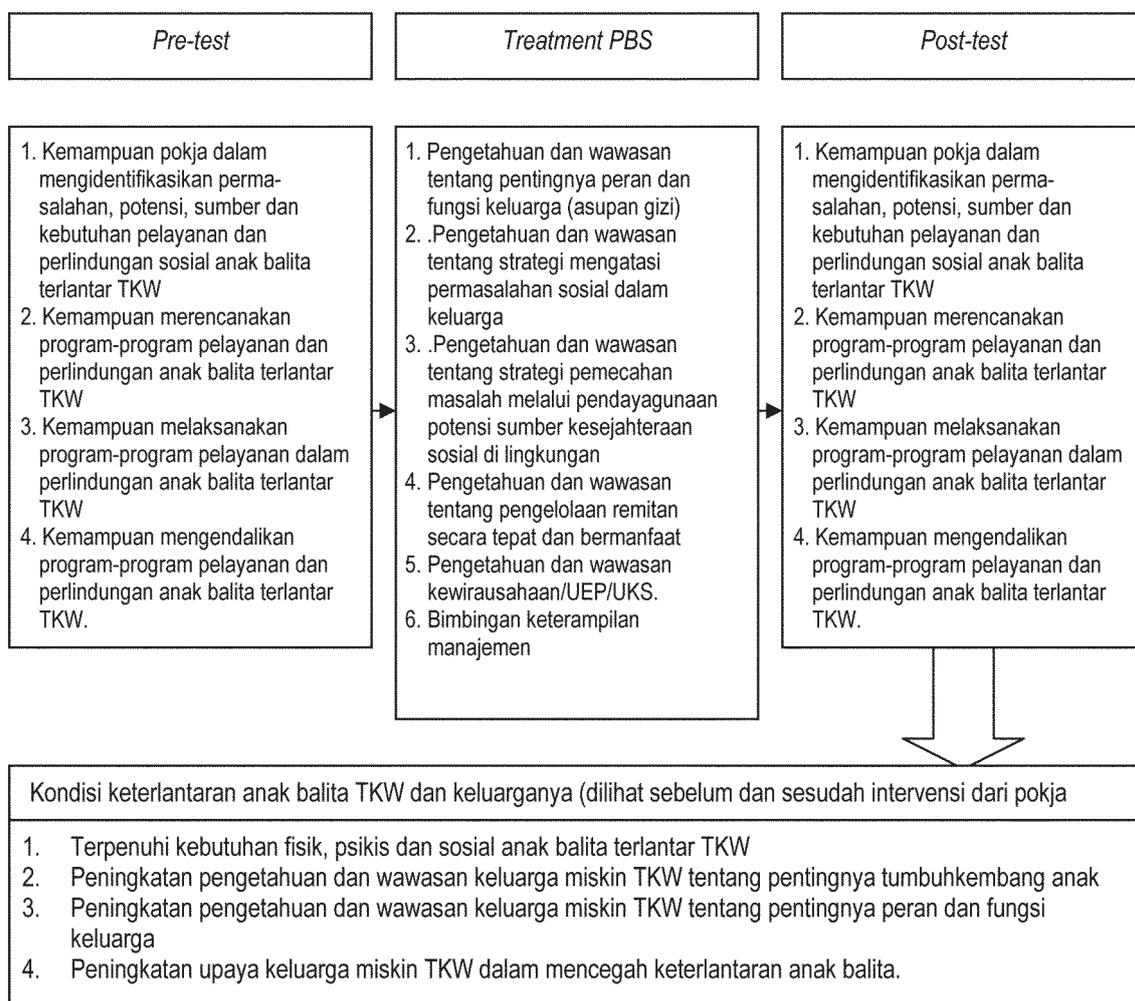
Teknik Pengumpulan Data: Testing, digunakan untuk melihat kondisi awal (pre-test)

sebelum ada perlakuan/treatment berupa penyuluhan dan bimbingan sosial (PBS) dan kondisi akhir (post-test) setelah dilakukan treatment kepada pokja/ forum pada kelompok ujicoba tentang kemampuan pokja dalam mengidentifikasi permasalahan, potensi, sumber dan kebutuhan pelayanan dan perlindungan sosial anak balita terlantar TKW, merencanakan program-program pelayanan dan perlindungan anak balita terlantar TKW, melaksanakan program-program pelayanan dan perlindungan anak balita terlantar TKW serta mengendalikan program pelayanan dan perlindungan anak balita terlantar TKW. Wawancara, digunakan untuk menggali data mengenai kondisi anak balita TKW, yang akan dilihat melalui terpenuhinya kebutuhan fisik, psi-

kis dan sosial anak balita terlantar TKW, peningkatan pengetahuan dan wawasan keluarga miskin TKW tentang pentingnya tumbuhkembang anak dan pentingnya peran dan fungsi keluarga, serta peningkatan upaya keluarga miskin TKW dalam mencegah keterlantaran anak balita TKW. Observasi, dipergunakan untuk mengamati baik kelompok pokja maupun anak balita TKW dan keluarganya sebagai data penunjang

Teknik Analisa Data: Deskriptif kualitatif-kuantitatif (persentase) melalui distribusi frekuensi (persentase) pada masing-masing

variabel di ketiga lokasi penelitian yang akan lebih memudahkan pemaknaan. Uji Komparasi untuk mengetahui perbedaan pada kelompok pokja di ketiga lokasi tersebut melalui kelompok yang sama dengan tenggang waktu yang berbeda (pre-test dan post-test) yang rancangan dapat dilihat dalam bagan di bawah. Teknik analisis SWOT adalah untuk melihat *strength* (kekuatan), *weakness* (kelemahan), *opportunity* (peluang), dan *threat* (ancaman) dalam pengaplikasian model tersebut.



D. Pemberdayaan Keluarga Miskin TKW

Pemberdayaan keluarga miskin TKW melalui Model pelayanan dan perlindungan sosial anak balita TKW terbukti bersifat akseptabel, aplikabel dan efektif, hal tersebut dapat dilihat dari uji t-test yang telah dilakukan:

1. Analisis Akseptabilitas: Uji t-test terhadap akseptabilitas model pada masyarakat,

instansi terkait dan sasaran garap, hasilnya adalah untuk pokja Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, hasil analisis $t = -10,794$ dengan $p = 0$ ($p < 0,01$) artinya sangat signifikan, kesimpulannya ada perbedaan rerata/mean sebelum (6,900) dan sesudah (11,433) pokja melakukan intervensi. Sedangkan untuk pokja Kabupaten Malang Provinsi Jawa

Timur, hasil analisis $t=16,731$ dengan $p=0$ ($p<0,01$) artinya sangat signifikan, kesimpulannya ada perbedaan rerata/mean sebelum (7,067) dan sesudah (13,400) pokja melakukan intervensi dan untuk pokja Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, dengan hasil analisis $t=5,248$ dengan $p=0$ ($p<0,01$) artinya sangat signifikan, kesimpulannya ada perbedaan rerata/mean sebelum (6,500) dan sesudah (8,333) pokja melakukan intervensi.

Dari analisis akseptabilitas tersebut menunjukkan ada perbedaan rerata sebelum dan sesudah dilakukan Penyuluhan dan Bimbingan Sosial (PBS), yang berarti bahwa ada perbedaan penerimaan masyarakat, instansi terkait dan sasaran garap terhadap model sebelum dan sesudah Pokja melakukan intervensi di ketiga lokasi pemberdayaan. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan pengetahuan dan wawasan masyarakat, instansi terkait dan sasaran garap tentang adanya peraturan yang mendukung kegiatan pelayanan perlindungan sosial, selanjutnya Pokja terlibat dan termotivasi dalam kegiatan tersebut. Adanya dukungan berbagai peraturan tersebut semakin menguatkan bahwa dalam menerapkan model pelayanan dan perlindungan sosial anak balita terlantar TKW perlu didukung peraturan yang ada agar tujuan program yaitu mencegah terjadinya keterlantaran anak dapat tercapai. Keterlibatan dan partisipasi Pokja dapat dilihat dari rencana aksi yang disusun dan dilaksanakannya kegiatan tersebut.

2. **Analisis Aplikabilitas:** Uji t-test terhadap aplikabilitas model pada masyarakat, instansi terkait dan sasaran garap, hasilnya adalah untuk pokja Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, hasil analisis $t=-8,034$ dengan $p=0$ ($p<0,01$) artinya sangat signifikan, kesimpulannya ada perbedaan rerata/mean sebelum (7,000) dan sesudah (11,600) pokja melakukan intervensi. Sedangkan untuk pokja Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, hasil analisis $t=-15,363$ dengan $p=0$ ($p<0,01$) artinya sangat signifikan, kesimpulannya ada perbedaan rerata/mean sebelum

(7,333) dan sesudah (13,500) pokja melakukan intervensi dan untuk pokja Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, dengan hasil analisis $t=-10,839$ dengan $p=0$ ($p<0,01$) artinya sangat signifikan, kesimpulannya ada perbedaan rerata/mean sebelum (6,867) dan sesudah (11,500) pokja melakukan intervensi.

Data di atas menunjukkan ada perbedaan rerata sebelum dan sesudah dilakukan PBS, yang berarti bahwa ada perbedaan dalam penerapan model oleh masyarakat, instansi terkait dan sasaran garap sebelum dan sesudah Pokja melakukan intervensi di ketiga lokasi pemberdayaan. Hal tersebut didukung dengan adanya penyebaran informasi tentang program pelayanan dan perlindungan anak melalui kegiatan pendataan, rujukan ke instansi terkait, adanya kemudahan dalam memberikan pelayanan dan perlindungan sosial anak balita terlantar TKW, serta kemanfaatan program kepada sasaran garap. Melalui kegiatan tersebut tingkat pengetahuan dan wawasan sasaran garap akan meningkat sehingga dapat dicari upaya-upaya penanganannya agar keterlantaran dapat dicegah.

3. Analisis Efektivitas Model untuk Pelaksanaan Program (Pokja):

- a. Tingkat kemampuan pokja dalam mengidentifikasi permasalahan, potensi, sumber dan kebutuhan pelayanan dan perlindungan sosial anak balita terlantar dapat dimaknai efektif terlihat dalam hasil analisis untuk pokja Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat dengan hasil $t=-10,656$, dengan $p=0$ ($p<0,01$) artinya sangat signifikan, kesimpulannya ada perbedaan rerata sebelum (4,067) dan sesudah (8,600) pokja diberikan PBS (Penyuluhan dan Bimbingan Sosial), demikian juga pada pokja Kabupaten Malang Jawa Timur dengan hasil $t=-14,807$, dengan $p=0$ ($p<0,01$) artinya sangat signifikan. Kesimpulannya ada perbedaan rerata sebelum (6,200) dan sesudah (10,300) pokja diberikan PBS dan pokja Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah dengan hasil analisis $t=-7,065$, $p=0$ ($p<0,01$) artinya sangat signifi-

kan, kesimpulannya ada perbedaan rerata sebelum (5,367) dan sesudah (8,867) pokja diberikan PBS.

- b. Tingkat kemampuan pokja dalam merencanakan program pelayanan dan perlindungan sosial anak balita terlantar dapat dikatakan efektif terlihat dalam hasil analisis untuk pokja Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat dengan hasil $t=-12,008$, dengan $p=0$ ($p<0,01$) artinya sangat signifikan, kesimpulannya ada perbedaan rerata sebelum (5,733) dan sesudah (13,167) pokja diberikan PBS (Penyuluhan dan Bimbingan Sosial), demikian juga pada pokja Kabupaten Malang Jawa Timur dengan hasil $t=-12,362$, dengan $p=0$ ($p<0,01$) artinya sangat signifikan. Kesimpulannya ada perbedaan rerata sebelum (8,533) dan sesudah (13,433) pokja diberikan PBS dan pokja Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah dengan hasil analisis $t=-6,796$, $p=0$ ($p<0,01$) artinya sangat signifikan, kesimpulannya ada perbedaan rerata sebelum (7,433) dan sesudah (11,733) pokja diberikan PBS.
- c. Tingkat kemampuan pokja dalam melaksanakan program pelayanan dan perlindungan sosial anak balita terlantar dapat dimaknai efektif terlihat dalam hasil analisis untuk pokja Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat dengan hasil $t=-8,915$, dengan $p=0$ ($p<0,01$) artinya sangat signifikan, kesimpulannya ada perbedaan rerata sebelum (4,467) dan sesudah (9,867) pokja diberikan PBS (Penyuluhan dan Bimbingan Sosial), demikian juga pada pokja Kabupaten Malang Jawa Timur dengan hasil $t=-13,569$, dengan $p=0$ ($p<0,01$) artinya sangat signifikan. Kesimpulannya ada perbedaan rerata sebelum (5,700) dan sesudah (10,467) pokja diberikan PBS dan pokja Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah dengan hasil analisis $t=-6,312$, $p=0$ ($p<0,01$) artinya sangat signifikan, kesimpulannya ada perbedaan rerata sebelum (5,000) dan sesudah (7,867) pokja diberikan PBS.
- d. Tingkat kemampuan pokja dalam mengendalikan program pelayanan dan perlindungan sosial anak balita terlantar dapat dimaknai efektif terlihat dalam hasil analisis untuk pokja Kabupaten Cianjur Provinsi

Jawa Barat dengan hasil $t=-10,233$, dengan $p=0$ ($p<0,01$) artinya sangat signifikan, kesimpulannya ada perbedaan rerata sebelum 4,233 dan sesudah (9,200) pokja diberikan PBS (Penyuluhan dan Bimbingan Sosial), demikian juga pada pokja Kabupaten Malang Jawa Timur dengan hasil $t=-13,442$, dengan $p=0$ ($p<0,01$) artinya sangat signifikan. Kesimpulannya ada perbedaan rerata sebelum (5,433) dan sesudah (9,933) pokja diberikan PBS dan pokja Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah dengan hasil analisis $t=-4,940$, $p=0$ ($p<0,01$) artinya sangat signifikan, kesimpulannya ada perbedaan rerata sebelum (5,100) dan sesudah (7,933) pokja diberikan PBS.

Hasil analisis menunjukkan bahwa ada perbedaan rerata sebelum dan sesudah dilakukan PBS terhadap Pokja, yang berarti bahwa ada perbedaan tingkat kemampuan Pokja/Forum sebelum dan sesudah PBS di ketiga lokasi pemberdayaan. Tingkat keefektifan atau hasil langsung dari penerapan model dapat dilihat dari kemampuan Pokja dalam mengidentifikasi permasalahan, potensi, sumber dan kebutuhan serta prioritas pelayanan dan perlindungan sosial sesuai kebutuhan sasaran garap. Pokja mampu merencanakan program yaitu menyusun program, jadwal, penanggung jawab dan indikator keberhasilan program yang diharapkan. Hal tersebut bertujuan agar program dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan program dapat tercapai. Pokja mampu melaksanakan program sesuai kesepakatan, menentukan strategi penanganan dan menumbuhkan dukungan dalam pelaksanaan program dengan kegiatan seminar, sarasehan, penyebaran melalui media cetak dan elektronik serta *pilot project*. Pokja mampu mengendalikan program yaitu mengendalikan rencana dan pelaksanaan program, memperbaiki dan menyusun laporan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati agar tujuan program dapat tercapai.

4. Analisis Efektivitas Model untuk Penerima Manfaat, anak balita TKW:

- a. **Kondisi fisik anak balita TKW:** (1) Amanan hasil analisis keterpenuhan kebutuhan fisik anak balita TKW di Kabupaten Cianjur

Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan uji t-test (N=30), hasilnya adalah $t=-17,024$ dengan $p=0$ ($p<0,01$), artinya hipotesa diterima, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rerata (mean) pada keterpenuhan kebutuhan fisik pada anak balita tenaga kerja wanita sebelum (14,267) dan sesudah (21,100) Pokja melakukan intervensi pelayanan dan perlindungan anak balita terlantar TKW. (2) Amatan hasil analisis keterpenuhan kebutuhan fisik anak balita TKW di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan uji t-test (N=30), hasilnya adalah $t=-33,646$ dengan $p=0$ ($p<0,01$), artinya hipotesa diterima, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rerata (mean) pada keterpenuhan kebutuhan fisik pada anak balita tenaga kerja wanita sebelum (13,567) dan sesudah (24,500) Pokja melakukan intervensi pelayanan dan perlindungan anak balita terlantar TKW. (3) Amatan hasil analisis keterpenuhan kebutuhan fisik anak balita TKW di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan uji t-test (N=30), hasilnya adalah $t=-9,578$ dengan $p=0$ ($p<0,01$), artinya hipotesa diterima, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rerata (mean) pada keterpenuhan kebutuhan fisik pada anak balita tenaga kerja wanita sebelum (16,800) dan sesudah (22,733) Pokja melakukan intervensi pelayanan dan perlindungan anak balita terlantar TKW. Berdasarkan analisis melalui uji t-test (N=30) dari ketiga lokasi tentang kondisi anak balita TKW yang dilihat dari kebutuhan fisik dapat dikatakan efektif, karena terjadi peningkatan tentang kondisi anak balita TKW sebelum dan sesudah dilakukan pemberdayaan kepada keluarga miskin TKW. Intervensi oleh Pokja seperti meningkatnya kebutuhan fisik seperti pemenuhan ASI eksklusif (0-6 bulan) dan ASI lanjutan sampai dengan 2 tahun, pemenuhan gizi pengganti dan asupan gizi pada anak balita TKW. Demikian juga peningkatan keterpenuhan kesehatan melalui pemeriksaan kesehatan di puskesmas, posyandu dan perhatian bila anak sakit, pemberian imunisasi dan pemantauan tumbuhkembang anak. Melihat data di atas dapat disimpul-

kan bahwa intervensi (model) melalui Pokja mampu memberdayakan keluarga TKW.

- b. **Kondisi Psikis Anak Balita TKW:** (1) Amatan hasil analisis keterpenuhan kebutuhan psikis anak balita TKW di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan uji t-test (N=30), hasilnya adalah $t=-20,528$ dengan $p=0$ ($p<0,01$), artinya hipotesa diterima, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rerata (mean) pada keterpenuhan kebutuhan psikis pada anak balita tenaga kerja wanita sebelum (10,200) dan sesudah (15,933) Pokja melakukan intervensi pelayanan dan perlindungan anak balita terlantar TKW. (2) Amatan hasil analisis keterpenuhan kebutuhan psikis anak balita TKW di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan uji t-test (N=30), hasilnya adalah $t=-32,202$ dengan $p=0$ ($p<0,01$), artinya hipotesa diterima, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rerata (mean) pada keterpenuhan kebutuhan psikis pada anak balita tenaga kerja wanita sebelum (10,367) dan sesudah (18,767) Pokja melakukan intervensi pelayanan dan perlindungan anak balita terlantar TKW. (3) Amatan hasil analisis keterpenuhan kebutuhan psikis anak balita TKW di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan uji t-test (N=30), hasilnya adalah $t=-9,855$ dengan $p=0$ ($p<0,01$), artinya hipotesa diterima, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rerata (mean) pada keterpenuhan kebutuhan psikis pada anak balita tenaga kerja wanita sebelum (11,000) dan sesudah (16,400) Pokja melakukan intervensi pelayanan dan perlindungan anak balita terlantar TKW. Analisis di atas dapat dimaknai bahwa model yang diterapkan efektif, artinya mampu meningkatkan kondisi anak balita TKW dari segi psikis melalui pemberdayaan keluarga TKW sebelum dan sesudah intervensi dari pokja. Adapun peningkatan tersebut antara lain keterpenuhan perhatian ayah terhadap perkembangan anaknya, juga meningkatnya perhatian orangtua pengganti terhadap perkembangan anak. Keterpenuhan kasih sayang dan rasa aman dari ayah maupun orangtua pengganti.

c. Kondisi sosial anak balita TKW: (1)

Amatan hasil analisis keterpenuhan kebutuhan sosial anak balita TKW di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan uji t-test (N=30), hasilnya adalah $t=-33,103$ dengan $p=0$ ($p<0,01$), artinya hipotesa diterima, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rerata (mean) pada keterpenuhan kebutuhan sosial pada anak balita tenaga kerja wanita sebelum (13,500) dan sesudah (21,167) Pokja melakukan intervensi pelayanan dan perlindungan anak balita terlantar TKW. (2) Amatan hasil analisis keterpenuhan kebutuhan sosial anak balita TKW di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan uji t-test (N=30), hasilnya adalah $t=-38,667$ dengan $p=0$ ($p<0,01$), artinya hipotesa diterima, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rerata (mean) pada keterpenuhan kebutuhan sosial pada anak balita tenaga kerja wanita sebelum (12,533) dan sesudah (23,833) Pokja melakukan intervensi pelayanan dan perlindungan anak balita terlantar TKW. (3) Amatan hasil analisis keterpenuhan kebutuhan sosial anak balita TKW di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan uji t-test (N=30), hasilnya adalah $t=-12,639$ dengan $p=0$ ($p<0,01$), artinya hipotesa diterima, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rerata (mean) pada keterpenuhan kebutuhan sosial pada anak balita tenaga kerja wanita sebelum (12,533) dan sesudah (18,800) Pokja melakukan intervensi pelayanan dan perlindungan anak balita terlantar TKW. Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa model yang diterapkan efektif, karena mampu meningkatkan kondisi anak balita TKW dilihat dari keterpenuhan kebutuhan sosial melalui pemberdayaan keluarga TKW sebelum dan sesudah intervensi dari pokja. Peningkatan tersebut di lapangan dapat dilihat dalam terciptanya hubungan anak balita dengan ayah, ibu, dan orangtua pengganti, adanya kesempatan bermain dengan teman sebaya, keterpenuhan pendidikan melalui ayah atau orangtua pengganti dan mengikutkan anak balita pada kegiatan pendidikan anak usia dini (PAUD).

5. Analisis Efektivitas Model untuk Penerima Manfaat: Keluarga TKW (pemberdayaan keluarga TKW)

- a. Keberdayaan keluarga TKW dilihat dari tingkat pengetahuan dan wawasan tentang pentingnya tumbuh kembang anak: (1) Amatan hasil analisis tingkat pengetahuan dan wawasan tentang pentingnya tumbuh kembang anak pada keluarga TKW di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat. Hasil analisis $t=-19,947$ dengan $p=0$ ($p<0,01$) atau signifikan. Artinya hipotesa diterima, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rerata (mean) pada tingkat pengetahuan dan wawasan keluarga TKW tentang pentingnya tumbuh kembang anak balita sebelum (11,700) dan sesudah (26,700) Pokja melakukan intervensi pelayanan dan perlindungan anak balita terlantar TKW. (2) Amatan hasil analisis tingkat pengetahuan dan wawasan tentang pentingnya tumbuh kembang anak pada keluarga TKW di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Hasil analisis $t=-21,067$ dengan $p=0$ ($p<0,01$) atau signifikan. Artinya hipotesa diterima, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rerata (mean) pada tingkat pengetahuan dan wawasan keluarga TKW tentang pentingnya tumbuh kembang anak balita sebelum (14,500) dan sesudah (26,733) Pokja melakukan intervensi pelayanan dan perlindungan anak balita terlantar TKW. (3) Amatan hasil analisis tingkat pengetahuan dan wawasan tentang pentingnya tumbuh kembang anak pada keluarga TKW di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Barat. Hasil analisis $t=-17,971$ dengan $p=0$ ($p<0,01$) atau signifikan. Artinya hipotesa diterima, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rerata (mean) pada tingkat pengetahuan dan wawasan keluarga TKW tentang pentingnya tumbuh kembang anak balita sebelum (15,067) dan sesudah (23,033) Pokja melakukan intervensi pelayanan dan perlindungan anak balita terlantar TKW.

Berdasarkan analisis di atas dari tiga lokasi tentang model yang diterapkan efektif karena mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan keluarga TKW tentang pen-

tingnya tumbuh kembang anak sebelum dan sesudah intervensi pokja. Peningkatan tersebut di lapangan dapat dilihat antara lain pengetahuan keluarga TKW tentang pentingnya ASI eksklusif dan ASI lanjutan bagi anak balita, pentingnya pemberian imunisasi bagi anak balita, pentingnya memperhatikan perkembangan kesehatan maupun makanan tambahan bagi anak balita, cara mengasuh anak dan pentingnya pendidikan anak usia dini (PAUD).

- b. Keberdayaan keluarga TKW dilihat dari tingkat pengetahuan dan wawasan tentang pentingnya peran dan fungsi keluarga: (1) Amatan hasil analisis tingkat pengetahuan dan wawasan tentang pentingnya tumbuh kembang anak pada keluarga TKW di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat. Hasil analisis $t=-19,450$ dengan $p=0$ ($p<0,01$) atau sangat signifikan. Artinya hipotesa diterima, kesimpulannya bahwa ada perbedaan rerata (mean) pada tingkat pengetahuan dan wawasan keluarga TKW tentang pentingnya peran dan fungsi keluarga sebelum (10,867) dan sesudah (23,667) Pokja melakukan intervensi pelayanan dan perlindungan anak balita terlantr TKW. (2) Amatan hasil analisis tingkat pengetahuan dan wawasan tentang pentingnya tumbuh kembang anak pada keluarga TKW di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat. Hasil analisis $t=-21,718$ dengan $p=0$ ($p<0,01$) atau sangat signifikan. Artinya hipotesa diterima, kesimpulannya bahwa ada perbedaan rerata (mean) pada tingkat pengetahuan dan wawasan keluarga TKW tentang pentingnya peran dan fungsi keluarga sebelum (12,733) dan sesudah (21,300) Pokja melakukan intervensi pelayanan dan perlindungan anak balita terlantr TKW. (3) Amatan hasil analisis tingkat pengetahuan dan wawasan tentang pentingnya tumbuh kembang anak pada keluarga TKW di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah. Hasil analisis $t=-15,827$ dengan $p=0$ ($p<0,01$) atau sangat signifikan. Artinya hipotesa diterima, kesimpulannya bahwa ada perbedaan rerata (mean) pada tingkat pengetahuan dan wawasan keluarga TKW tentang pentingnya peran dan fungsi keluarga sebelum (14,700) dan sesudah (21,533) Pokja melakukan intervensi pelayanan dan perlindungan anak balita terlantr TKW.
- Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan model pelayanan dan perlindungan sosial anak balita terlantr efektif karena mampu memberdayakan keluarga TKW yang dapat dilihat dalam peningkatan pengetahuan dan wawasan tentang peran dan fungsi keluarga sebelum dan sesudah intervensi dari pokja. Adapun peningkatan tersebut di lapangan dapat dilihat dalam hal pengetahuan keluarga TKW tentang pentingnya jarak kelahiran, pentingnya memberikan budipekerti pada anak balita, pentingnya memberi rasa aman dan nyaman pada anak balita, pentingnya memberikan kesempatan bermain dengan teman sebaya, pentingnya peran dan fungsi keluarga dan pentingnya memiliki penghasilan tetap agar dapat mencukupi kebutuhan anak balita.
- c. Keberdayaan keluarga TKW dilihat dari upaya-upaya keluarga TKW dalam mencegah keterlantaran anak: (1) Amatan hasil analisis upaya keluarga TKW dalam mencegah keterlantaran anak balita di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat. Hasil analisis $t=-16,707$ dengan $p=0$ ($p<0,01$) atau sangat signifikan. Artinya hipotesa diterima, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rerata (mean) pada upaya-upaya keluarga TKW dalam mencegah keterlantaran anak balita TKW sebelum (17,767) dan sesudah (29,700) Pokja melakukan intervensi pelayanan dan perlindungan anak balita terlantr TKW. (2) Amatan hasil analisis upaya keluarga TKW dalam mencegah keterlantaran anak balita di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Hasil analisis $t=-22,267$ dengan $p=0$ ($p<0,01$) atau sangat signifikan. Artinya hipotesa diterima, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rerata (mean) pada upaya-upaya keluarga TKW dalam mencegah keterlantaran anak balita TKW sebelum (16,233) dan sesudah (28,167) Pokja melakukan intervensi pelayanan dan perlindungan anak balita terlantr TKW. (3) Amatan hasil analisis upaya keluarga

TKW dalam mencegah keterlantaran anak balita di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah. Hasil analisis $t=-10,015$ dengan $p=0$ ($p<0,01$) atau sangat signifikan. Artinya hipotesa diterima, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rerata (mean) pada upaya-upaya keluarga TKW dalam mencegah keterlantaran anak balita TKW sebelum (19,367) dan sesudah (27,067) Pokja melakukan intervensi pelayanan dan perlindungan anak balita terlantar TKW.

Berdasarkan analisis di atas dapat dimaknai untuk disimpulkan bahwa penerapan model pelayanan dan perlindungan sosial anak balita terlantar efektif karena mampu memberdayakan keluarga TKW yang dapat dilihat dalam peningkatan upaya-upaya keluarga TKW dalam mencegah terjadinya keterlantaran pada anak balita TKW. Peningkatan-peningkatan tersebut di lapangan dapat dilihat antara lain dalam keluarga TKW menganjurkan pemberian ASI eksklusif, ASI lanjutan dan memberi susu pengganti bila anak balita ditinggal ibunya bekerja, memberikan asupan gizi berupa makanan tambahan dan pemberian imunisasi lengkap kepada anak balita, membawa ke puskesmas secepatnya bila anak sakit, memberi kasih sayang, rasa aman pada anak balita, membawa rutin anak ke posyandu dan mengikutkan anak dalam kegiatan PAUD.

- 6. Faktor Pendukung dan Penghambat:** dalam pengaplikasian model pelayanan dan perlindungan sosial anak balita TKW yang didasarkan pada analisis SWOT (*strength/kekuatan, weakness/kelemahan, opportunity/peluang, dan threat/ancaman*), ditemukan delapan faktor, baik sebagai pendukung maupun penghambat.

Pertama, Masyarakat sebagai faktor pendukung, yaitu adanya keaktifan masyarakat (tokoh masyarakat dan LSM) untuk melaporkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi anak balita termasuk anak balita TKW, kepercayaan masyarakat untuk melapor kepada lembaga yang berwenang menangani permasalahan yang dihadapi anak balita/anak balita TKW, kesadaran

masyarakat untuk mengikuti kegiatan yang diadakan instansi terkait/non-instansi tentang pentingnya peran dan fungsi keluarga bagi tumbuhkembang anak agar tercegah dari keterlantaran. Sebagai faktor penghambat, yaitu kurangnya dukungan dari masyarakat, sehingga menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran dan fungsi keluarga bagi tumbuhkembang anak agar anak tercegah dari segala keterlantaran.

Kedua, responden (sasaran garap) yaitu keluarga TKW yang mempunyai anak balita TKW, sebagai faktor pendukung, yaitu keterbukaan memberikan informasi tentang permasalahan yang sedang dihadapi keluarga, keaktifan sasaran garap dalam mengikuti proses penanganan. Sebagai faktor penghambat yaitu ketidaktahuan dalam memberikan informasi tentang permasalahan yang sedang dihadapi keluarga, ketidaksesuaian pemanfaatan bantuan dengan yang diharapkan serta kurangnya kesadaran sasaran garap untuk mengatasi masalahnya sendiri (kurang aktif).

Ketiga, sumber dana, sebagai faktor pendukung yaitu dalam bentuk adanya swadaya, iuran pengurus dan dana tidak mengikat. Sebagai faktor penghambat, yaitu luas wilayah yang perlu ditangani tidak sesuai dengan ketersediaan sumber dana yang ada, sehingga sumber dana belum dapat menjangkau secara keseluruhan permasalahan yang dihadapi anak balita.

Keempat, sumber daya manusia, sebagai faktor pendukung yaitu adanya relawan sosial yang membantu penanganan permasalahan yang dihadapi anak balita (keterlantaran anak), dan bekerja tanpa bayaran. Sebagai faktor penghambat, yaitu terbatasnya kualifikasi sumber daya manusia yang berkompeten dalam menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi anak balita.

Kelima, *Networking/Jejaring/Kolaborasi*, sebagai faktor pendukung yaitu adanya kerjasama baik dengan instansi terkait maupun Orsos/LSM dalam penanganannya. Sebagai faktor penghambat yaitu kurangnya koordi-

nasi antar instansi terkait dan LSM/Orsos dalam penanganan permasalahan yang dihadapi anak balita, belum adanya kolaborasi anggaran dalam penanganan permasalahan yang dihadapi anak balita antara instansi/pemerintah terkait dan LSM, kegiatan masih dilakukan sendiri-sendiri menurut kemampuan anggaran masing-masing.

Keenam, kemitraan, sebagai faktor pendukung, adanya komitmen dari tokoh masyarakat, instansi terkait, dan LSM terhadap permasalahan yang dihadapi anak balita. Keenam, birokrasi penanganan, sebagai faktor penghambat adanya birokrasi yang berbelit-belit dalam penanganan masalah dan perbedaan aturan/kebijakan dalam penanganan, kurang adanya evaluasi dan monitoring dari pemerintah/instansi terkait terhadap kegiatan yang telah dilakukan sehingga kurang atau tidak adanya tanggung jawab dari sasaran garap.

Ketujuh, kebijakan/perda, belum adanya perda dalam penanganan permasalahan yang dihadapi anak balita TKW dan terbatasnya anggaran menyebabkan penanganan permasalahan yang dihadapi anak balita TKW belum merata dan belum sesuai dengan yang diharapkan.

Kedelapan, keakuratan sumber data. Sumber data yang tidak akurat dapat menjadi faktor penghambat dalam penanganan.

E. Penutup

Kesimpulan: Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan hal-hal berikut sebagai temuan di tiga lokasi penelitian. Model Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak Balita Tenaga Kerja Wanita (TKW) melalui pemberdayaan keluarga miskin TKW yang diujicobakan bersifat akseptabel, aplikabel, dan efektif, artinya model tersebut dapat diterima dan dapat diterapkan oleh sasaran garap yaitu instansi terkait, pokja dan masyarakat, pokja mampu melaksanakan dan hasilnya terjadi peningkatan dalam upaya pelayanan dan perlindungan sosial anak balita. Faktor pendukung dalam pengaplikasian model pelayanan dan perlindungan sosial anak balita adalah adanya dukungan sasaran garap dari instansi terkait dan pokja untuk menerapkan

dan melaksanakan model tersebut, serta dukungan masyarakat yaitu keluarga TKW yang menjadi sasaran model tersebut. Sedangkan faktor penghambatnya adalah belum adanya dukungan perda khususnya dalam penanganan permasalahan yang dihadapi anak balita TKW, rendahnya tingkat pengetahuan dan wawasan masyarakat, dan belum adanya data jumlah anak balita TKW.

Rekomendasi: Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas direkomendasikan, Model yang telah teruji keefektifan, akseptabilitas dan aplikabilitasnya agar disosialisasikan ke Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial RI. Untuk mendapatkan model pelayanan dan perlindungan sosial anak balita TKW yang standart dan dapat diterapkan di berbagai wilayah masih diperlukan diseminasi terhadap model tersebut, diperlukan data base jumlah anak balita TKW untuk memudahkan pemberian pelayanan dan perlindungan sosial guna mencegah terjadinya keterlantaran.

Pustaka Acuan

- Aritonang, I dan Hartini, T.H.N.S. (2006). *Masih Lebih Banyak Bayi yang Tidak diberi ASI Eksklusif* (on line). <http://www.bkkbn.or.id>
- Ayu Pratiwi. (2009). *Efektivitas Pelatihan Dinamika Kelompok dengan Metode Out Bound Training terhadap Peningkatan Komitmen Organisasi Karang Taruna*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM
- Endro Winarno, dkk. (2001). *Ujicoba Pola Pengentasan Keluarga Miskin Berbasis Masyarakat di Propinsi Lampung*. Yogyakarta: B2P3KS
- Erika Hargyarti Purwandari. (2004). *Peran Faktor Internal dan Eksternal terhadap Keberhasilan Pemberian ASI Eksklusif*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM
- Fasli Jalan dan Nina Sardjunani. (1996). *Beberapa Penanganan Kualitas Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Rapat Konsultasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Departemen Sosial RI

- George R. Terry. (2003). *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ikawati, dkk. (2010). *Pengkajian Pola Keswadayaan Masyarakat Desa dalam Pendayagunaan Sumber Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: B2P3KS.
- Istiana Hermawati, dkk. (2004). *Pengkajian Pola Keswadayaan Masyarakat Desa dalam Pendayagunaan Sumber Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: B2P3KS.
- Indira Supit, M.C; Hidayat D.D.I, Rosmin, IS. (2002). *Kiat Sukses Menyusui*. Seri Ayahbunda. Jakarta: PT. Aspirasi Pemuda
- Kartini Kartono. 1990. *Psikologi Anak*. Bandung: C.V. Mandar Maju
- Kumala Raras. NBK. (2009). *Dinamika Motivasi dan Nilai Kader Posyandu di Desa Pakembinangun Sleman* Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM
- Martono dan Ramdhani. (1996). *Kohesivitas Kelompok pada Masyarakat Miskin*. Yogyakarta: UGM
- Mubyarto. (1984). *Strategi Pengembangan Pedesaan*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Pedesaan dan Kawasan: Yayasan Obor Indonesia.
- _____. (1994). *Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Pedesaan dan Kawasan: UGM
- Nyi R. Irmayani Soeriatmadja. (2002). *Kohesitas Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pada Masyarakat Miskin Ditinjau dari Komunikasi Interpersonal dan Penyesuaian Diri*. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UGM
- Pasaribu dan Simanjuntak. 1982. *Sosiologi Pembangunan*. Bandung: Tarsito
- Rachmanto, W. (1998). *Perlindungan Kesejahteraan Anak dari Perlakuan Salah Seksual*. Majalah Informasi No. 8. Jakarta: Litbang Kesos Depsos RI
- Rismisari Handayani. (2009). *Pengaruh Pelatihan Kolaborasi untuk Menurunkan Prasangka Antar Unit Kerja*. Yogyakarta: Program Magister Profesi Psikologi. Fakultas Psikologi UGM
- Santrock, J.W. (1995). *Life Span Development Jilid I* (terjemahan: Chusairi dan Damanik). Jakarta: Erlangga
- Sayogyo. (1997). *Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan*. Jakarta: LP3ES
- Silvi Dawayani, dkk. (2000). *Ujicoba Pelatihan Penyesuaian Diri Mahasiswa Baru Fakultas Psikologi UGM*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM
- Soetarlinah Sukadji. (1986). *Keluarga dan Keberhasilan Pendidikan-an*. Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia
- STKS. (2005). *Manual Praktek Teknologi Pengembangan Masyarakat*. Bandung Jurusan Pengembangan Sosial Masyarakat STKS
- Sularso, St. (2000). *Seandainya Aku Bukan Anakmu*. Jakarta: Kompas
- Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih. (2004). *Modul Seri Program Statistik (SPS)*. Yogyakarta: UGM
- Totok Mardikanto. (2003). *Redeffinisi dan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian*. Sukoharjo: Puspa
- Totok Mardikanto dan Purwaka. 2006. *Pengembangan Badan Otorita UMKM untuk Menanggulangi Kaum Dhuafa*. diskusi. Palu: 7 September 2006
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*
- Vredenburght. Jacob. (1983). *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia
- Kompas. (2000). *ASI Tak Tergantikan Susu Formula*. 12 Agustus 2000 diakses dari w.w.w Kcm. com
- _____. (2001). *Perusahaan dan Tempat Umum Perlu Dukung ASI Eksklusif*. 6 September 2001 diakses dari w.w.w. Kcm. com

5

Implementasi Model Pelayanan dan Perlindungan Sosial Balita TKW Keluarga Miskin pada Forum Tunas Pelangi di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur

The Implementation of Protection and Social Service Model on Children Underfive in Poor Women Labors Families at Tunas Pelangi Forum Malang Regency, East Java Province.

Chatarina Rusmiyati

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Jl Kesejahteraan Sosial No 1 Nitipuran, Yogyakarta. Telp. (0274) 377265, Fax (0274) 373530. Badiklit Kesos Kementerian Sosial RI, email: <cathy.mami@yahoo.com>. Diterima 31 Juli 2013, direvisi 9 September 2013, disetujui 11 Oktober 2013.

Abstract

Social service and protection model on children underfive in poor women labor families is the implementation model of social service and protection to prevent any children underfive in poor women labor family form being neglected. The model was experimented in Donomulyo district, Malang Regence, East Java. The experimental subjects were 30 persons representing individual, societal group, non-government organization, and related institution having commitment on children underfive problems. The result showed that social service and protection model (through Tunas Pelangi Forum) could effectively prevent children underfive from negligence. That can be seen from Tunas Pelangi Forum action planning on early childhood education program (PAUD), especially through a class for children underfive in poor labor family area. PAUD activities accommodate children underfive of poor women labor family having no sibling from heir parents. The forum gives an oriented place and educational facility under social guidance and supervision, and nutritious foods supplement. The forum also gives social guidance to their parents and surrogate parents on the importance of family role and function for children growth and development. It is recommended that local government should legalize any existence of forum (support, enhance, establish, train) for the sake of professionalism on social service and protection on children underfive. Setting joint network with related institutions on neglected children underfive service and protection. The model can be disseminated in other areas according to its own character and condition.

Keywords:

Children Underfive-Social Service and Protection-Forum

Abstrak

Forum Pelayanan Perlindungan Sosial Anak Balita Tunas Pelangi merupakan implementasi model pelayanan perlindungan sosial untuk mencegah terjadinya keterlantaran anak balita TKW pada keluarga miskin. Model diujicobakan di Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang Jawa Timur. Sasaran ujicoba ditentukan sebanyak 30 orang yang mewakili baik perorangan, kelompok masyarakat, organisasi sosial/LSM maupun instansi terkait yang peduli pada masalah anak balita. Hasil ujicoba menunjukkan, bahwa model pelayanan perlindungan sosial anak balita TKW melalui pembentukan Forum Tunas Pelangi efektif dapat mencegah terjadinya keterlantaran pada anak. Hal tersebut dapat dilihat dari terlaksananya rencana aksi Forum Tunas Pelangi berupa pembentukan kelas PAUD khusus anak balita terlantar TKW. Kegiatan PAUD mewadahi anak balita TKW yang tidak mendapat asuhan dari orangtua. Mereka memperoleh tempat dan sarana pembelajaran yang lebih terarah di bawah pengawasan pendamping, serta tambahan makanan bergizi. Forum juga memberikan penyuluhan dan bimbingan sosial bagi orangtua/wali asuh anak tentang pentingnya peran dan fungsi keluarga untuk memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, diharapkan agar pemerintah daerah dapat melegalkan keberadaan forum, mendukung, dan melakukan pembinaan melalui pelatihan dalam rangka meningkatkan profesionalisme forum. Melakukan kerjasama dan jejaring dengan berbagai pihak yang peduli pada pelayanan dan perlindungan terhadap anak balita terlantar. Model dapat dikembangkan di wilayah lain sesuai karakteristik kondisi dan situasi wilayah masing-masing.

Kata Kunci:

Pelayanan dan Perlindungan Sosial-Anak Balita-Forum

A. Pendahuluan

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dipersiapkan sejak dini agar dapat tumbuh berkembang secara wajar dan optimal.

Hal tersebut didasari oleh pemahama, bahwa masa anak merupakan periode strategis sekaligus kritis. Strategis karena masa ini merupakan periode peka bagi anak untuk memperoleh

stimulan dan pembelajaran yang memungkinkan anak dikondisikan untuk memperoleh keberhasilan di dalam kelompoknya. Kritis karena bila terjadi salah asuh dapat menyebabkan gangguan pada perkembangan anak selanjutnya. Masa usia dini dikatakan sebagai periode emas (*golden age*) bagi perkembangan anak untuk memperoleh proses pendidikan. Pendidikan pada usia dini sangat penting dan merupakan tahun yang berharga bagi anak untuk mengenali, mendapatkan berbagai macam fakta di lingkungannya sebagai stimulan perkembangan kepribadian, psikomotor, kognitif, dan sosial.

Undang-undang RI No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan, bahwa anak merupakan potensi sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu anak perlu dijamin pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar baik secara fisik, psikis, dan sosial baik selama dalam kandungan maupun setelah dilahirkan agar kelak dapat menjadi generasi penerus yang berkualitas. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual dan sosial. Mengingat pentingnya posisi anak, sudah selayaknya kita memperhatikan kebutuhan anak termasuk kebutuhan pelayanan dan perlindungan sosial agar anak tidak mengalami keterlantaran, dapat tumbuh berkembang secara wajar, dan dapat melaksanakan fungsi sosial.

Dampak krisis ekonomi di Indonesia menyebabkan semakin banyak keluarga yang mengalami permasalahan sosial sebagai akibat kehilangan pekerjaan. Kemiskinan dan keterbatasan lapangan pekerjaan di setiap wilayah, semakin menambah jumlah keluarga yang mengalami keterpurukkan, sehingga peran dan fungsi keluarga menjadi terabaikan. Berbagai cara dilakukan masyarakat untuk dapat tetap bertahan hidup, salah satunya dengan mencari pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga baik di dalam maupun di luar negeri antara lain menjadi tenaga kerja wanita (TKW). Bagi keluarga yang mempunyai anak balita, hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan tersendiri. Anak balita yang ditinggal ibu bekerja bahkan ke luar

negeri, rawan mengalami keterlantaran karena dikhawatirkan anak menjadi kurang terpenuhi kebutuhan fisik, psikis, dan sosial, yang pada akhirnya berdampak pada kondisi anak balita. Akibat lebih lanjut anak tidak memperoleh perawatan sebagaimana mestinya dan mengalami keterlantaran, sehingga tumbuhkembang anak menjadi terhambat. Anak balita yang mengalami keterlantaran perlu mendapatkan penanganan secara serius agar kebutuhan fisik, psikis, sosial terpenuhi sesuai dengan haknya. Pusat Data dan Informasi Kemensos RI menyebutkan bahwa balita terlantar di Indonesia hingga tahun 2010 berjumlah sebanyak 1.186.941 anak (Pusdatin, 2010).

Hasil kajian yang dilakukan B2P3KS Yogyakarta tentang Kebutuhan dan Perlindungan Balita Terlantar Tenaga Kerja Wanita (TKW) di lima provinsi, yaitu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah menunjukkan, bahwa ketidakterpenuhan kebutuhan fisik, psikis, dan sosial pada anak balita TKW menyebabkan terjadinya keterlantaran secara fisik, psikis, dan sosial. Keterlantaran tersebut mengakibatkan tumbuhkembang anak balita menjadi terhambat, sehingga berdampak pada kondisi anak balita baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Penyebab terjadinya keterlantaran antara lain kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, rendahnya upaya yang dilakukan keluarga, masyarakat dan instansi terkait pada tahap pencegahan, rehabilitasi dan pembinaan lanjut, kurangnya tindakan khusus menangani anak balita terlantar TKW, rendahnya pengetahuan keluarga TKW dan masyarakat tentang tumbuhkembang anak, usaha kesejahteraan sosial, pola hidup bersih sehat, pemanfaatan remitan, peran dan fungsi keluarga, rendahnya kepedulian masyarakat terhadap anak balita terlantar TKW, dan kurang adanya aksi yang kondusif dari LSM, Orsos, instansi terkait secara terpadu dan sistematis dalam usaha kesejahteraan sosial bagi anak balita terlantar TKW. Berdasarkan hasil penelitian pengkajian tersebut, direkomendasikan suatu Konsep Model Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak Balita Tenaga Kerja Wanita (TKW) pada Keluarga Miskin. untuk mengetahui kelayakan model yang telah disusun dilakukan

ujicoba terhadap model tersebut dengan tujuan agar model yang dihasilkan efektif mampu mencegah terjadinya keterlantaran.

Berdasar latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah Apakah Model Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak Balita Tenaga Kerja Wanita Pada Keluarga Miskin, melalui pembentukan Forum Tunas Pelangi efektif mampu mencegah terjadinya keterlantaran anak?. Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk memperoleh model pelayanan dan perlindungan sosial anak balita tenaga kerja wanita yang efektif, yakni dapat mencegah terjadinya keterlantaran anak balita TKW pada keluarga miskin. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan alternatif pedoman dalam pengembangan program pelayanan dan perlindungan anak balita terlantar khususnya anak balita TKW pada Kementerian Sosial dan berbagai pihak terkait lainnya. Selain itu untuk menambah khasanah pustaka, khususnya tentang pelayanan dan perlindungan bagi anak balita terlantar.

B. Kajian Teori

Pengertian anak terlantar adalah anak (termasuk balita terlantar) yang karena suatu sebab orangtuanya melalaikan dan atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi secara wajar baik jasmani, rohani, dan sosial (Departemen Sosial, 2003). Anak balita terlantar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak terlantar (laki-laki atau perempuan) berusia kurang dari 5 tahun; Anak yatim piatu atau yatim piatu dari keluarga tidak mampu (miskin) yang orangtua bekerja sebagai TKW; Balita yang diasuh oleh salah satu anggota keluarga, orangtua (kakek-nenek), saudara atau tetangga (kerabat)..

Anak terlantar atau anak balita terlantar memerlukan perawatan/pengasuhan, pemenuhan kebutuhan dan perlindungan sosial dari keluarga dan berbagai pihak termasuk masyarakat, pemerintah, LSM, dan dunia usaha. Pemenuhan kebutuhan pelayanan, pengasuhan dan perlindungan balita terlantar dapat dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang terorganisir, terprogram, terencana, sistematis, dan profesional

sehingga dapat tercapai hasil yang optimal sesuai dengan hak anak serta anak dapat tumbuh-kembang secara wajar.

Demi kelangsungan hidup sebuah generasi, ada satu tuntutan sekaligus harapan, bahwa kelak ketika dewasa mereka akan menjadi generasi bangsa yang handal dan berhasil meraih cita-cita yang diimpikan. Oleh karena itu, kasih sayang dan perhatian dari orangtua sangat penting dalam menyiapkan generasi yang handal tersebut. Salah satu wujud perhatian tersebut dengan memberikan asupan gizi yang baik pada si buah hati. Hal tersebut dengan pertimbangan, bahwa kekurangan gizi pada masa pertumbuhan akan dapat menyebabkan turunya daya tahan tubuh sehingga bayi dan anak balita akan lebih mudah terserang berbagai penyakit infeksi yang bisa menyebabkan kematian. Sementara itu dampak kekurangan gizi dalam jangka panjang dapat berakibat pada rendahnya kualitas sumberdaya manusia.

Tahun pertama hingga ketiga usia anak merupakan periode emas kehidupan anak untuk bertumbuh dan berkembang. Pada usia tersebut, anak sedang dalam proses membentuk dirinya. Pengembangan kognisi serta emosi pada usia dini merupakan fondasi atau dasar paling hakiki bagi anak. Peran orangtua pada masa ini sangat penting, mulai dari pemberian nutrisi yang lengkap dan seimbang, hingga membantu anak mencapai perkembangan mental dan daya kognisi yang optimal. Selain itu kesehatan dan gizi merupakan aspek yang sangat penting dan perlu diperhatikan dalam masa tumbuh kembang anak. Penelitian yang dilakukan Ernesto Pollitt dkk menyatakan, bahwa pemberian makanan yang sehat dan cukup protein, akan mempengaruhi perkembangan kognitif anak selanjutnya. Selain itu, apa yang anak makan juga ikut mempengaruhi irama pertumbuhan, ukuran badan dan ketahanan terhadap berbagai penyakit (Santrock, 1995).

Orang tua dan orang yang terdekat dengan kehidupan anak, memberi pengaruh sangat besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Hasil penelitian yang dilakukan *The Reinier Foundation*, menyebutkan ada 10 hal yang dapat dilakukan orang tua untuk dapat meningkatkan status kesehatan dan perkembangan

otak. Hal itu dilakukan dengan cara memberi pengalaman langsung dengan menggunakan inderanya (penglihatan, pendengaran, perasa, peraba, penciuman), interaksi melalui sentuhan, pelukan, senyuman, nyanyian, mendengarkan dengan penuh perhatian, menanggapi ocehan anak, mengajak bercakap-cakap dengan suara yang lembut, dan memberikan rasa aman. Sentuhan-sentuhan tersebut sangat membantu dalam menstimulasi otak dan menghasilkan hormon yang diperlukan dalam perkembangan (Nancy Boyd Webb. 2009).

Bertitik tolak dari hal ini, pendidikan dalam kerangka pembentukan kebiasaan berpikir dan bertindak anak harus mensinergikan berbagai aspek tumbuh kembang anak. Aspek-aspek tumbuh kembang anak yang harus dikembangkan mencakup aspek perkembangan: keimanan dan ketaqwaan; budi pekerti; perkembangan sosial-emosional; disiplin; kemampuan berbahasa dan berkomunikasi; daya pikir; perkembangan seni dan kreativitas; kesehatan jasmani, termasuk fisik. Pengelompokkan aspek-aspek tumbuh kembang sebagaimana disebutkan di atas adalah untuk mempermudah pengukuran hasil belajar dalam upaya pembentukan kebiasaan berpikir dan bertindak sebagai hasil dari proses pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan. Kebiasaan berpikir dan bertindak sebagai refleksi dari sejumlah kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar perlu dilakukan sejak tahun pertama kehidupan anak.

Kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik adalah kebutuhan fisik (asuh), meliputi pangan/gizi dan perawatan kesehatan dasar (imunisasi, pemberian ASI, penimbangan badan, pengobatan bila sakit), papan/pemukiman yang layak dan sandang. Kebutuhan emosi/kasih sayang (asih), yaitu diperlukannya ikatan dan kepercayaan yang kuat antara orang tua dan anak untuk menjamin tumbuh kembang yang seimbang secara fisik, mental dan sosial. Kekurangan kasih sayang ibu pada tahun pertama kehidupan anak mempunyai dampak negatif terhadap tumbuh kembang. Kebutuhan akan stimulan mental (asah, pengembangan kepribadian), seperti kecerdasan, keterampilan, kemandirian, kreativitas, agama, kepribadian,

moral etika dan produktivitas. Anak yang memperoleh asuh, asih dan asah yang baik dan memadai akan mengalami tumbuh kembang yang optimal sesuai dengan potensi genetik yang dimilikinya.

Kegagalan dalam proses pemenuhan kebutuhan di atas akan berdampak negatif pada pertumbuhan fisik dan perkembangan intelektual, mental dan sosial anak. Anak akan mengalami kerentanan fisik akibat gizi dan kualitas kesehatan yang buruk, juga akan mengalami hambatan mental, lemah daya nalar, bahkan perilaku-perilaku maladaptif, seperti autisme, nakal, sukar diatur, yang bisa mendorong mereka menjadi manusia tidak normal dan pelaku kriminal.

Freeman (dalam Soetarlinah Sukadji, 1986) mengungkapkan, bahwa banyak hambatan dialami oleh keluarga yang ibunya bekerja, terutama pada golongan miskin. Meskipun mereka mendapatkan pekerjaan tetapi penghasilannya rendah, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidupnya pun masih sangat kurang. Bagi keluarga yang memiliki anak balita akan mengalami keterlantaran karena ditinggal ibu bekerja, kondisi ini tentu akan berdampak pada ketidakterpenuhan kebutuhan dasar dan hak-hak anak sehingga tumbuh kembang anak menjadi tidak wajar dan kurang optimal. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain telah mengisyaratkan bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut maka perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak dan adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989 menyebutkan ada empat hak anak: Pertama, hak kelangsungan hidup (*survival right*), adalah hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan terbaik agar terhindar dari beberapa penyakit infeksi yang mematikan. Kedua, hak berkembang (*development right*), yaitu hak anak akan pemberian gizi dan pendidikan yang baik serta lingkungan sosial budaya yang memungkinkan anak berkembang sebagai manusia dewasa yang beridentitas dan bermartabat. Ketiga, hak memperoleh perlindungan (*protection right*), yaitu hak anak dalam memperoleh perlindungan dari berbagai diskriminasi dan berbagai tindak kekerasan baik oleh masyarakat, ideologi, politik, agama maupun kondisi fisik. Keempat, hak untuk berpartisipasi dalam berbagai keputusan yang menyangkut kepentingan hidupnya (Yustika S.B dalam Sularso St. 2000).

Dalam UUPA memuat prinsip hak anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak-hak Anak, menyebutkan empat prinsip dasar: Pertama, non-diskriminasi, setiap anak mempunyai hak untuk tidak dibeda-bedakan berdasarkan perbedaan latar belakang, warna kulit, ras, suku, agama, golongan, keluarga, gender, kondisi fisik dan mental. Kedua, kepentingan yang terbaik bagi anak, setiap anak berhak mendapatkan yang terbaik dalam hidupnya. Ketiga, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, setiap anak berhak untuk hidup dan berkembang normal, oleh karenanya setiap anak berhak memperoleh jaminan pertolongan, penyelamatan dan perawatan kesehatan dalam kondisi sakit, berbahaya dan mengancam jiwa, hak mendapatkan tumpangan dan makanan untuk kelangsungan hidupnya, hak memperoleh pelayanan kesehatan dalam kondisi sakit maupun sehat, hak mendapatkan perkembangan fisik dan mental termasuk pendidikan rohani, dan hak mendapatkan pengajaran hal-hal yang baik. Keempat, penghargaan terhadap pendapat anak, setiap anak berhak untuk dihargai pendapatnya dan diberikan kesempatan untuk berdiskusi/tanya jawab.

Perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam UU No 23 Tahun 2002 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkem-

bang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak tersebut harus menjadi perhatian dan tanggung jawab seluruh pihak mulai dari orangtua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Pentingnya perlindungan bagi anak karena pada masa anak (balita) terjadi perkembangan kecerdasan yang apabila tidak diperhatikan dan tidak terpenuhi akan menghambat perkembangan selanjutnya.

Berbagai kebutuhan tersebut harus dipenuhi karena anak mempunyai tugas-tugas perkembangan yang harus diselesaikan, apabila tidak terpenuhi maka akan mempengaruhi tugas-tugas perkembangan selanjutnya sehingga tumbuh kembang anak menjadi terhambat. Ada beberapa tahapan dalam tugas perkembangan tersebut. Pertama, sejak lahir sampai usia 3 tahun, anak memiliki kepekaan sensoris dan daya piker yang sudah mulai dapat "menyerap" pengalaman-pengalaman melalui sensorinya. Kedua, usia setengah tahun sampai kira-kira tiga tahun, mulai memiliki kepekaan bahasa dan sangat tepat untuk mengembangkan bahasanya (berbicara, bercakap-cakap). Ketiga, masa usia 2-4 tahun, gerakan-gerakan otot mulai dapat dikoordinasikan dengan baik, untuk berjalan maupun untuk banyak bergerak yang semi rutin dan yang rutin, berminat pada benda-benda kecil, dan mulai menyadari adanya urutan waktu (pagi, siang, sore dan malam). Keempat, rentang usia tiga sampai enam tahun, terjadi kepekaan untuk peneguhan sensoris, semakin memiliki kepekaan indrawi, khususnya pada usia sekitar empat tahun memiliki kepekaan menulis dan pada usia 4-6 tahun memiliki kepekaan yang bagus untuk membaca (Montessori dalam Ikawati, 2010).

Pendapat Montessori ini mendapat dukungan dari tokoh pendidikan Taman Siswa Ki Hajar Dewantara, yang sangat meyakini, bahwa suasana pendidikan yang baik dan tepat adalah dalam suasana kekeluargaan dan dengan prinsip asih (mengasahi), asah (memahirkan), dan asuh (membimbing). Anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik bila mendapatkan kasih sayang, pengasuhan yang penuh pengertian dan dalam situasi yang damai serta hangat.

Agar anak (balita) terhindar dari keterlantaran dan menjadi sejahtera hidupnya, maka perlu perlindungan untuk dapat tumbuh kembang baik fisik, psikis maupun sosialnya secara wajar dan optimal. Menurut Rachmanto, WL (1998) ada dua hal yang perlu diperhatikan untuk terwujudnya kesejahteraan anak, yaitu semua kegiatan diharapkan dapat menjaga anak agar dapat tumbuh dengan wajar, secara lahir batin dan bebas dari segala bentuk gangguan, hambatan dan ancaman; Mengupayakan suatu kondisi tata kehidupan anak yang dapat menjamin dengan wajar dan optimal baik jasmani, rohani maupun sosial.

Dalam UUPA disebutkan, bahwa yang berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak adalah negara dan pemerintah, masyarakat, orangtua dan keluarga. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung menghormati dan menjamin hak azasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, dan golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Negara dan pemerintah bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam menyelenggarakan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua atau wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, serta mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Sedangkan kewajiban dan tanggung jawab keluarga serta orangtua adalah mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkan-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Undang-undang penyelenggaraan perlindungan anak di bidang sosial menyebutkan,

bahwa pemeliharaan dan perawatan anak terlantar diselenggarakan oleh pemerintah. Pemeliharaan dan perawatan anak terlantar diselenggarakan agar anak dapat berpartisipasi, bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hatinurani dan agamanya, bebas menerima informasi lisan/tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak, bebas berserikat dan berkumpul, bebas beristirahat, bermain, berkreasi dan berekreasi serta memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan. Pemeliharaan dan perawatan tersebut juga diperuntukkan bagi anak balita terlantar, untuk mendapatkan kesempatan bermain, belajar, bersosialisasi, bereksplorasi, mendengarkan pendapatnya, dan mendapatkan pendidikan. Pelayanan kebutuhan anak balita terlantar sangat penting dilakukan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal.

Agar masyarakat dapat melaksanakan program pelayanan dan perlindungan sosial bagi anak terlantar perlu dipersiapkan dengan pembekalan melalui kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial. Aspek yang diperlukan masyarakat adalah kemampuan dan keterampilan untuk melaksanakan peran pendampingan, mengidentifikasi kebutuhan dan sumber, melakukan jejaring kerja dan kemitraan, menggali dan mengalokasikan sumber, menyusun rencana kerja serta monitoring, evaluasi dan pelaporan. Penyuluhan dan bimbingan sosial merupakan salah satu bentuk intervensi sosial yang berasal dari pihak luar, dan merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat. Upaya meningkatkan kemampuan masyarakat melalui penyuluhan dan bimbingan sosial merupakan upaya untuk menumbuhkan keberdayaan masyarakat dengan melibatkan mereka dalam memberikan pelayanan dan perlindungan sosial bagi anak balita terlantar TKW agar tercegah dari keterlantaran. Oleh karena itu dalam penerapan model pelayanan ini konsep utama yang dikembangkan adalah pemberdayaan masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dalam pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan

yang mereka lakukan (Ambar Teguh S., 2008). Pemberdayaan dianggap penting dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat melalui intervensi berbagai program pembangunan agar mencapai kemampuan yang diharapkan.

Menurut Ginanjar Kartasasmita (1996), pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya dengan mendorong/memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan. Dalam mengembangkan potensi tersebut diperlukan upaya untuk membantu meningkatkan kemampuan yang dimiliki masyarakat. Berkaitan dengan penerapan model pelayanan ini, pengertian pemberdayaan masyarakat adalah upaya memberikan pembekalan kepada masyarakat yang diwakili baik oleh perorangan maupun kelompok masyarakat, dunia usaha dan instansi terkait lain, sehingga memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memberikan pelayanan dan perlindungan sosial khususnya bagi anak balita terlantar TKW. Pendekatan yang dilakukan dalam pemberdayaan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek yang akan melaksanakan kegiatan pelayanan dan bukan sebagai objek.

C. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat uji coba untuk menguji kelayakan model pelayanan dan perlindungan sosial anak balita TKW pada keluarga miskin guna mencegah keterlantaran. Uji coba dilaksanakan dengan memberikan perlakuan (pembekalan) kepada masyarakat yang diharapkan dapat didorong untuk melaksanakan upaya pelayanan dan perlindungan bagi anak balita terlantar TKW guna mencegah terjadinya keterlantaran. Uji coba dilaksanakan tanpa menggunakan kelompok kontrol (pembanding), tetapi dengan melihat perkembangan tingkat kemajuan peserta atau kelompok sasaran. Dalam kurun waktu kurang lebih enam bulan bisa dilihat apakah perlakuan tersebut efektif sesuai tujuan yang dimaksud. Perlakuan berupa penyuluhan dan bimbingan sosial sebagai implementasi dari model pelayanan dan perlindungan sosial anak balita terlantar TKW pada keluarga miskin guna mencegah terjadinya keterlantaran.

Pemilihan lokasi penelitian ditentukan secara

purposive, yaitu Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan salah satu wilayah yang penduduknya banyak yang bekerja menjadi TKW di luar negeri, dan pernah dijadikan lokasi penelitian pengkajian yang sekaligus sebagai suatu tindak lanjut pemecahan masalah yang ditemukan dalam penelitian tersebut. Sasaran subjek dalam uji coba ini adalah perorangan yang peduli terhadap anak balita terlantar yaitu tokoh masyarakat, tokoh agama, kaum muda dan ibu rumah tangga; Kelompok warga masyarakat yang peduli terhadap anak balita terlantar, seperti PKK, Dasa Wisma, Posyandu, Karang Taruna, Pos Paud, dan Bina Keluarga Balita (BKB); Organisasi sosial atau LSM yang peduli terhadap anak balita terlantar; Instansi terkait yang peduli terhadap anak balita terlantar, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kantor Pemberdayaan Perempuan, BK3S/K3S, Bappeda dan Panti Sosial Anak. Berdasar kriteria tersebut ditentukan sebanyak 30 orang. Pendekatan yang digunakan dalam uji coba ini adalah kualitatif dengan mengungkapkan data dan informasi tentang proses dan hasil uji coba (Jonathan A. Smith, 2009).

D. Implementasi Model Pelayanan Perlindungan Sosial Anak Balita Tenaga Kerja Wanita (TKW)

Pelaksanaan uji coba model pelayanan dan perlindungan sosial anak balita tenaga kerja wanita pada keluarga miskin dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi beberapa tahap kegiatan:

1. **Tahap Persiapan:** Tahap ini sebagai langkah awal kegiatan yang diarahkan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan uji coba model. Kegiatan dimulai dengan melakukan penjajakan yang dimaksudkan untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan kegiatan uji coba serta teknis pelaksanaannya kepada Dinas Sosial Kabupaten Malang. Kegiatan penjajakan ini meliputi: Pembentukan panitia daerah, yang akan bertugas membantu secara teknis kelancaran pelaksanaan uji coba, ditentukan sebanyak tiga orang dari

Dinas Sosial Kabupaten Malang. Penentuan fasilitator, yang nantinya akan bertugas memberikan materi pada kegiatan pembekalan. Sebelum kegiatan pembekalan, dilakukan diskusi dengan fasilitator untuk membahas materi yang akan disampaikan. Fasilitator ada enam orang, dari dinas sosial, dinas tenaga kerja dan transmigrasi, dinas kesehatan, biro pemberdayaan perempuan, bappeda dan dunia usaha di Kabupaten Malang. Penentuan pendamping, yang akan melaksanakan pendampingan selama enam bulan ke depan. Pendamping ditunjuk dari orang dinas sosial kabupaten sebanyak dua orang.

- 2. Tahap Pelaksanaan:** Kegiatan yang dilakukan dalam tahap pelaksanaan ujicoba meliputi pemberdayaan masyarakat, Sebelum kegiatan pemberdayaan dilakukan tes awal untuk mengetahui kondisi sasaran ujicoba sebelum dikenai tindakan, yaitu terkait dengan kemampuan peserta mengidentifikasi masalah, potensi, sumber, dan kebutuhan pelayanan serta perlindungan anak balita terlantar TKW. Kemampuan merencanakan, melaksanakan, mengendalikan program pelayanan dan perlindungan anak balita terlantar TKW. Setelah tes awal dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi tentang model yang akan diujicobakan, yaitu model pelayanan dan perlindungan anak balita terlantar TKW. Kegiatan berikutnya adalah pemberian *treatment*/perlakuan berupa pembekalan dan pemberian materi kepada peserta yang bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang berbagai upaya pelayanan dan perlindungan bagi anak balita terlantar TKW. Kegiatan ini diikuti oleh 30 orang peserta yang ditetapkan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Pelaksanaan pembekalan berlangsung selama empat hari, dengan materi yang telah ditentukan sesuai dengan panduan pelaksanaan ujicoba. Materi yang diberikan meliputi: Pengetahuan dan wawasan tentang pentingnya peran dan fungsi keluarga; Pengetahuan dan wawasan tentang strategi mengatasi permasalahan sosial dalam keluarga; Pengetahuan dan wawasan tentang

strategi pemecahan masalah melalui pen-dayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial di lingkungannya; Pengetahuan dan wawasan tentang pengelolaan remitan secara tepat dan bermanfaat; Pengetahuan dan wawasan tentang kewirausahaan/UEP/UKS; Bimbingan keterampilan manajemen. Materi tersebut disampaikan oleh fasilitator baik dari dinas sosial, dinas tenaga kerja dan transmigrasi, dinas kesehatan, biro pemberdayaan perempuan, bappeda dan dunia usaha.

Pembentukan Kelompok (Forum): Setelah mendapatkan materi pembekalan dari fasilitator, diadakan diskusi antar peserta untuk mengidentifikasi masalah, potensi, sumber, serta kebutuhan pelayanan dan perlindungan anak balita terlantar TKW di lokasi tersebut. Dari hasil identifikasi disusun rencana program dan kegiatan berdasarkan prioritas masalah. Setelah diskusi kelompok membahas penyusunan program dilanjutkan dengan kesepakatan untuk membentuk suatu forum yang mewadahi kegiatan mereka dan diberi nama "Forum Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak Balita Terlantar Tunas Pelangi". Tunas mengandung makna, bahwa anak adalah tunas bangsa sebagai generasi penerus perjuangan bangsa yang akan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Sedangkan Pelangi diambil dari nama salah satu hotel yang ada di Kota Malang yang menjadi tempat berlangsungnya kegiatan pemberdayaan. Pembentukan forum tersebut bertujuan untuk memperkuat jaringan kerja di antara para peserta pemberdayaan yang terdiri dari berbagai unsur yang ada di masyarakat dalam memberikan pelayanan dan perlindungan bagi anak balita terlantar TKW khususnya di Desa Mentaraman Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang dan Provinsi Jawa Timur pada umumnya. Setelah forum terbentuk, selanjutnya dibentuk kepengurusan forum yang terdiri dari Pembina/Pelindung, Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.

Penyusunan Program Kerja: Hasil dari identifikasi masalah, potensi, sumber, dan kebutuhan pelayanan serta perlindungan anak

balita terlantar TKW, maka Forum Tunas Pelangi menyusun program prioritas yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu enam bulan ke depan. Setelah melakukan diskusi selama satu hari, forum dibagi dalam dua divisi yaitu Divisi Penanganan Anak Balita TKW dan Divisi Pemberdayaan keluarga TKW. Kedua divisi tersebut selanjutnya menyusun program kerja yang saling menunjang meliputi: Sosialisasi program kegiatan Forum Tunas Pelangi; Mendirikan Kelas PAUD khusus anak balita TKW. Diharapkan kedepan kelas PAUD ini dapat menjadi embrio terbentuknya Taman Anak Sejahtera; Penyuluhan dan bimbingan sosial tentang pentingnya perlindungan dan pelayanan sosial bagi anak balita; Pemberian makanan tambahan bergizi bagi anak balita TKW.

Pemberian Bantuan: Sebagai dukungan dan motivasi bagi Forum Tunas Pelangi dalam mengimplementasikan rencana program kerja yang telah disusun, maka Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta memberikan bantuan stimulan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Stimulan diberikan menjelang berakhirnya kegiatan pemberdayaan dan diterima oleh pengurus forum, disaksikan seluruh peserta pemberdayaan dan dari Dinas Sosial Kabupaten Malang. Stimulan diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan kegiatan forum dalam rangka menerapkan dan melaksanakan model pelayanan dan perlindungan sosial sebagai upaya mencegah terjadinya keterlantaran pada anak balita TKW, sesuai program prioritas yang telah disusun.

Pendampingan: Dalam pelaksanaan kegiatan, forum akan didampingi oleh dua orang petugas pendamping, yaitu dari aparat Dinas Sosial Kabupaten Malang. Pendampingan bertujuan agar pelaksanaan program berjalan lancar sesuai dengan yang telah direncanakan. Selain itu, juga memberikan saran dan masukan serta bimbingan dalam rangka memperkuat kinerja forum. Pendamping juga berfungsi sebagai penghubung forum dengan pihak-pihak terkait lain yang dapat menjadi sumber dan potensi

dalam pelayanan dan perlindungan bagi anak balita terlantar.

- 3. Monitoring dan Evaluasi:** Kegiatan monitoring dilaksanakan tiga bulan sejak pelaksanaan pemberdayaan atau pemberian perlakuan pada anggota forum. Kegiatan monitoring dilaksanakan untuk memastikan bahwa program prioritas yang disusun telah dilaksanakan oleh Forum Tunas Pelangi. Kegiatan monitoring bertujuan untuk memonitor atau memantau sekaligus mengarahkan agar tujuan program yang dilaksanakan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan, sekaligus memantau penggunaan stimulan sebagai dana pendukung kegiatan. Kegiatan evaluasi bertujuan untuk menilai kegiatan forum yang telah dilaksanakan agar diketahui secara jelas apakah sasaran yang dituju atau direncanakan sudah tercapai. Oleh karena itu, kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran dan hasil yang diharapkan, sekaligus untuk mengetahui apakah ada kendala dalam mekanisme pelaksanaan kegiatan. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh tim peneliti dari B2P3KS Yogyakarta.

E. Kegiatan Forum Tunas Pelangi

Model Pelayanan Perlindungan Sosial Anak Balita TKW Keluarga Miskin di terapkan di Desa Mentaraman Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, dilakukan dengan membentuk Forum yang diberi nama Forum Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak Balita Terlantar Tunas Pelangi. Forum dibentuk sebagai sarana untuk menumbuhkembangkan partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam upaya memberikan pelayanan dan perlindungan sosial bagi anak balita TKW di lingkungannya. Forum Tunas Pelangi sekaligus menjadi wadah berhimpun berbagai tokoh baik perorangan seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, kaum muda, dan ibu rumah tangga, kelompok warga masyarakat seperti PKK, Dasa Wisma, Posyandu, Karang Taruna, Pos Paud, dan Bina Keluarga Balita (BKB), organisasi sosial atau LSM maupun instansi terkait lain, seperti Di-

nas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kantor Pemberdayaan Perempuan, BK3S/K3S, Bappeda dan Panti Sosial Anak, yang peduli terhadap anak balita terlantar. Berbagai tokoh, elemen masyarakat dan instansi terkait tersebut berhimpun dalam rangka melaksanakan fungsi koordinasi. Sedangkan fungsi perencanaan dan pelaksanaan program dilaksanakan oleh dua divisi yang telah dibentuk.

Tujuan kegiatan penerapan model, pertama agar kebutuhan anak balita TKW khususnya di wilayah Desa Mentaraman dapat terpenuhi baik secara fisik, psikis, maupun sosialnya. Kedua, meningkatkan pengetahuan dan wawasan keluarga TKW tentang pentingnya tumbuh kembang anak serta meningkatkan upaya keluarga TKW dalam mencegah terjadinya keterlantaran pada anak. Ketiga, agar keluarga TKW terbantu untuk melakukan peran dan fungsinya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga. Keempat, masyarakat, dan instansi terkait dapat tergerak untuk peduli terhadap masalah keterlantaran anak balita.

Setelah forum terbentuk, kegiatan pertama yang dilakukan adalah rapat koordinasi untuk menyusun program kerja atau rencana aksi yang akan dilakukan selama enam bulan ke depan. Rapat dihadiri oleh seluruh anggota forum berjumlah 30 orang, juga dihadiri pendamping dari Dinas Sosial Kabupaten Malang. Kegiatan forum selanjutnya adalah melakukan ijin dan survei ke lokasi yaitu Desa Mentaraman Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang. Setelah mendapat ijin dan melakukan survei, forum mengadakan kegiatan sosialisasi program Forum Tunas Pelangi. Kegiatan ini bertujuan mensosialisasikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan forum kepada masyarakat untuk memperoleh masukan, dukungan, persetujuan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, kader, dan pemerintah setempat. Materi sosialisasi berupa penjelasan tentang model pelayanan dan perlindungan balita TKW pada keluarga miskin guna mencegah keterlantaran, yang disampaikan oleh ketua forum, sedangkan penjelasan teknis rencana kegiatan dan pentingnya peran serta partisipasi masyarakat disampaikan oleh sekretaris forum. Tempat pelaksanaan ke-

giatan di kantor Desa Mentaraman Kecamatan Donomulyo, dengan sasaran pihak Kecamatan Donomulyo, Kepala Desa dan perangkat desa, ketua Tim Penggerak PKK, ketua RT, kader, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan keluarga balita terlantar.

Rencana aksi berikutnya adalah pembentukan kelas PAUD khusus balita TKW. Tahap persiapan dari kegiatan ini diawali dengan pembentukan kelompok pendampingan, yang dibagi menjadi empat kelompok, yaitu Tunas Pelangi Satu, Tunas Pelangi Dua, Tunas Pelangi Tiga, dan Tunas Pelangi Empat. Masing-masing kelompok didampingi dua orang pendamping dari anggota forum. Kegiatan selanjutnya adalah penyiapan tempat untuk PAUD khusus balita terlantar TKW, tempat menggunakan salah satu rumah warga yang kosong dan saat ini tidak digunakan sehingga dapat dipinjamkan untuk sementara waktu. Selain penyiapan tempat juga penyiapan kebutuhan untuk proses pembelajaran PAUD, berupa alat permainan edukatif, panggung boneka, tas, kaos seragam, dan ATK. Melalui seleksi yang dilakukan oleh forum maka diperoleh sebanyak 25 anak balita dari TKW yang mengalami keterlantaran yang akan mengikuti pembelajaran di kelas PAUD khusus. Sebelum proses pembelajaran PAUD dimulai, orangtua atau wali asuh beserta 25 anak balita tersebut dikumpulkan untuk mendapatkan pengarahan dari Ketua Forum Tunas Pelangi dengan mengambil tema Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini dalam Meletakkan Dasar Pendidikan dan Perkembangan bagi Anak. Selain itu juga dilakukan peragaan kelas PAUD Khusus oleh Ketua HIMPAUDI Kabupaten Malang. Pada kegiatan tersebut juga dibagikan bantuan peralatan bermain dan kebutuhan belajar peserta berupa kaos celana olah raga, tas sekolah, kotak pensil, dan ATK. Kegiatan Kelas PAUD Khusus, disepakati diselenggarakan pada setiap hari Sabtu dan Minggu. Rencana aksi lain adalah mengadakan penyuluhan dan bimbingan sosial dengan materi tentang pentingnya peranan keluarga guna mencegah keterlantaran dan pentingnya memperhatikan tumbuh kembang anak.

Dari hasil evaluasi diperoleh informasi, bahwa pelaksanaan kelas PAUD khusus cukup

mendapatkan sambutan positif terutama dari orangtua atau wali asuh anak balita TKW. Mereka merasa bersyukur karena anak-anak yang ditinggal orangtuanya bekerja menjadi TKW mendapatkan perhatian dan kesempatan untuk belajar dan bermain di PAUD. Selain itu mereka juga mendapatkan tambahan pengetahuan tentang pentingnya memperhatikan kebutuhan anak terutama di masa tumbuh kembang. Anak balita yang mendapat kesempatan belajar di kelas PAUD khusus juga terlihat lebih ceria, anak menjadi lebih berani tampil dan belajar bersosialisasi dengan kawan-kawannya. Warga masyarakat pun sangat mendukung kegiatan tersebut terbukti banyak warga yang ingin mendaftarkan anaknya menjadi peserta kelas PAUD khusus. Dari hasil evaluasi diperoleh informasi dari para pendamping, nantinya kelas PAUD khusus ini akan menjadi embrio berdirinya Taman Anak Sejahtera di Desa Mentaraman. Hal tersebut telah mendapatkan persetujuan dan dukungan dari Dinas Sosial Kabupaten Malang dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang.

Rencana aksi forum yang terakhir adalah pemberian makanan tambahan bergizi bagi anak balita TKW. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bimbingan sekaligus contoh kepada orangtua/wali/pengasuh tentang menu makanan bergizi yang seharusnya diberikan kepada anak balita agar terpenuhi kebutuhan fisiknya utamanya pada masa pertumbuhan. Semua kegiatan yang dilaksanakan forum pada intinya merupakan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberi jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak seperti memperoleh pelayanan kesehatan, gizi yang baik, pendidikan serta perlindungan dari berbagai diskriminasi dan tindak kekerasan.

Dari pelaksanaan rencana aksi tersebut, maka tolok ukur atau indikator keberhasilan penerapan model pelayanan dan perlindungan sosial anak balita terlantar TKW antara lain: Partisipasi aktif dari tokoh agama, tokoh masyarakat, yayasan sosial baik sebagai pribadi maupun kelembagaan yang berada di Desa Mentaraman Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang; Partisipasi dan peran aktif anggota Forum Tunas Pelangi yang memberi-

kan pendampingan setiap saat pada pelaksanaan kegiatan di masyarakat; Perhatian dan keterlibatan langsung dari orangtua asuh/wali asuh dalam kegiatan Forum Tunas Pelangi; Partisipasi dan peran aktif dari pemerintah desa yang memberikan dukungan pada pelaksanaan program. Dukungan juga diperoleh dari Bagian Kesra Setda Kabupaten Malang, melalui program pembentukan KUBE bagi orangtua/wali asuh anak balita TKW dengan bantuan stimulan untuk masing-masing kelompok; PAUD Tunas Pelangi yang dibentuk telah berfungsi sebagai lembaga pendidikan bagi anak balita sekaligus sebagai media penyampai informasi maupun penyuluhan sosial bagi orangtua asuh/wali asuh anak balita yang ditinggal orangtuanya menjadi TKW, yaitu tentang pentingnya memperhatikan kebutuhan fisik, psikis dan sosial anak agar tidak mengalami keterlantaran.

Kegiatan Forum Tunas Pelangi selama enam bulan tersebut didukung oleh Balai Besar Penelitian dan pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta dengan memberikan stimulan sebesar Rp 20.000.000,- Dana bantuan stimulan tersebut telah dialokasikan sebagai dana pendukung kegiatan forum, sehingga aktivitas forum selama enam bulan mengandalkan dana bantuan stimulan dari B2P3KS Yogyakarta. Kedepannya Forum Tunas Pelangi sebagai forum berbasis masyarakat diharapkan keberadaannya tetap berlangsung dan mampu melaksanakan kegiatan secara mandiri dengan mendayagunakan potensi atau sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu perlu adanya dukungan dari pemerintah daerah setempat dan instansi terkait lain agar kegiatan tersebut tetap berkesinambungan.

F. Penutup

Model pelayanan perlindungan sosial anak balita TKW pada keluarga miskin melalui pembentukan Forum Tunas Pelangi di Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Jawa Timur efektif dalam mencegah terjadinya keterlantaran pada anak. Program kerja yang telah disusun dapat terealisasi sesuai dengan yang direncanakan, meskipun hasilnya belum optimal. Forum menjadi wadah bagi tokoh masyarakat, elemen masyarakat, dan instansi terkait lain di

Kecamatan Donomulyo yang peduli terhadap upaya pencegahan keterlantaran pada anak balita TKW.

Keberhasilan forum dalam upaya mencegah terjadinya keterlantaran pada anak balita TKW dikarenakan peran aktif pengurus, anggota forum, partisipasi pemerintah desa dan peran serta orangtua asuh atau wali asuh yang mendukung kegiatan forum. Forum berhasil melaksanakan program kerja sesuai yang direncanakan berupa kegiatan sosialisasi program forum, membuka kelas PAUD khusus anak balita terlantar TKW, bimbingan dan penyuluhan sosial kepada orangtua/wali asuh anak, dan pemberian makanan tambahan bergizi pada anak. Keberadaan forum masih baru dan dalam tahap pengenalan sehingga pelaksanaan program kerja belum banyak melibatkan lembaga terkait lain. Sementara itu, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak akan memberikan manfaat dalam upaya pelayanan dan perlindungan bagi anak balita guna mencegah terjadinya keterlantaran.

Direkomendasikan agar pemerintah bisa memberikan legalitas terhadap pembentukan forum pelayanan dan perlindungan bagi anak balita. Perlu melakukan pembinaan melalui pelatihan dalam rangka meningkatkan profesionalitas forum. Mensosialisasikan keberadaan forum secara berkesinambungan agar dapat dikenal masyarakat luas. Forum perlu menjalin kerjasama dan jejaring yang lebih luas dengan berbagai lembaga/pihak yang peduli pada pelayanan dan perlindungan bagi anak balita terlantar, juga perlu menggali dan memanfaatkan potensi serta sumber daya yang ada di lingkungannya. Hal lain yang tidak kalah penting adalah perlunya dukungan perda terkait pelayanan dan perlindungan sosial bagi anak balita. Model pelayanan perlindungan sosial anak balita melalui pembentukan forum seperti ini dapat dikembangkan di wilayah lain.

Pustaka Acuan

- Ambar Teguh Sulistiyani. (2004). *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ginjar Kartasasmita. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Cides.
- Gunawan Sumodiningrat. (2001). *Responsi Pemerintah terhadap Kesenjangan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Per Pod.
- Ikawati, dkk. (2010). *Pengkajian Kebutuhan dan Perlindungan Balita Terlantar TKW*. Yogyakarta: B2P3KS.
- Rachmanto, W. 1998. *Perlindungan Kesejahteraan Anak dari Perlakuan Salah*. Majalah Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial No. 8. Jakarta: Puslitbang Kesos Depsos RI
- Santrock, J.W. (1995). *Life Span Development Jilid I* (terjemahan: Chusairi dan Damanik). Jakarta: Erlangga
- Soetarlinah Sukadji. (1986). *Keluarga dan Keberhasilan Pendidikan*. Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. 2009. *Praktek Pekerjaan Sosial dengan Anak*. Jakarta: Pustaka Societa.
- Smith, Jonathan A. (2009). *Psikologi Kualitatif: Panduan Praktis Metode Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sularso, St. (2000). *Seandainya Aku Bukan Anakmu*. Jakarta: Kompas.
- Web
- _____ (2003). *Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Departemen Sosial RI.
- _____ (2002). *Undang-undang Perlindungan Anak*. Jakarta:

Dialektika Status dan Peran Perempuan dalam Struktur Sosial Masyarakat Petani

The Dialectic of Women Status and Role in Peasant Society Social Structure

Munandar Sulaeman dan Siti Homzah

Laboratorium Sosiologi-Penyuluhan Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran,
Jl Raya Bandung-Sumedang Km 21, Telpon (022)7798241, Fax (022)7798212, e-mail: <oce_s5@yahoo.co.id>.
Diterima 26 September 2013, direvisi 9 Oktober 2013, disetujui 31 Oktober 2013.

Abstract

The aims of this study is to determine the status and role of women in family and social structure of dairy farmer; the role of women in the income earning and household (domestic) work and; the dialectic process of status and role of women. The methods used on this research is case study with qualitative approach. Qualitative data analysis was done by categorizing and organizing data through in-depth understanding (verstehen understanding), both textual and contextual that were interpreted afterward. The result showed that the values of the status and role of women in family structure indicate a bargaining through a process of dialogue between husband and wife based on the potential and contribution in both the work of raising livestock and household; in social structure, the role of women as breadwinners have been accepted as a social reality through its participation in the dairy cattle business; working hours of women who poured out in the dairy cattle business and household activities for 8-10 hour per day, far greater than the man (6-10 hours per day); The process of dialectics in the aspect of culture, structure and the relational patterns indicate there has been a shift the values of culture where women have gained high appreciation in society of farmers and have been positioned strategically (as decision maker) in business of the family's livelihood and there are a functional partnership relations between men and women in dairy farmer community in the study area.

Key Words:

Dialectic-Women Status and Role-Social Structure

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: Status dan peran perempuan pada struktur keluarga dan sosial masyarakat peternak; Peran perempuan dalam pekerjaan nafkah dan pekerjaan rumah tangga dan proses dialektika status dan peran perempuan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara mengategorisasi dan mengorganisasi data melalui pemahaman mendalam (*verstehen understanding*) baik secara tekstual maupun kontekstual, kemudian diinterpretasikan. Nilai status dan peran perempuan dalam struktur keluarga menunjukkan adanya proses tawar menawar (*bargaining*) melalui proses dialogis antara suami isteri didasarkan atas potensi dan kontribusi, baik dalam pekerjaan memelihara ternak maupun pekerjaan rumah tangga. Dalam struktur sosial, peran perempuan sebagai pencari nafkah sudah diterima sebagai kenyataan sosial melalui partisipasinya dalam usaha ternak sapi perah. Pencurahan tenaga kerja perempuan dalam usaha ternak sapi perah dan kegiatan rumah tangga sebesar 8–10 jam per hari, jauh lebih besar dari suami (6–10 jam/hari). Proses dialektika baik dalam aspek kultur struktur maupun pola relasional menunjukkan telah terjadi pergeseran nilai, saat perempuan telah mendapatkan penghargaan yang tinggi di masyarakat peternak dan telah diposisikan secara strategis (sebagai pengambil keputusan) dalam usaha nafkah keluarga, serta terjadi relasi kemitraan yang fungsional antara laki-laki dan perempuan pada masyarakat peternak di daerah penelitian

Kata Kunci:

Dialektika-Status dan Peran Perempuan-Struktur Sosial

A. Pendahuluan

Sumberdaya keluarga sebagai bagian dari lingkungan sosiobiofisik terdiri laki-laki dan perempuan dalam usaha ternak merupakan sumberdaya yang memiliki dua kekuatan yang

terdiri dari unsur struktur sosial dan struktur keluarga yang fungsional dan akan memperkuat sistem produksi, sehingga terjalin ekosistem yang seimbang melalui konsep kemitraan yang komplementer antara laki dan perempuan.

Peran perempuan di pedesaan sangat signifikan baik secara ekonomi maupun secara sosial (sebagai bagian dari struktur sosial masyarakat desa,) akan tetapi status dan peran perempuan dalam kelembagaan ataupun struktur sosial masyarakat desa masih mengalami distorsi atau penyimpangan akibat nilai patriarki yang masih kuat dalam masyarakat. Hasil temuan dari beberapa penelitian ekonomi rumah tangga peternak dalam perspektif gender (Siti Homzah 1985, Siti Homzah dan Sri Maryati, 1994, Siti Homzah dan Munandar. S, 1995) menunjukkan bahwa perempuan memiliki akses signifikan dalam produksi ternak sapi perah ditinjau dari curahan tenaga kerja dan pendapatan. Namun peran ekonomi perempuan tersebut tidak disertai dengan peningkatan status atau kedudukannya baik dalam rumah tangga maupun di masyarakat, terutama tercermin dari masih rendahnya peluang perempuan dalam mengambil keputusan.

Dialektika merupakan cara berpikir atau logika tentang peran perempuan yang juga berjalan dalam komunitas petani. Dialektika adalah proses deduktif Hegel (John Elster, 1986), dimana tesis tentang perempuan teralienasi oleh norma dan nilai, kemudian muncul antitesis pemikiran komunitas petani bahwa punya peran penting, sampai terjadi sintesis pemikiran saat dilakukan penelitian. Hal tersebut merupakan fenomena gender (Mansour Fakhri, 1996) bahwa status peran dan kedudukan perempuan sebagaimana adanya merupakan hasil konstruksi realitas sosial budaya, yang terus berdialektika.

Sejak lebih dari satu dekade terakhir, pemerintah telah berupaya mengatasi permasalahan ketidaksertaan gender secara intensif melalui kebijakan Pengarusutamaan Gender yaitu strategi mengintegrasikan gender dalam arus utama pembangunan melalui kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender pada berbagai sektor. Di bidang peternakan kebijakan tersebut telah banyak direalisasikan dalam berbagai sosialisasi, pelatihan atau advokasi pada berbagai kelembagaan atau organisasi yang menaungi peternakan bahkan sampai ke lembaga keagamaan, baik oleh lembaga pemerintah, organisasi sosial, LSM maupun perguruan tinggi, Masih kuatnya nilai patriarki sebagai

fakta sosial pada masyarakat desa disatu pihak dan dilain pihak upaya-upaya pemerintah dalam rangka peningkatan kesetaraan gender telah banyak dilakukan akan menimbulkan adanya proses dialektika antara nilai lama yang patriarki dengan nilai baru yang sensitif gender, sehingga diperkirakan akan terjadi pergeseran peran, status dan kedudukan perempuan dalam berbagai kehidupan pada masyarakat desa. Hal ini menunjukkan adanya dinamika fungsi keluarga dalam berumah berkeluarga (Blood, R.O jr dan D.M Wolfe, 1989)

B. Penggunaan Metode Penelitian

Metode pendekatan menggunakan studi kasus, melalui pendekatan kualitatif, yang dilakukan secara holistik dan deskripsi prosedural, yaitu mengungkap simbol atau makna dari tindakan, ungkapan pernyataan dan perasaan subyek tentang status, kedudukan dan peran perempuan dalam struktur sosial masyarakat peternak. Informan dipilih secara purposif dan mengembangkan informasinya secara bola salju (*snow ball*) terdiri dari peternak sapi perah laki-laki dan perempuan, tokoh peternak, tokoh koperasi, aparat desa dan tokoh agama. Jumlah informan seluruhnya sebanyak 35 orang. Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive*, yaitu pada masyarakat petani (terutama penghasil utama peternak) di Desa Pangalengan Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. Unsur yang dikaji meliputi status dan peran perempuan dan laki-laki dalam struktur keluarga dan masyarakat, indikator yang dikaji adalah pengambilan keputusan antara perempuan dan laki-laki dalam pekerjaan mencari nafkah dan rumah tangga; Nilai status dan peran perempuan dalam struktur sosial masyarakat.

Indikator peran perempuan dan laki-laki dalam pekerjaan nafkah dan rumah tangga dikaji dari aspek peran dalam mencari nafkah (Pencurahan tenaga kerja dalam pekerjaan nafkah), dan peran dalam rumah tangga (Pencurahan tenaga kerja dalam pekerjaan rumah tangga). Proses dialektika. Indikator yang diamati adalah pergeseran peran, status dan kedudukan perempuan dari nilai-nilai tradisi (lama) ke nilai baru (sebagai hasil sintesis). Analisis data dilakukan secara kualitatif dianalisis dengan cara

melakukan kategorisasi dan organisasi data dengan cara pemahaman mendalam (*verstehen understanding*), baik secara tekstual maupun kontekstual, untuk kemudian diinterpretasikan. Kontrol data melalui dialogis antarfakta, tokoh dan teori juga metode (model triangulasi).

C. Status dan Peran Perempuan

1. Status dan Peran Perempuan dalam Struktur Keluarga dan Masyarakat

Pola pengambilan keputusan suami dan isteri dalam kegiatan nafkah dan rumah tangga: Dari tabel 1 berikut tampak bahwa distribusi pengambilan keputusan dalam pekerjaan nafkah di bidang sapi perah menunjukkan pola pengambilan keputusan bersama antara suami dan istri dengan kecenderungan ke arah bersama setara dan bersama tapi suami domi-

nan kecuali dalam pengambilan keputusan di bidang pengobatan dan pertolongan kelahiran kecenderungannya ke arah bersama suami dominan dan hanya oleh suami. Sedangkan dalam pemeliharaan ternak nampak kontribusi keputusan bersama tapi isteri dominan.

Pola pengambilan keputusan dalam bidang domestik (urusan rumah tangga) dapat dilihat pada tabel 2. Dari tabel tersebut tampak bahwa pengambilan keputusan dalam kegiatan domestik polanya cenderung lebih mengarah pada keputusan bersama tapi isteri dominan dan keputusan hanya oleh isteri, kecuali dalam hal pembelian rumah keputusan ditentukan hanya oleh suami atau bersama tapi suami dominan. Dari data tersebut dapat ditelusuri bagaimana nilai-nilai status dan peran perempuan dalam struktur sosial masyarakat.

Tabel 1
Pola Pengambilan Keputusan Suami-Isteri dalam Bidang Nafkah (Usaha Ternak Sapi Perah)

Pengambilan Keputusan	Bersama			Suami Sendiri
	Isteri Dominan	Setara	Suami Dominan	
Pakan Ternak	-	60	40	-
Pembibitan	-	30	48	22
Pemeliharaan	25	25	25	25
Sanitasi Kandang	-	40	45	15
Pengobatan/Pertolongan	-	20	30	50
Penjualan Susu/ Ternak	-	50	50	-

Sumber: Hasil Wawancara (N=35, 2013)

Tabel 2
Pola Pengambilan Keputusan dalam Bidang Rumah Tangga (Domestik) Selama Sebulan (%)

Pengambilan Keputusan	Isteri sendiri	Bersama			Suami Sendiri
		Isteri Dominan	Setara	Suami Dominan	
Menu Makanan	67	33	-	-	-
Pembelian Rumah	-	-	-	33	67
Perbaikan Rumah	-	-	67	33	-
Pembelian Pakaian	67	33	-	-	-
Pembelian Perabot Rumah Tangga	-	67	33	-	-
Biaya Kesehatan	33	33,3	33,3	-	-
Biaya Pendidikan	-	33,3	33,3	33,3	-

Sumber: Hasil Wawancara (N=35, 2013)

Nilai status dan peran perempuan dan laki-laki dalam Struktur Sosial Masyarakat Petani:

apabila dilihat dari tatanan sosial masyarakat peternak di daerah penelitian, maka unit terkecil berupa keluarga merupakan roda penggerak kegiatan usaha ekonomi yang memperkuat masyarakat tersebut, dimana semuanya diusahakan oleh unit keluarga yang merupakan kesatuan manajemen produksi. Untuk membuktikan kualitas SDM kaum perempuan dalam usaha sapi perah dapat dilihat dari rangkaian kegiatannya. Dari hasil pengamatan dan wawancara di lapangan di lapangan, perempuan mengerjakan hampir semua kegiatan pemeliharaan ternak. Pertimbangan fisik dan psikologis dalam melakukan pekerjaan pemeliharaan ternak bukan merupakan landasan yang mendasar.

Ternyata dorongan bekerja nafkah pada perempuan merupakan usaha dalam mempertahankan kehidupan keluarga (*survival*), karena kemiskinan telah mendorong perempuan terutama pada strata ekonomi kelas dan bawah untuk bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan pada rumah tangga strata menengah dan atas keterlibatan perempuan dalam kerja nafkah merupakan usaha untuk meningkatkan pendapatan untuk memperbesar modal usaha. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil kajian Pudjiwati Sayogya (1993).

Kualitas demikian dalam konteks “definisi Sosial” struktur keluarga menunjukkan proses tawar menawar (*bergaining*) antara suami isteri dalam mengelola dan menjalankan roda kehi-

dupan keluarganya. Pengaturan peran laki-laki dan perempuan dalam ranah publik dan domestik tidak lepas dari nilai dan norma peran dan status perempuan dalam struktur keluarga. Norma mengenai peran perempuan dalam struktur sosial masyarakat (ranah publik) sudah diterima masyarakat sebagai kenyataan sosial (*social reality*).

Prinsip yang dikembangkan dalam pengaturan peran perempuan dalam keluarga adalah saling membantu. Isteri membantu suami bekerja nafkah dan suami membantu dalam pekerjaan rumah tangga. Menurut paradigma definisi sosial dalam keadaan demikian terjadi dialogis peran yang didasarkan atas peran masing-masing dan kontribusinya terhadap keluarga.

Dalam struktur sosial masyarakat ada perkembangan dalam partisipasi perempuan dalam kegiatan kelembagaan yang berkaitan dengan bidang peternakan. Dari hasil wawancara banyak perempuan yang menjadi anggota koperasi, perempuan juga banyak yang menjadi anggota kelompok peternak. Kenyataan ini menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki akses terhadap kredit, akses terhadap kegiatan pelatihan/penyuluhan yang berkaitan dengan teknologi peternakan bahkan perempuan juga turut berpartisipasi dalam menentukan kebijakan koperasi.

2. Peran Perempuan dalam pekerjaan Nafkah dan Rumah Tangga

Untuk melihat peran perempuan dan laki-laki dalam pekerjaan nafkah dilihat dari sejauhmana

Tabel 3
Rata-rata Curahan Tenaga Kerja Laki-laki dan Perempuan dalam Berbagai Jenis Kegiatan Pemeliharaan Ternak Sapi Perah (jam per bulan)

Jenis Kegiatan Pemeliharaan Ternak	Rata-rata Curahan Tenaga Kerja	
	Laki-laki	Perempuan
Penyediaan Pakan	77,5	52,3
Pemeliharaan	23,2	19,8
Mengangkut pupuk kandang	2,8	-
Memerah dan Menangani susu	3,0	10,9
Mengangkut susu	2,5	10,5
Menolong kelahiran dan Pengobatan	0,5	-
Jumlah	109,5	93,5

Sumber: Hasil Wawancara (N=35, 2013)

pencurahan tenaga kerjanya seperti digambarkan pada tabel 3 berikut. Dari tabel 3 tersebut tampak bahwa perempuan mengerjakan hampir seluruh pekerjaan dalam pemeliharaan ternak. Curahan jam kerja tertinggi pada pekerjaan penyediaan pakan, terutama kegiatan mengarut rumput.

Pekerjaan lain yang banyak dilakukan perempuan adalah pemeliharaan ternak (memandikan, membersihkan kandang dan peralatan). Apabila dihitung dalam satu hari perempuan bekerja memelihara ternak sekitar 3,2 jam.

Tabel 4
Rata-rata Curahan Tenaga Kerja Laki-laki dan Perempuan dalam Berbagai Kegiatan Mengurus Rumah Tangga (jam/bulan)

Jenis Kegiatan Rumah Tangga	Rata-rata Curahan Tenaga Kerja	
	Laki-laki	Perempuan
Mengambil Air	0,5	5,7
Masak	3,0	47,4
Mengasuh Anak	4,0	12,0
Kegiatan lainnya	12,0	60,5
Jumlah	19,5	125,6

Sumber: Hasil Wawancara (N=35, 2013)

Gambaran dari tabel 4 menunjukkan, bahwa pekerjaan rumah tangga menjadi pekerjaan utama perempuan, dilihat dari tingginya jam kerja yang dicurahkan, namun demikian pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa laki-laki juga melakukan hampir seluruh pekerjaan rumah tangga walaupun dengan jam kerja yang jauh lebih rendah dari perempuan.

3. Proses Dialektika

Proses dialektika dalam penelitian ini ditelusuri mulai dari: Pertama, masalah nilai/kultur. Temuan dari hasil kajian terdahulu, secara verbal diakui oleh laki-laki dan perempuan bahwa walaupun seringkali ada rembulan antara suami isteri, namun pada akhirnya perempuan selalu mengikuti apa yang diinginkan oleh suami. Perkembangan saat ini menunjukkan masalah nilai yang dulu memperlihatkan kecenderungan memposisikan perempuan pada posisi sekunder,

sekarang sudah mulai ada perkembangan baru dimana perempuan selain turut serta dalam kegiatan nafkah, juga secara kultur telah ada penghargaan yang tinggi dari laki-laki terhadap perempuan. Nilai yang berkembang pada saat sekarang sudah menjadi sintesis yang berupa nilai penghargaan laki-laki terhadap perempuan yang sudah menjadi kesepakatan

Kedua, pada masa lalu secara faktual perempuan berperan dalam pekerjaan pencarian nafkah namun tidak disertai dengan kedudukan dan peran yang strategis sebagai suatu usaha. Saat ini telah mengalami perkembangan dimana peran perempuan dalam pencarian nafkah (khususnya di bidang peternakan sapi perah) diposisikan sebagai manajer/pengambil keputusan dalam usaha keluarga, beberapa kasus dapat menjelaskan hal tersebut.

Dengan demikian dalam suatu kegiatan usaha ada pembagian tugas yang sudah disepakati berdasarkan potensi dengan tidak melihat apakah dia seorang laki-laki atau perempuan. Terjadi proses strukturasi (Giddens, 1995), mulai signifikasi (perubahan peran perempuan), dominasi (perempuan mengambil peran usaha) dan legitimasi (pengakuan kaum laki) tentang kontribusinya dalam usaha. Fakta ini membuktikan bahwa struktur sosial masyarakat peternak sudah berorientasi pada usaha ternak profesional dan terbuka. Kondisi demikian sebagai hasil sintesis yang cukup berarti melalui mekanisme nilai sosial budaya yang berkembang baik sebagai hasil pengaruh informasi tentang pemahaman gender maupun sebagai akibat dari semakin profesionalnya perempuan dalam kegiatan usaha tani ternaknya.

Ketiga, proses dialektika yang ditunjukkan dalam hal pola relasi sosial, sejalan dengan perkembangan dari adanya pergeseran nilai dan struktur sosial masyarakat peternak, karena pola relasi ini juga diakibatkan oleh kondisi status, kedudukan dan peran yang berkembang pada masyarakat. Makin baiknya status, posisi, peran perempuan dalam kegiatan nafkah, secara langsung akan berpengaruh terhadap pola relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan supra keluarga. Fakta yang dapat dijelaskan dalam hal ini tidak ada lagi posisi-posisi yang bersifat dominasi, subordinasi maupun

marginalisasi atau teralienasi terhadap perempuan di masyarakat dan keluarga. Pola relasi yang berkembang adalah fungsional dimana perempuan sudah memiliki peran fungsional dalam nafkah bahkan apabila laki-laki tidak dapat melaksana fungsi yang diharapkan masyarakat maka perempuan dapat menggantikan untuk berperan pada posisi tersebut. Adanya sintesis dalam kekuatan kultur, struktur dan pola relasional dari status dan peran laki dan perempuan merupakan fakta terjalannya sistem produksi berbasis ekosistem keluarga peternak.

D. Penutup

Status dan peran perempuan dalam struktur keluarga dan struktur sosial digambarkan melalui: Pola pengambilan keputusan dalam kegiatan nafkah dan kegiatan rumah tangga: Dalam kegiatan nafkah pola pengambilan keputusan cenderung mengarah pada pengambilan keputusan bersama setara dan bersama tapi suami dominan; Dalam kegiatan rumah tangga lebih mengarah pada pola pengambilan keputusan bersama setara dan bersama tapi isteri dominan, namun ada beberapa keputusan yang hanya oleh isteri sendiri seperti keputusan dalam penentuan menu makanan, pakaian dan kesehatan

Nilai status dan peran perempuan dalam struktur keluarga dan struktur sosial: Dalam struktur keluarga ada proses tawar menawar (*bargaining*) antara suami dan isteri baik dalam pekerjaan nafkah maupun pekerjaan rumah tangga. Terjadi dialogis peran antara laki-laki dan perempuan didasarkan atas kemampuan (potensi) masing-masing dan kontribusinya terhadap keluarga; Dalam struktur sosial, peran perempuan dalam kegiatan pencarian nafkah di ranah publik sudah diterima sebagai kenyataan sosial, karena status, kedudukan dan peran perempuan dalam kegiatan nafkah telah diapresiasi melalui partisipasinya dalam kegiatan usaha ternak sapi perah.

Perempuan memberikan kontribusi yang nyata dalam pekerjaan nafkah, ditinjau dari curahan tenaga kerja, perempuan bekerja (nafkah dan rumah tangga) dalam sehari sebesar 8–10 jam dan ini lebih besar dari suami (6–8 jam per hari). Proses dialektika dalam aspek

kultur menunjukkan telah terjadi pergeseran nilai dimana perempuan telah mendapatkan penghargaan yang tinggi di masyarakat peternak. Dari aspek struktur, telah terjadi pergeseran peran dalam pekerjaan nafkah karena perempuan telah diposisikan secara strategis (sebagai manajer) dalam usaha nafkah keluarga. Dari aspek relasional pola yang berkembang adalah relasi kemitraan yang fungsional antara laki-laki dan perempuan di masyarakat pedesaan.

Pustaka Acuan

- Blood, R.O jr and D.M Wolfe. (1989). *Husband and Wife*, The Dynamic of Married Living, New York: The Free Press.
- Elster John. (1986). *Introduction to Karl Marx*, England: Cambridge.
- Fakih Mansour. (1996). *Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Giddens Anthony. (1995). *The Constitution of Society: The Outline of The Theory of Structuration*, Cambridge: Policy Press.
- Homan dalam Margaret Poloma. (1987). *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: Rajawali.
- Siti Homzah. (1986). *Peranan Wanita dalam Usaha Ternak sapi Perah Rakyat*, (Thesis S2), Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- _____. (1994). *Analisis Mekanisme Pembagian Kerja Anggota Rumah Tangga Peternak dalam Pekerjaan Produktif dan Pekerjaan Domestik*, Proyek DIP.OPF. Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran.
- Siti homzah dan Munandar Sulaeman. (1995). *Perekonomian Rumah Tangga Petenak Dalam Perspektif Gender*. Bandung: Kerjasama Agriculture Management Project dengan Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran.
- Pudjiwati Sayogjo. (1993). *Peranan Wanita dalam Pembangunan Masyarakat Desa*. Desertasi Doctor, YIIS, Jakarta: Rajawali.

Pemberdayaan Anak Jalanan melalui Sanggar Karya Anak Bangsa *Street Children Empowerment through Sanggar Karya Anak Bangsa*

Siti Aminatun

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial
(B2P3KS) Yogyakarta. Jl. Kesejahteraan Sosial No.1, Nitipuran, Yogyakarta. Telpn (0274) 377265. E-mail:
<aminatun siti57@yahoo.com>. Diterima 21 Agustus 2013, direvisi 2 Oktober 2013, disetujui 5 November 2013.

Abstract

This study meant to describe the activities done by Sanggar Karya Anak Bangsa (Kabasa) which committed to children vulnerable being in the street, street children, and ex-street children, to be motivated leaving the street. Data were gathered through observation, in-depth interview, and documentary analysis. The study showed that Sanggar Kabasa was set to educate children vulnerable being in the street, street children, and ex-street children, so they can escape street lives. Sanggar Kabasa as government partner has been participating actively to educate street children. Its funding limit was solved by joint venture with any institution committing to street children, such as Kemandirian Dompot Dhuafa, through vocational training to get a better job. Joint venture also done with individual committing to street children through fund and means of education. Sanggar Kabasa made administrative report routinely to donors on the use of the fund and aid to show that their commitment was very worthwhile for street children. Based on the study is recommended that any non-government institution committed to social affairs (street children) should be taken by the government as partner, so their existence should be supported by the government. The synergy among government, non-government institution, and communities committed to social problems (street children) when is done hand-in-hand and social solidarity hopefully can solve existing social problem.

Keywords:

Street Children-Empowerment-Sanggar Kabasa

Abstrak

Pengkajian ini bertujuan mendeskripsikan tentang kegiatan yang dilakukan oleh Sanggar Karya Anak Bangsa (Kabasa) yang peduli terhadap anak rentan jalanan, anak jalanan, dan mantan anak jalanan dan berusaha mendorong untuk meninggalkan jalanan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan dari pengurus Sanggar Kabasa, observasi dan telaah dokumen. Hasil kajian menunjukkan bahwa Sanggar Kabasa didirikan dengan tujuan membina anak rentan jalanan, anak jalanan, dan mantan anak jalanan agar bisa melepaskan diri dari kehidupan jalanan. Sanggar Kabasa sebagai salah satu mitra pemerintah telah berpartisipasi memberikan kontribusi bagi penanganan anak jalanan. Keterbatasan Sanggar Kabasa dalam memberikan penanganan diatasi dengan melakukan kerjasama dengan pihak yang peduli dengan kegiatan Sanggar Kabasa, misalnya kerja sama dengan Institut Kemandirian Dompot Dhuafa untuk pemberdayaan anak jalanan dengan cara pemberian pelatihan keterampilan untuk dijadikan modal mencari pekerjaan terhormat. Kerjasama juga dilakukan dengan perorangan peduli anak jalanan dengan cara memberi dana atau barang. Sanggar Kabasa memberi laporan pertanggungjawaban kepada pihak yang memberi bantuan (donator), untuk menjaga kepercayaan donator bahwa kepedulian mereka sangat berarti bagi pemberdayaan anak jalanan. Berdasarkan hasil pengkajian tersebut direkomendasikan, bahwa lembaga swadaya masyarakat yang peduli dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (anak jalanan) merupakan mitra dari pemerintah, sehingga eksistensinya sebaiknya diberi dukungan oleh pemerintah. Sinergi antara pemerintah dan elemen masyarakat yang peduli terhadap berbagai permasalahan sosial anak jalanan yang terjadi di masyarakat dengan semangat gotong royong dan kesetiakawanan sosial diharapkan dapat mengatasi permasalahan sosial yang ada.

Kata kunci:

Pemberdayaan-Anak jalanan-Sanggar Kabasa

A. Pendahuluan

Pembangunan kesejahteraan sosial bukan hanya tanggung jawab negara saja, setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk berperan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Demikian juga dalam menangani masalah sosial anak jalanan, karena keterbatasan pemerintah maka dibuka kesempatan dan kerjasamanya dengan pihak swasta maupun masyarakat luas. Sebagai mitra kerja pemerintah merupakan sarana pembuka jalan untuk menghantarkan anak-

anak jalanan tertangani menuju masa depan yang lebih baik. Khaerul Sidiq termasuk salah seorang mantan anak jalanan yang melakukan sesuatu yang berarti bagi anak jalanan, sebagaimana yang pernah ia rasakan bahwa anak-anak jalanan membutuhkan penanganan dari berbagai pihak termasuk dirinya dengan mendirikan Sanggar Karya Anak Bangsa sebagai wahana untuk menangani permasalahan sosial anak rentan jalanan, anak jalanan, dan mantan anak jalanan.

Kebutuhan dasar anak seharusnya didapatkan dalam keluarga, keluarga mempunyai beberapa peranan dalam proses tumbuh kembang anak, yaitu memberikan kebutuhan dasar anak seperti pemenuhan pangan, kesehatan, perawatan/pengasuhan, tempat tinggal, kasih sayang, dan pendidikan. Namun kenyataan tidak semua keluarga dapat memenuhi kebutuhan dasar anak tersebut, salah satunya dikarenakan faktor ekonomi atau kemiskinan. Kondisi ekonomi keluarga tercermin pada kondisi rumah, padahal rumah merupakan tempat yang paling banyak dipergunakan anak untuk menghabiskan waktu, dan sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak dan perilakunya. Oleh karena itu, faktor lingkungan rumah sangat penting untuk tumbuh kembang anak, dan kualitas lingkungan rumah ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik manusia.

Tidak semua keluarga dapat memiliki rumah yang ideal untuk pembinaan keluarganya, seperti kondisi rumah dilingkungan padat penduduk dari keluarga kurang mampu pada umumnya kurang menguntungkan anak, suasana rumah dengan ciri kurang menyenangkan, tidak ada penataan ruangan ataupun tidak bersih bisa mempengaruhi perilaku anak, terlebih kebutuhan yang sangat mendasar seperti kebutuhan fisik (makan, minum, udara segar), kebutuhan psikologis (kasih sayang, rasa aman, rasa terlindungi, penghargaan dan prestasi), serta kebutuhan sosial tidak bisa dipenuhi. Dalam kondisi seperti ini kebutuhan sosial untuk berhubungan dengan orang lain, kebutuhan fisik, dan psikologis sebaiknya dapat dipenuhi untuk menunjang hidup sehat fisik maupun mental, karena bila tidak terpenuhi bisa menyebabkan ketidakseimbangan mental.

Anak Jalanan sebagai makhluk sosial tidak dapat lepas dari lingkungan sosialnya, hal ini karena dalam lingkungan tersebut ia tumbuh, dan berkembang. Keberadaan anak jalanan tidak lepas dari kondisi keluarganya yang berkekurangan atau mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidup berdasarkan pendapatan yang diperolehnya. Kondisi berkekurangan orang tua memicu mendorong anak menjadi anak jalanan dimana keluarga terpaksa melibatkan anak untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan, terutama untuk anak jalanan itu sendiri dan juga diharapkan bisa memberikan kontribusi pada pendapatan keluarga.

Hasil survey yang dilakukan Unika Atmajaya pada tahun 1997, jumlah anak jalanan di 12 kota besar di Indonesia 39.861 anak, terdiri dari 32.678 laki-laki dan 7.183 perempuan. Kedua belas kota-kota besar tersebut antara lain Jakarta, Medan, Bandung, Yogyakarta, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Makasar dan Mataram. UNICEF pada tahun 1998 menyebutkan jumlah anak jalanan di seluruh Indonesia mencapai 50.000 orang (Media Indonesia, Sabtu 21 Juli 2001), sedang menurut Direktur Kesejahteraan Sosial Anak, Kementerian Sosial RI, Bambang Mulyadi mengemukakan bahwa jumlah anak jalanan menurut data per 9 Maret 2013 mencapai 94 ribu orang (Ari Nugroho, 2013).

Anak jalanan merupakan bagian dari anak-anak pada umumnya, dan mereka sebagai generasi penerus masa depan bangsa. Anak jalanan adalah istilah yang mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan seperti sebagai pengasong, pengamen, penjual koran, penyemir sepatu ataupun sebagai pemulung. Kondisi kehidupan anak jalanan merupakan ancaman bagi kesejahteraan anak, anak jalanan bila tidak mendapatkan pembinaan dapat berdampak negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, kehidupan sebagai anak jalanan dapat berdampak anak kehilangan kesempatan untuk bermain, memperoleh pendidikan, mendapatkan perhatian serta kasih sayang orangtua, dan kondisi ini tidak mendukung perkembangan anak secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosialnya.

Realita pengalaman Khaerul Sidiq yang sehari-harinya sebagai anak jalanan selama

10 tahun, dan ia terpaksa mencari kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dirinya maupun berkontribusi bagi pemenuhan kebutuhan keluarga. Menurut pengakuan Khaerul Sidiq, (Republika 24 Mei 2013) rasanya tidak ada seorangpun di dunia ini yang menginginkan dirinya hidup sebagai anak jalanan, namun kondisi keluarga yang miskin membuat pria asal Sukabumi, Jawa Barat ini menjalani hidup dan berjuang keras lewat bekerja sebagai pengamen di jalan. Berdasarkan pengalaman di atas, Khaerul Sidiq mendirikan Sanggar Karya Anak Bangsa (Kabasa), sanggar ini memberi perhatian, membina dan berusaha serta mendorong anak-anak jalanan agar segera meninggalkan jalanan. Anak jalanan bukanlah tanggung jawab individu atau keluarganya saja, melainkan tanggung jawab pemerintah, lembaga dan semua elemen masyarakat. Oleh karena itu perlu peningkatan kepedulian, keterbukaan dan partisipasi dari pemerintah maupun semua elemen masyarakat secara bersama-sama berupaya memberikan pelayanan dan mengentaskan anak jalanan.

Upaya penanganan terhadap anak jalanan telah banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi, dalam hal ini pemerintah maupun lembaga-lembaga sosial yang peduli terhadap permasalahan anak jalanan. Demikian pula pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi masalah anak jalanan dengan melibatkan berbagai instansi terkait. Menurut Direktur Jendral Rehabitasi Sosial, Samsudi bahwa pembinaan terhadap anak-anak jalanan terus menerus dilakukan, dan bukti keberhasilannya bisa dilihat di lapangan dan hampir semua anak jalanan yang dibina tidak kembali lagi ke jalanan. Fenomena di lapangan menunjukkan anak-anak jalanan yang baru datang dari daerah asalnya, anak-anak jalanan datang silih berganti, dibina yang satu muncul yang baru. Kalau dirazia ditemui lagi anak jalanan, maka itu adalah anak-anak jalanan yang baru datang dari daerah asalnya (Societa Edisi 02/ 2012:7)

Berdasarkan permasalahan anak jalanan di atas, dipandang perlu dilakukan pengkajian tentang Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Sanggar Karya Anak Bangsa. Rumusan masalah dalam pengkajian ini adalah bagaimanakah upaya Sanggar Karya Anak Bangsa

dalam memberdayakan anak jalanan? Tujuan pengkajian adalah diketahui upaya yang dilakukan Sanggar Karya Anak Bangsa dalam memberdayakan anak jalanan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi pengambil kebijakan yang berhubungan dengan permasalahan sosial anak jalanan guna meningkatkan kesejahteraan sosial anak jalanan dan bermanfaat menambah perbendaharaan dan khasanah ilmu pengetahuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi dan telaah dokumen. Informan penelitian terdiri dari pengurus sanggar Kabasa, dengan pertimbangan telah melakukan berbagai upaya dalam penanganan anak-anak jalanan dan melakukan tindakan antisipasi terhadap anak-anak rentan jalanan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, dalam bentuk deskriptif tentang upaya sanggar Kabasa dalam memberdayakan anak-anak jalanan.

B. Kajian Teori

Anak jalanan adalah sebuah istilah yang mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan, anak jalanan menyatu dalam kehidupan jalanan di kota dan berkegiatan untuk mendapatkan penghasilan dan belas kasih dari orang-orang sebagai pengguna jalan. Kegiatan anak jalanan secara ekonomi adalah pekerjaan informal, sebagai pengemis, pengamen, penjual koran, dan pengumpul barang-barang bekas sebagai pemulung. Anak jalanan yaitu anak yang telah putus hubungan dengan orangtua atau lama tidak bertemu dengan orangtuanya, berada di jalanan sekitar 8–16 jam untuk bekerja, bertempat tinggal di jalanan dan tidur di sembarang tempat, seperti emper toko, kolong jembatan, taman, terminal, stasiun. Pekerjaan anak jalanan pada umumnya mengamen, mengemis, memulung, dan mengerjakan hal serabutan yang hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Anak jalanan rata-rata berusia di bawah 16 tahun (Proyek INS/94/007, 1997: 24).

Seseorang dikatakan sebagai anak jalanan apabila berumur di bawah 18 tahun, menggunakan jalan sebagai tempat mencari nafkah dan berada di jalan lebih dari 6 jam sehari. Ada em-

pat tipe anak jalanan, yaitu yang masih memiliki orangtua dan tinggal dengan orangtua, memiliki orangtua tapi tidak tinggal dengan orangtua, yang sudah tidak memiliki orangtua tapi tinggal dengan keluarga, dan yang sudah tidak memiliki orangtua dan tidak tinggal dengan keluarga (Societa, Edisi 02, 2012: 7).

Posisi anak sebenarnya sangat strategis karena anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, berpotensi dan sebagai generasi penerus cita-cita dan eksistensi bangsa dan negara, dambaan dan penerus keluarga. Keluarga dapat dilihat sebagai kelompok sosial atau pranata sosial, sebagai kelompok sosial keluarga merupakan unit sosial terkecil di masyarakat yang anggota intinya terdiri dari suami istri dan anak (Direktorat Pemberdayaan Keluarga, 2009: 76). Keberadaan anak jalanan sangat bertentangan dengan posisi strategis anak, hal ini karena tidak terpenuhinya hak anak. Siapapun anak baik yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi, agama dan budaya yang berbeda-beda, secara universal mereka tetap memiliki hak sebagai seorang anak. Mereka berhak untuk memperoleh kehidupan yang layak, memperoleh jaminan untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal (Nurdin W 2012:14). Hak anak adalah bagian integral dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Kebutuhan dasar anak yang berkaitan dengan hak anak disebutkan bahwa kebutuhan dasar anak adalah: makanan yang memadai, pakaian, perumahan, perawatan dan kesehatan, pendidikan, pengawasan, perlindungan dari lingkungan yang berbahaya, perawat asuhan, kasih sayang, dukungan dan cinta (B. Mujiyadi, 2012:117).

Sejalan dengan B. Mujiyadi, menurut Yudo Puspito dinyatakan bahwa anak jalanan mestinya memperoleh hak anak. Anak jalanan cenderung terabaikan haknya, yang meliputi hak mendapatkan identitas diri dan status kewarganegaraan, hak untuk mendapatkan layanan kesehatan jasmani dan rohani, dan hak untuk beribadah menurut agama dan keyakinan yang dianut; tumbuh dan berkembang, yang meliputi hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, berkreasi, bergaul, mendapatkan pendidiki-

kan tanpa diskriminasi; berpartisipasi meliputi hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, hak mendapat, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya; dan mendapat perlindungan dari berbagai tindakan eksploitasi, penelantaran, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi (Yudo Puspito, 2013:12-16).

Masih rendahnya pemahaman keluarga tentang pemenuhan hak anak dapat berakibat anak mengalami keterlantaran, termasuk anak-anak jalanan yang tidak dapat terpenuhi hak-haknya. Anak jalanan yang masih berusia muda dan termasuk golongan usia sekolah, karena kondisinya yang terpaksa di jalanan menyebabkan tidak sempat mengikuti atau mendapatkan pendidikan, dan hal ini juga dinyatakan oleh UNICEF bahwa anak seharusnya mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Kementerian Sosial (saat itu tahun 1997 masih Departemen Sosial) bekerjasama dengan UNDP telah melaksanakan ujicoba program pendampingan terhadap anak rentan jalanan. Salah satu program pendampingan dengan model rumah singgah. Dalam perkembangan selanjutnya rumah singgah banyak yang diteladani oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan mengelola semacam rumah singgah dan lembaga-lembaga ini merupakan mitra bagi Kementerian Sosial. Undang-undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 38 ayat 1 mengamanatkan, bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam ayat 2 dinyatakan, bahwa peran dimaksud dapat dilakukan oleh perorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga sawadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial asing.

Keberlangsungan dalam melaksanakan peran sebagaimana tersebut diatas tentu sangat bergantung kepada kepercayaan dari masyarakat. Syarat untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat adalah adanya akuntabilitas, akuntabilitas menurut R.M. Agung Harimurti adalah mensyaratkan segala sesuatu yang dilakukan oleh orang yang diamanahkan harus benar-benar dapat dipertanggungjawab-

kan (R.M. Agung Harimurti, 2009:129). Tentunya ini merupakan hal yang membanggakan karena himbauan untuk bersama-sama berjuang dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk menangani permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat mendapatkan tanggapan positif. Dalam pengelolaan LSM dilakukan dengan menggunakan etika, menurut Nelfina etika yaitu sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral yang menentukan dan terwujud dalam sikap dan pola perilaku hidup manusia, baik secara pribadi maupun sebagai kelompok (Nelfina, 2009:3).

Keberadaan berbagai lembaga sosial dapat mendorong anak-anak mendapatkan haknya sebagaimana juga dinyatakan oleh Unicef dalam memenuhi hak untuk kelangsungan hidup/*survival right*, berkembang/*development right*, berpartisipasi dalam berbagai keputusan yang menyangkut kepentingan hidupnya, dan memperoleh perlindungan/*protection right* (UNICEF, 1996:2). Anak jalanan yang ada di Indonesia cukup besar jumlahnya, hal ini berkaitan dengan peran keluarga yang kurang berfungsi seperti yang diharapkan. Peran keluarga sebagai sebuah institusi yang seharusnya diterima oleh anak yaitu sebagai: pelindung bagi pribadi-pribadi yang menjadi anggotanya, dimana ketenteraman dan ketertiban diperoleh dalam wadah tersebut, unit sosial ekonomi yang secara materiil memenuhi kebutuhan anggotanya, penumbuh dasar-dasar bagi kaidah-kaidah pergaulan hidup, wadah dimana manusia mempelajari dan memenuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat (Soerjono Soekanto, 1990: 23)

Kemiskinan yang terjadi dan menjadi masalah di masyarakat yang disandang oleh sementara anggota masyarakat merupakan realisasi adanya perbedaan antara yang kaya (serba berkecukupan) dengan yang miskin (serba berkekurangan), kemiskinan yang disandang karena tidak berkemampuan secara sosial untuk memenuhi tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup secara layak, bahkan sampai pada tingkat terhambat sehingga hidup dalam kondisi terlantar. Kemiskinan yaitu ketidakmampuan orang untuk memenuhi kebutuhan dasar, orang miskin tidak dapat memperoleh makanan sehat, tidak mampu membeli pakai-

an, menempati rumah tidak layak huni, tidak dapat menjangkau pelayanan kesehatan dan partisipasinya dalam pendidikan sangat rendah (Suradi dkk, 2012: 8). Berbagai keterlantaran terlihat dari berbagai ketidakmampuan penghasilan, pendidikan rendah, tidak memiliki kekayaan berupa tanah yang dapat diandalkan untuk menopang hidupnya. Keluarga miskin secara tidak langsung membuat anak-anak turut serta dalam mencari uang, anak-anak menjadi rentan terhadap berbagai kegiatan yang seharusnya belum mereka lakukan. Keterpaksaan telah membuat anak turun ke jalan mencari uang, dan yang bisa mereka lakukan adalah mengamen, mengemis, menjual Koran, asongan ataupun sebagai penyemir sepatu.

Kegiatan pendampingan terhadap anak jalanan dan anak rentan jalanan berusaha mencegah agar anak jalanan meninggalkan jalanan dan anak rentan jalanan tidak menjadi anak jalanan, hal ini dilaksanakan sebagai langkah antisipasi guna menangani permasalahan sosial anak jalanan dan anak rentan jalanan. Kondisi kerentanan anak ini dapat terjadi disebabkan oleh berbagai masalah yang berhubungan dengan perkembangan anak, karena dalam kenyataan yang terjadi tidak semua anak dapat memperoleh dukungan dari keluarganya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani dan sosialnya. Permasalahan anak jalanan dan anak rentan jalanan (anak yang mempunyai resiko untuk turun ke jalanan/ hidup di jalanan) termasuk dalam kategori anak terlantar), yang dimaksud anak rentan jalanan adalah anak yang masih sekolah, masih mempunyai hubungan dengan keluarganya namun kondisi keluarganya berpendidikan rendah serta tingkat ekonomi lemah. Ciri-ciri anak terlantar yaitu kurangnya perhatian, kasih sayang, dan bimbingan dari orangtua; lingkungan hidup keluarga bersifat kurang membantu bagi pertumbuhan; Tidak memiliki bekal keterampilan untuk biaya hidup sehari-hari dan yang akan datang; kurang gizi dan vitamin sehingga daya tahan tubuhnya lemah terhadap penyakit; kurang pakaian untuk melindungi dirinya dari hujan, angin, panas, dan penyakit; kurang pendidikan dan pengetahuan; kurang bermain, hal ini merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan anak-anak untuk tumbuh dan

berkembang, terutama perkembangan kepribadian (Ali Bustam, 1982: 3).

Keterlantaran yang menempel pada anak jalanan dan anak rentan jalanan merupakan kondisi anak yang kurang terpenuhi kebutuhannya baik fisik, psikis, dan sosial sehingga tumbuh kembangnya kurang terpenuhi. Hal ini sangat ironis karena dalam masa perkembangan anak membutuhkan keterpenuhan kebutuhan seperti yang dikemukakan Oswald Korch (dalam Kartini Kartono, 1990: 28), bahwa di dalam masa perkembangan anak memerlukan kebutuhan: Fisik biologis, sebagai tuntutan yang harus dipenuhi oleh makhluk jasmaniah, sebab apabila tidak terpenuhi dapat terhambat kebutuhan fisiknya; Mental psikis, untuk menjamin kesehatan jasmani dan psikologis yang berkaitan dengan eksistensi sebagai makhluk yang sehat secara psikis; sosial, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan eksistensi manusia sebagai makhluk sosial, karena manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain (Kartini Kartono, 1990: 28).

Dari berbagai pendapat sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa; agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dibutuhkan suatu perhatian khusus, dan apabila keluarganya tidak dapat memenuhi berbagai kebutuhan maka pihak lain hendaknya berpartisipasi, dan kepeduliannya dapat dilakukan dengan cara menyediakan fasilitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibutuhkan anak. Keberadaan anak jalanan perlu diberdayakan agar mempunyai bekal guna menyongsong masa depannya. Menurut Ginanjar Kartasasmita (1998: 145) pemberdayaan adalah upaya untuk membangun, mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran terhadap potensi yang dimiliki. Guna membangkitkan potensi yang dimiliki diperlukan upaya untuk membantu meningkatkan kemampuan untuk menggali potensi diri agar dapat memecahkan masalah yang dihadapi. Menurut Edi Suharto pemberdayaan sebagai proses memiliki lima dimensi, yaitu pemungkinan, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi kelayan berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan kelayan dari sekat-sekat cultural dan struktural yang menghambat; Penguatan, yaitu memperkuat pengetahuan dan

kemampuan yang dimiliki kelayan dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri kelayan yang menunjang kemandirian; Perlindungan, yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dengan yang lemah dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat dan lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil; Penyokongan, yaitu memberikan bimbingan dan dukungan agar kelayan mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong kelayan agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. Pemeliharaan, yaitu memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Proses pemberdayaan tersebut di atas mengandung arti bahwa dengan pemberdayaan diharapkan adanya suatu keadaan berdaya untuk menolong dirinya sendiri menuju pada kemandirian. Anak jalanan merupakan penyandang ketidakberdayaan, karenanya diperlukan pemberdayaan guna meningkatkan pengetahuan agar dapat mencapai kemajuan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Anak jalanan yang belum pernah mendapatkan pemberdayaan tentu membutuhkan sentuhan yang mengarah pada perbaikan hidup. Menghadapi kenyataan ini maka upaya pemberdayaan terhadap anak jalanan sangat diperlukan guna meningkatkan harkat dan martabat serta kemandirian anak jalanan itu sendiri.

C. Kinerja Sanggar Kabasa dalam Pemberdayaan Anak Jalanan

1. Profil Pendiri Sanggar Kabasa (Khaerul Sidiq)

Sanggar Kabasadiawali dengan kegiatan bermusik dari anak-anak jalanan didirikan pada

tahun 2004 dengan nama Anjalis (anak jalanan Islam), pada tahun 2011 berganti nama menjadi Sanggar Karya Anak Bangsa oleh seorang mantan anak jalanan yang bernama Khaerul Sidiq, sanggar ini membina anak rentan jalanan, memberdayakan anak jalanan dan mantan anak jalanan. Kondisi keluarga Khaerul Sidiq termasuk keluarga miskin. Kemiskinan keluarganya telah memaksa Khaerul Sidiq selepas lulus Sekolah Dasar di kabupaten Sukabumi langsung pergi ke Jakarta ikut saudara. Padahal saat itu anak kecil bernama Khaerul Sidiq (Ujang Anjalis) berkeinginan melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi yaitu ke Sekolah Menengah Pertama tidak kesampaian. Keterbatasan bekal yang dibawa sebagai lulusan sekolah dasar membuat Khaerul Sidiq mulai terjun ke jalan untuk mengamen di kawasan Bekasi dan Jakarta sebelum menjalani hidup sebagai pengamen jalanan, ia pernah bekerja menjadi *cleaning service*, pencuci piring, dan tukang parkir. Emperan toko menjadi kamar tidurnya selama menjadi anak jalanan, untuk keperluan kebersihan diri dan beribadah dilakukan di musholla atau masjid. Selama menjalani kehidupan sebagai anak jalanan ada kemauan kuat untuk belajar apapun secara otodidak. Menurutnya menjalani hidup sebagai anak jalanan jelas tidak mengenakkan lantaran dipandang negative oleh masyarakat. Oleh karenanya, Khaerul Sidiq bertekad untuk berubah dengan berjuang keras untuk tidak lagi hidup di jalan dengan cara menciptakan lagu dan aktif menulis.

Hasil kerja keras dan cita-citanya sebagai pencipta lagu berbuah manis, pada tahun 2007 dapat mengeluarkan album *music indie* berjudul Senandung Dakwah jalanan, yang kemudian disusul album kedua berjudul Duo Anjalis. Keberhasilannya telah memacu Khaerul Sidiq untuk terus berjuang guna meninggalkan kehidupan jalanan, dan ia telah berhasil berhenti total dari kehidupan jalanan pada tahun 2009. Berbagai aktifitas mencipta lagu dan hobi menulis, ia telah berhasil meluncurkan sebuah novel dengan judul "Bait-Bait Suci Gunung Rinjani". Dan sekarang terus berjuang mencipta lagu dan menulis novel, saat ini sudah ada novel yang siap cetak dan sudah berada di tangan penerbit tinggal menunggu waktu untuk diterbitkan. Ber-

bagai penghargaan yang ia terima tidak membuat lupa mengenai hal yang pernah ia jalani sebagai anak jalanan. Dia berusaha keras ingin mendorong dan menyemangati teman-temannya yang masih menjalani kehidupan di jalanan agar segera meninggalkan jalan. Dengan didasari semangat yang kuat untuk menolong teman-temannya, ia mendirikan sanggar Karya Anak Bangsa (Kabasa) yaitu sanggar yang membina anak rentan jalanan, anak jalanan dan mantan anak jalanan.

2. Sanggar Karya Anak Bangsa

Sanggar Kabasa berlokasi di *Islamic Village* Jalan Kiai Haji Mas Mansyur nomor 123 Bekasi Timur, tempat ini merupakan milik dari Ustad Mamdud Al Mujafar MA dan istrinya Ustadzah Atifah Hasan Elfi, beliau meminjamkan tempat untuk kegiatan sanggar dengan sukarela, hal ini merupakan wujud kepedulian terhadap anak jalanan. Sanggar Kabasa dalam berkegiatan dilandasi pendidikan agama agar anak-anak yang dibina mempunyai bekal pedoman untuk mengarungi kehidupan dengan mantap bahwa kehidupan harus dijalani sesuai norma yang telah ditetapkan dan kehidupan manusia ada yang maha mengatur dan semuanya berjalan sesuai kehendak Yang Maha Kuasa. Ditekankan juga bahwa manusia harus berubah kearah yang lebih baik dan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa tidak akan mengubah suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak berusaha untuk melakukan perubahan. Tentunya manusia bebas memilih jalan sesuai dengan kemampuannya dan sesungguhnya menjadi orang yang bermanfaat bagi diri sendiri dan bermanfaat bagi orang lain perlu diperjuangkan. Sanggar Kabasa dalam memberikan perhatian, kepedulian dan empati kepada anak rentan jalanan, anak jalanan dan mantan anak jalanan dengan sungguh-sungguh karena mereka membutuhkan pihak lain untuk dijadikan teman guna menerima curahan hati atau katarsis atas berbagai masalah yang tengah disandangnya. Sanggar Kabasa berusaha menjadi pemecah masalah (*problem solver*) bagi anak jalanan dengan membantu berbagai kemungkinan yang bisa dipilih sebagai pemecahan masalah yang paling tepat bagi anak jalanan. Berusaha menjadi inspirator atau motivator bagi anak jalanan, karena tergeraknya anak

jalanannya untuk melakukan perbaikan dan perubahan membutuhkan inspirator atau motivator dengan menggunakan ilmu atau pengetahuan yang dimiliki serta pengalaman hidup jauh lebih mendalam (*powerful*) sebagai bahan inspirasi atau motivasi bagi anak jalanan.

Sanggar Kabasa ingin mewujudkan kebaikan bagi anak jalanan agar terentaskan dan bisa meninggalkan jalanan untuk menuju kebaikan bagi anak itu sendiri dengan keyakinan bahwa hidup hanya sekali dan harus diusahakan menjalani hidup yang berarti bagi diri, keluarga dan masyarakat serta berusaha mandiri untuk kebaikan hidup pada masa yang akan datang agar tidak menjadi beban bagi keluarga dan masyarakat. Dalam menanggapi anak-anak yang rentan jalanan, pengurus Sanggar Kabasa membutuhkan waktu dan kesabaran untuk mendekati orangtua mereka agar anak-anaknya diperbolehkan tetap sekolah dan anak-anak tersebut mendapatkan ijin dari orangtuanya untuk belajar di sanggar Kabasa. Apabila ijin dari orangtua sudah didapatkan, maka anak-anak yang rentan jalanan ini akan didampingi guna memperoleh kesempatan belajar baik formal di sekolah maupun informal di sanggar Kabasa. Pendidikan informal yang diberikan di sanggar Kabasa berupa aktivitas positif untuk membekali anak-anak dalam menyongsong masa depan. Kegiatan positif dalam membimbing anak-anak rentan jalanan telah menarik simpati pihak lain untuk turut serta memberikan bimbingan sesuai dengan kemampuannya. Anak-anak rentan jalanan yang mendapatkan pembinaan di sanggar Kabasa yaitu bersekolah dasar 3 anak, bersekolah lanjutan pertama 20 anak, bersekolah lanjutan atas 9 anak dan yang kuliah 3 anak. Sepulang sekolah ke sanggar untuk mendapatkan pembinaan agama sehabis sholat ashar dengan cara mengaji dan menghafalkan surat pendek dan asmaul khusna. Penanaman kaidah agama kepada anak-anak menjadi prioritas utama, menurut pengurus sanggar Kabasa bekal agama untuk mengarungi kehidupan menjadi hal yang sangat penting.

Dimilikinya bekal agama oleh anak-anak akan menjadikan mereka hidup teratur sesuai norma agama untuk menjadi pedoman dalam belajar dan berkarya agar mereka berkemauan dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Ke-

sungguhan yang didasari keyakinan bahwa manusia wajib berusaha namun semua ketentuan di tangan Yang Maha Kuasa dan manusia harus ridho dan ikhlas dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Nya. Dalam memberikan bimbingan Sanggar Kabasa dibantu oleh anak asuh yang sudah besar, yang selanjutnya membimbing adik-adik yang masih kecil baik menyelesaikan tugas sekolah maupun belajar agama. Antara waktu sholat Asar sampai sholat Maghrib dimanfaatkan untuk mengaji dan menyelesaikan tugas sekolah secara mandiri, namun bila ada hambatan dalam menyelesaikan tugas sekolah maka bertanya kepada kakak yang lebih tinggi sekolahnya.

Keterbatasan sanggar Kabasa bukan halangan untuk berkarya dan memberikan yang terbaik pada anak-anak rentan jalanan yang kurang beruntung tersebut. Di sanggar Kabasa anak-anak rentan jalanan ini seperti mendapatkan orangtua asuh, karena mereka diperhatikan tentang tumbuh kembangnya sebagaimana layaknya di keluarga sendiri. Pembimbingan dalam masalah pelajaran di sekolah mendapatkan bantuan dari tenaga yang peduli dengan memberikan les gratis. Salah seorang yang bekerja di lembaga LIA memberikan les gratis kepada anak-anak rentan jalanan di sanggar Kabasa dengan memberikan les bahasa Inggris. Juga ada seorang mahasiswa UIN yang memberikan materi dan bimbingan gratis bahasa Inggris, namun bila ada yang bertanya tentang materi lain bila bisa maka akan dibimbing juga. Untuk materi yang lain ada empat orang mahasiswa UI yang turut memberikan pengabdian secara sukarela turut membantu di sanggar Kabasa ini. Mereka yang peduli terhadap anak-anak rentan jalanan dengan memberikan bantuan dalam pembimbingan belajar merupakan wujud nyata bahwa sesuatu yang diniatkan untuk kebaikan akan berbuah kebaikan juga.

Anak-anak rentan jalanan yang mendapatkan bimbingan di sanggar Kabasa masih dalam perlindungan keluarganya. Sanggar Kabasa menjalin hubungan yang baik dengan orangtua anak-anak dan menegaskan bahwa anak-anak tetap dalam pengasuhan dan perlindungan keluarganya dan pihak sanggar Kabasa membantu keluarga anak-anak rentan jalanan agar anak-anak tersebut mendapatkan hak-haknya

sebagai anak. Donatur tetap keberlangsungan sanggar Kabasa adalah keluarga ustad Mamdud Al Mujafar MA dan istrinya Atifah Hasan Elfi, meminjamkan rumahnya untuk kegiatan sanggar dan selalu peduli dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di sanggar seperti memberikan dukungan dalam pembinaan anak-anak agar memiliki bekal yang memadai dalam mengarungi kehidupan pada masa mendatang terutama bekal agama. Sedang donatur tidak tetap diperoleh silih berganti dari siapa saja yang peduli dengan kegiatan Sanggar Kabasa secara perseorangan mendatangi lokasi sanggar dan memberikan bantuan berupa uang maupun barang yang ditujukan bagi kelangsungan berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Biaya untuk anak-anak yang masih sekolah dan kuliah dari orangtuanya dan bila ada hal yang membutuhkan tambahan biaya akan diusahakan oleh sanggar Kabasa dari donatur tidak tetap dan dari kegiatan sanggar berupa kelompok musik yang bisa diminta untuk pentas dengan mendapatkan imbalan sebagai pengganti transport. Kepada pihak-pihak yang memberikannya sanggar Kabasa memberikan laporan secara terbuka untuk menjaga kepercayaan para donator dan berterima kasih bahwa perhatian yang diberikan tidak sia-sia karena termasuk perbuatan menolong bagi mereka yang benar-benar membutuhkan uluran tangan.

Sanggar Kabasa juga memberikan pendidikan informal berupa kesenian bermuatan lagu-lagu yang berhubungan dengan lagu-lagu rohani yaitu kelompok kesenian Nasid. Kelompok Nasid Sanggar Kabasa sering diundang untuk tampil mengisi acara hajatan seperti pernikahan ataupun khitanan. Apabila diundang untuk mengisi sebuah acara kelompok Nasid mendapatkan pengganti transport yang diserahkan kepada pengurus sanggar Kabasa yang kemudian dipergunakan untuk membeli berbagai kebutuhan kelompok Nasid ini. Seni teater dan acting juga diberikan oleh Sanggar Kabasa agar anak-anak mempunyai pengetahuan tentang seni peran. Anak-anak dalam pembelajaran seni peran dilanjutkan dengan pembuatan film dalam cerita yang berdurasi lima menit, peralatan shooting ada pihak yang meminjamkan dan anak-anak yang terlibat dalam pembuatan film mengikuti jambore di Cibubur dalam

rangka mengapresiasi karya mereka yang diselenggarakan oleh Yayasan Sahabat Anak, event ini setiap tahun diadakan bagi anak-anak jalanan sebagai ajang menunjukkan karyanya dan dari sanggar Kabasa mendapatkan posisi sepuluh besar. Event yang diselenggarakan oleh Yayasan Sahabat Anak berlangsung tanggal 24 sampai 25 Agustus 2013 seluruh biaya ditanggung penyelenggara. Bagi anak-anak jalanan yang sudah dewasa namun mempunyai kemauan untuk belajar, maka diusahakan untuk dapat mengikuti pengajaran dan latihan pembinaan luar dengan mengikuti kejar paket yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan telah berhasil meluluskan 30 anak dengan klasifikasi kejar paket A setara sekolah dasar. Kemauan atau minat dari anak-anak jalanan untuk berubah menjadi lebih baik merupakan hal positif yang akan bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat lingkungannya oleh karena itu Sanggar Kabasa selalu membuka pintu dan akan berusaha membantu anak rentan jalanan, anak jalanan, dan mantan anak jalanan agar mendapatkan solusi pemecahan masalah yang dihadapinya.

3. Kerjasama

Sanggar Kabasa dalam memberikan pelayanan kepada anak rentan jalanan, anak jalanan, dan mantan anak jalanan mengadakan kerjasama dengan pihak yang menaruh perhatian dengan berbagai kegiatannya. Berbagai usaha yang dilakukan Sanggar Kabasa dengan cara mengajak pihak-pihak yang berpotensi secara finansial untuk peduli terhadap anak jalanan, hal ini membuahkan hasil dengan adanya pihak yang peduli terhadap kegiatan Sanggar Kabasa. Mitra yang telah memberikan kepedulian yaitu Dompot Dhuafa dengan menyalurkan dana dari para muzaki (orang yang mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat, infaq, dan shodaqoh) untuk diberikan kepada para mustahik (penerima manfaat yang memang berhak menerima zakat, infaq, dan shodaqoh). Dompot Dhuafa melalui Institut Kemandirian yaitu bagian yang memberikan perhatian dalam bidang latihan keterampilan dan pengembangan diri secara praktis sebagai bekal untuk mencari pekerjaan. Sanggar Kabasa dalam melakukan kerjasama dengan Institut Kemandirian Dompot

Dhuafa melalui proses pemberdayaan dengan memberikan keterampilan dan pengembangan diri yang memadai bagi anak-anak jalanan sehingga mereka diharapkan dapat mencari uang dengan bekerja sesuai keterampilan yang dimiliki.

Kerja sama juga diberikan oleh masyarakat luas secara perseorangan maupun secara kelompok dengan bentuk memberikan dukungan berupa ijin dari orang tua yang anaknya mendapat bimbingan sanggar Kabasa, berupa uang dan barang dari perseorangan yang berempati dan peduli. Kegiatan yang dilakukan oleh sanggar Kabasa memungkinkan untuk mencari mitra dan mengajak pihak-pihak yang berpotensi secara finansial untuk peduli terhadap anak jalanan sebagaimana yang pernah dia rasakan. Mitra yang sudah menunjukkan kepedulian antara lain Dompot Dhuafa, melalui institut kemandirian Dompot Dhuafa sanggar Kabasa mengirim anak-anak jalanan yang sudah dewasa dan membutuhkan keterampilan untuk dididik dan diberi latihan keterampilan dan pengembangan diri secara praktis sebagai bekal untuk mencari pekerjaan. Dalam mengajak anak-anak jalanan untuk berubah bukanlah pekerjaan yang mudah dan membutuhkan dana yang tidak sedikit serta yang sangat penting membutuhkan waktu, kesabaran, ketelatenan (tidak bosan untuk selalu mengajak), kesungguhan, dan tanpa pamrih ikhlas tidak mengharapapun dari anak jalanan. Dengan keterampilan dan pengembangan diri yang memadai anak-anak jalanan diharapkan dapat mencari uang dengan bekerja sesuai keterampilan yang dimiliki, artinya bisa bekerja dengan cara yang lebih baik/terhormat guna menyongsong masa depan yang lebih baik bagi diri, keluarga dan masyarakat.

4. Pemberdayaan

Pelatihan keterampilan yang diberikan kepada anak jalanan merupakan bentuk dukungan berupa kegiatan pembinaan yang dapat membantu anak jalanan mengembangkan potensi diri, dengan pelatihan dan keterampilan yang terencana diharapkan anak jalanan dapat menghidupi dirinya sendiri dengan kegiatan yang produktif, sehingga anak jalanan bisa melepaskan diri dari kehidupan mengais di jalanan dan bekerja dengan lebih terhormat

berbekal keterampilan yang dimiliki. Pelatihan dan keterampilan praktis yang diajarkan kepada anak-anak jalanan terutama yang sudah berusia diatas 18 tahun, merupakan hal yang penting dan ditekankan oleh sanggar Kabasa karena mereka sudah dewasa. Siapapun termasuk anak jalanan tentu membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, maka mereka dilatih untuk memiliki keahlian sebagai bekal bekerja untuk mendapatkan uang. Di Sanggar Kabasa anak-anak jalanan yang sudah terbiasa hidup bebas tanpa ada yang mengatur diajak untuk hidup teratur, keteraturan dimulai dari kebersihan diri dengan mandi dan berganti pakaian bersih, mencuci pakaian yang sudah kotor, diberi bekal tentang sopan santun dan pemahaman tentang pentingnya keterampilan agar anak dalam mengikuti pelatihan dan keterampilan bisa menerima berbagai aturan dalam pembelajaran yang akan diikuti. Anak-anak jalanan dipersiapkan untuk bisa beradaptasi dengan kehidupan masyarakat umum, termasuk bersiap menghadapi persaingan dunia kerja. Pendidikan agama juga diberikan dengan tujuan agar anak jalanan mengubah perilaku bebas dengan perilaku keteraturan sesuai norma agama, sehingga mereka dalam menjalani kehidupan perilakunya dapat diterima oleh masyarakat luas.

Pelaksanaan pemberian keterampilan oleh institute kemandirian Dompot Dhuafa dilaksanakan di Karawaci, adapun keterampilan (*skill*) yang diajarkan yaitu keterampilan sablon kaos, montir yang berhubungan dengan keterampilan perbaikan dan pemeliharaan kendaraan bermotor, computer yang berhubungan dengan keterampilan administrasi dan keterampilan menjahit. Dalam pelatihan ini anak-anak jalanan yang berusaha untuk mendapatkan keterampilan, diberi materi sesuai dengan keterampilan yang diinginkan dan dibimbing oleh instruktur sesuai dengan bidangnya. Dalam usaha pemberdayaan yang dilakukan bekerjasama dengan Institut Kemandirian Dompot Dhuafa telah berhasil memberikan pelatihan keterampilan kepada sepuluh anak jalanan dengan keterampilan sablon. Anak-anak jalanan yang termasuk dalam kategori generasi muda sangat dimungkinkan untuk dikembangkan sesuai potensi yang dimiliki. Sanggar Kabasa memfasilitasi dan memberi semangat agar

anak jalanan memiliki keterampilan, karena sesungguhnya semuanya yang dimiliki akan kembali kepadanya. Institusi Kemandirian Dompot Dhuafa merupakan salah satu institusi yang amanah dan profesional, sehingga zakat dapat disalurkan sebagai salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan yang membutuhkan biaya tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga untuk tujuan produktif. Penyaluran yang bersifat produktif seperti pemberian pelatihan keterampilan seperti institute kemandirian dompet dhuafa yang memfasilitasi bagi siapa saja yang ingin mempunyai keterampilan untuk dijadikan modal mencari nafkah dengan bekerja sesuai dengan harkat dan martabat manusia dengan cara terhormat tidak memohon belas kasihan dengan cara meminta-minta.

Sanggar Kabasa menekankan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu anak-anak jalanan dianjurkan untuk berperilaku baik, mementingkan kepentingan orang banyak, dan juga berperilaku jujur, tidak egois, dan peduli kepada kepentingan orang lain. Pengetahuan tentang makhluk sosial diharapkan akan menumbuhkan tanggung jawab sosial dengan cara memperhatikan orang lain dan tidak boleh terjadi pembiaran terhadap kemiskinan dan kemelaratan. Tanggung jawab sosial dimulai dari lingkungan yang paling dekat kemudian diteruskan dengan kewajiban memperhatikan anak-anak yatim dan orang-orang miskin, sehingga dalam menangani anak-anak jalanan termasuk salah satu implementasi tanggung jawab sosial yang harus ditunaikan. Tentunya dalam menangani anak jalanan dibutuhkan ilmu pengetahuan, waktu, kesempatan, kesabaran, kemauan, dan selalu belajar dalam menjalani hidup ini. Kemauan belajar akan menutrisi hati, hati yang terbuka akan menjadi lembut dan bila menghadapi hal-hal yang mengundang keprihatinan akan mudah tersentuh dan peduli sehingga dapat meningkatkan kualitas diri untuk berbagi dengan sesama yang akan menjadikan kepekaan sosial menjadi terasah. Sanggar Kabasa memberikan berbagai pembekalan kepada semua anak kesemuanya ditujukan untuk kebaikan anak itu sendiri guna

menyongsong kehidupan yang lebih baik dengan kesungguhan.

D. Penutup

Rangkuman tentang Pemberdayaan Anak Jalanan melalui Sanggar Karya Anak Bangsa dapat disimpulkan bahwa sanggar Kabasa merupakan salah satu mitra pemerintah yang peduli dan memberikan perhatian kepada anak-anak rentan jalanan, anak jalanan dan mantan anak jalanan. Berbagai kegiatan merupakan upaya guna memberikan pemenuhan kebutuhan hak-hak anak yang seharusnya didapatkan dari keluarganya. Tentu hal ini merupakan suatu kondisi yang tidak diharapkan oleh keluarga, keterpaksaan karena keadaan yang telah memaksa anak-anak menjadi anak jalanan. Khaerul Sidiq sebagai pendiri sanggar Kabasayang sejak kecil mendapatkan pendidikan agama yang cukup dari keluarganya, benar-benar berpegang erat dan menjadikan agama sebagai bekal untuk mengarungi kehidupan dengan menunjukkan kepedulian kepada sesama. Manusia memang bebas memilih jalan kehidupan, bila ada pedoman kehidupan yang bisa mengarahkan seharusnya dipegang erat-erat agar menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama.

Sanggar Kabasa sebagai mitra pemerintah telah berpartisipasi memberikan kontribusi bagi penanganan anak-anak jalanan dengan cara mendorong dan menyemangati anak-anak jalanan yang masih menjalani kehidupan di jalanan agar segera meninggalkan jalan. Sanggar Kabasa dengan berbagai keterbatasan selalu berusaha memberikan solusi bagi penanganan anak-anak rentan jalanan, anak jalanan dan mantan anak jalanan. Kerjasama dengan pihak-pihak yang berempati dan peduli dengan kegiatan sanggar Kabasadilakukan dengan sungguh-sungguh dengan cara memberikan transparansi penggunaan berbagai bantuan yang diterima dari pihak lain. Keterbukaan dalam pengelolaan sanggar merupakan salah satu faktor yang menjadikan sanggar Kabasa mendapatkan kepercayaan dari mereka yang berempati dan peduli untuk tetap memberikan dukungannya guna keberlangsungan sanggar Kabasa itu sendiri. Dorongan dari sanggar Kabasa kepada anak-anak jalanan, dan mantan anak jalanan ditekankan bahwa; kesungguhan

dalam berusaha untuk bisa keluar dari kehidupan di jalanan akan berdampak baik dan akan kembali kepada diri anak jalanan itu sendiri. Hal ini terlihat dari dimilikinya keterampilan yang digunakan sebagai modal untuk mencari pekerjaan guna mendapatkan nafkah secara mandiri dan terhormat tidak menggantungkan belas kasihan orang lain.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka direkomendasikan bahwa dalam memberikan pelayanan terhadap anak jalanan berbagai elemen masyarakat yang peduli sebaiknya diberikan kemudahan dan mendapatkan dukungan dari pemerintah. Bagaimanapun dan apapun yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang dikelola oleh masyarakat merupakan wujud nyata dari tanggung jawab sosial masyarakat yang dengan sukarela turut memikirkan keberadaan anak jalanan yang membutuhkan uluran tangan dari pihak lain guna menyongsong masa depan yang lebih baik. Lembaga-lembaga yang berkecimpung dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial didalamnya adalah para relawan yang dengan sukarela memberikan pemikiran, tenaga, dan bahkan berupa dana dalam aksi sosialnya tersebut. Sinergitas dalam penanganan anak jalanan antara pihak pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dengan semangat gotong royong dan kesetiakawanan sosial akan melahirkan kepedulian yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan sosial anak jalanan. Peran serta masyarakat dalam penanganan berbagai permasalahan sosial sangat diharapkan, hal ini mengingat berbagai keterbatasan pemerintah dan negara dalam menangani berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Pustaka Acuan

- Anonim, Undang-undang RI, nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Ari Nugraha, <http://www.portalkbr.com/berita/nasional/2517820-4202.html>, 2013.
- B. Mujiyadi. (2012). Studi Kebutuhan Pelayanan Anak Jalanan, Studi Kebutuhan dan Evaluasi Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia. Jakarta: P3KS Press.
- Ali Bustam. (1982). *Anak-anak terlantar dan beberapa pokok pemikiran tentang upaya penanganan dalam rangka melaksanakan kewajiban konstitusional Bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam UUD 1945*. Yogyakarta: Seminar nasional Fakultas Psikologi UGM dan BP3K Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Direktorat Pemberdayaan Keluarga, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. (2009). *Buku Panduan Pelatihan Pekerja Sosial*. Jakarta.
- Edi Suharto. (1997). *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: LSP-STKS.
- Gunanjar Kartasasmita. (1998). *Martabat dan kualitas Manusia Dalam Persaingan Global*. Yogyakarta: Makalah Kongres HIPIS VI,.
- Kartini Kartono. (1990). *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*. Bandung: Mandar Maju,
- Nelfina. (2009). *Etika Profesi Pekerjaan Sosial*. Padang: BBPPKS.
- Nurdin Widodo. (2012). *Pembinaan Lanjut (After Care Services) Pasca Rehabilitasi Sosial*. Jakarta: P3KS.
- R.M. Agung Harimurti. (2009). *Bunga Rampai, Hasil Penelitian dan Pengkajian*. Bantul: LKiS Printing Cemerlang.
- Societa, *Majalah Inspiratif Berwawasan Kesejahteraan Sosial*, Edisi 02, 2012, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. (1990). *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta,
- Suradi, dkk. (2012). *Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan, Studi Evaluasi Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni bagi Keluarga Miskin di Perkotaan*. Jakarta: P3KS.
- Unicef (perwakilan Indonesia). (1996). *Tahun Emas Unicef 1946-1996: Pelaksanaan Konvensi Hak-hak Anak*, Jakarta: Leaflet.
- Yudo Puspito. (2013). *Tindak Kekerasan Terhadap Anak Sebagai Pelanggaran Terhadap Hak Azasi Manusia, dan Kesehatan Anak, Deputi Bidang Perlindungan Anak*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Analisis Kebutuhan Korban Bencana Alam Gunung Meletus dan Upaya Penanggulangannya

Analysis on Natural Disaster Victim Needs and Its Prevention Effort

Chulaifah

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Kementerian Sosial RI Yogyakarta, Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1 Sonosewu, Bantul Yogyakarta. Email: <hani-hs@rocketmail.com>.

Diterima 21 Januari 2013, direvisi 18 September 2013, disetujui 11 Oktober 2013.

Abstract

Geographically, Indonesia is located at a cross section between Asia and Australia continents, and between Indonesia and Pasific ocean. The position is prone zone of natural disaster. Natural disaster happens because of several natural happening, such as erthquake, tsunami, flood, drought, hurricane, landslide, and mountain explosion. One of the enormous natural disaster was the Merapi expolsion that happened in 2010. The impact of that expolision was a lost, death, burned properties and animal farming, devastated houses, and left trauma on the victims, even longlive invalid. The research on analysis of Merapi explosion natural disaster victim needs and its preventive effort meant to know the victims need where the disaster happened. The result showed that the victims needs of disaster victims are physical, psychological, ans social. The preventive effort can be devided in three phases, predisaster (socializing the cause of natural disaster and environmental betterment), having disaster (saving lives), rehabilitation and reconstruction (recovering psychological, physical, social and economic condition, development activities). It is recommended that the Ministry of Social Affairs and its related institution should socialize to the communities prone disaster through social information and training program on natural disaster prevention, including pre-disaster, having disaster, and reconstruction and rehabilitation phases. For the communities prone to natural disaster should participate in the program in order to having skill on disaster prevention.

Keywords:

Needs-Natural Disaster Vitims-Prevention

Abstrak

Secara geografis letak Indonesia berada pada posisi silang antara Benua Asia dan Australia, serta antara Samudera Indonesia dan Pasifik. Posisi tersebut merupakan zona rawan bencana alam. Bencana alam terjadi karena serangkaian peristiwa alam antara lain gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan gunung meletus. Salah satu bencana alam yang cukup dahsyat adalah meletusnya Gunung Merapi pada tahun 2010. Dampak dari letusan tersebut membawa korban, antara lain merenggut nyawa manusia, membunuh/hanguskan harta benda dan ternak, meluluhlantakkan rumah, dan meninggalkan trauma pada korban bencana, bahkan ada yang cacat seumur hidup. Penelitian tentang Analisis Kebutuhan Korban Bencana Alam Gunung Meletus dan Upaya Penanggulangannya, bertujuan untuk mengetahui kebutuhan korban bencana di lokasi bencana. Hasil penelitian, menunjukkan kebutuhan korban bencana yang mendesak adalah fisik, psikis, dan sosial. Upaya penanggulangan korban bencana ada tiga tahapan: pra bencana (yakni menyosialisasikan tentang penyebab bencana alam, penataan lingkungan), tanggap darurat (usaha penyelamatan diri), rehabilitasi dan rekonstruksi (pemulihan psikologis, sosial, ekonomi, dan kegiatan pembangunan). Rekomendasi kepada Kementerian Sosial dan jajarannya agar menyosialisasikan pada warga melalui kegiatan pelatihan penyuluhan sosial tentang usaha penanggulangan bencana alam, baik pada tahap pra bencana, tanggap darurat, maupun rehabilitasi dan rekonstruksi bagi warga di lokasi bencana dianjurkan mengikuti pelatihan penyuluhan sosial penanggulangan bencana alam agar mau dan mampu serta terampil melakukan upaya penanggulangan bencana alam.

Kata kunci:

Kebutuhan-Korban Bencana Alam-Penanggulangan

A. Pendahuluan

Secara geografis letak Indonesia berada pada posisi silang antara Benua Asia dan Australia, serta Samudera Hindia (Samudera Indonesia) dan Pasifik. Posisi tersebut merupakan zona rawan bencana alam. Bencana alam

adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Sebanyak 440 kabupaten/kota di Indonesia tergolong rawan

bencana, 383 kabupaten/kota diantaranya berpotensi banjir, yakni terdapat di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur. Kemudian 28 wilayah kabupaten/kota lainnya dinyatakan rawan gempa dan tsunami berada di Provinsi Sumatera, Jawa, Bali, dan beberapa di wilayah kepulauan lain. Selain itu Indonesia memiliki sejumlah 240 buah gunung api, 70 buah dinyatakan masih aktif (Gunawan, 2009).

Menurut Reinout Willem Van Bemmelem, seorang ahli geologi Belanda dalam bukunya yang berjudul *The Geology of Indonesia* (dalam Soetji Andari, 2011) Gunung Merapi pertamakali meletus tahun 1006 telah mengubur Candi Borobudur yang terletak di Kabupaten Magelang, tepatnya 30 km sebelah barat Gunung Merapi. Erupsi dahsyat Gunung Api teraktif di dunia tercatat pada tahun 1872, dan sejak tahun 1548 hingga kini Gunung Merapi sudah meletus 68 kali. Sedangkan pada sembilan tahun terakhir meletus pada tahun 1994, 2001, 2006 dan terakhir 2010 yang menurut ahli vulkanologi, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi (BPPTK) erupsi Merapi tahun 2010 besarnya tiga kali lebih besar dibanding erupsi pada tahun sebelumnya.

Dampak letusan gunung Merapi dalam jangka panjang (ke depan) antara lain tanah menjadi subur, tanaman yang ditanam di tanah dari letusan Merapi tersebut akan menjadi subur. Terdapat banyak material bangunan seperti batu, kerikil, dan pasir yang dapat diambil sebagai hasil perekonomian. Pada pasca bencana, lokasi bencana tersebut menjadi tempat wisata yang bisa menghasilkan uang pada berbagai pihak, baik warga setempat, maupun masyarakat lain yang bisa memanfaatkan kesempatan tersebut. Misal ada tukang parkir, penjual kaos bergambar gunung Merapi, penjual CD rekaman peristiwa bencana/letusan Merapi, penjual cenderamata, penjual makanan, dan rental mobil. Bencana Gunung Merapi bermula dengan letusan awan panas yang muncul pada hari Senin 25 Oktober 2010. Hari berikutnya, awan panas muncul secara berangsur-angsur. Awan panas tersebut membawa material pasir bersuhu 500-1000^o C, tinggi luncuran 1,5 km mencapai sejauh 15 km dari pusat letusan. Letusan tersebut merenggut nyawa puluhan manusia, ratusan ternak,

merusak ratusan rumah dan membakar tanaman di ladang serta meninggalkan trauma pada warga.

Atas dasar uraian di atas, maka dipandang perlu dilakukan penelitian tentang Analisis Kebutuhan Korban Bencana Alam Gunung Merapi dan Upaya Penanggulangannya. Rumusan masalah yang diusulkan apakah kebutuhan korban bencana Gunung Merapi dan bagaimanakah upaya penanggulangannya? Mengacu pada rumusan masalah tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebutuhan korban di lokasi bencana dan upaya penanggulangannya apabila ada bencana sejenis di masa yang akan datang.

B. Kajian Teori

1. Kebutuhan Manusia

Kebutuhan ialah keinginan manusia terhadap benda atau jasa yang dapat memberikan kepuasan kepada manusia itu sendiri, baik kepuasan jasmani maupun kepuasan rohani (Sukamto, 2007: 2). Jenis kebutuhan dapat dibedakan menurut intensitas, sifat, waktu, dan subjek yang membutuhkannya. Kebutuhan berdasarkan intensitas dapat dibedakan menjadi kebutuhan: primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang erat kaitannya dengan kelangsungan hidup manusia, sedangkan kebutuhan sekunder dan tersier adalah kebutuhan yang jauh kaitannya dengan kelangsungan hidup manusia.

Abraham H. Maslow (1987: 71-76) mengemukakan, bahwa kebutuhan dasar manusia secara umum ada lima, yaitu kebutuhan kebutuhan fisiologis (faal) atau kebutuhan tubuh; kebutuhan akan keselamatan (perlindungan, bebas dari rasa takut, cemas dan kekalutan); kebutuhan akan rasa memiliki dan rasa cinta; kebutuhan akan harga diri, meliputi: keinginan, kekuasaan, prestasi, kecukupan, keunggulan dan kemampuan, kepercayaan diri sendiri dalam menghadapi dunia serta kemerdekaan dan kebebasan, serta hasrat akan nama baik dan gengsi, prestise, status, ketenaran dan kemuliaan, dominasi, pengakuan, perhatian, arti yang penting, martabat atau apresiasi; dan kebutuhan akan perwujudan diri, keinginan untuk diistimewakan, untuk menjadi apa saja menurut

kemampuannya. Tidak terlalu jauh dengan teori tersebut di atas, M. Fadhil Nurdin (1994: 22) menyatakan kebutuhan manusia secara umum meliputi kebutuhan untuk mempertahankan diri, pengakuan, harga diri dan keinginan untuk menyatakan diri pribadi dalam aktivitas fisik dan sosial.

Masih berkaitan dengan kebutuhan manusia, menurut C. Pramuwito, dkk (1999: 4) juga menulis bahwa semua orang mempunyai kodrat kemanusiaan yang sama, secara umum terdapat kesamaan kebutuhan pokok hidup, hanya ukurannya berbeda sesuai dengan kondisi masing-masing. Lebih tegas ia menyebutkan lima kebutuhan pokok manusia adalah kebutuhan: fisik-biologik, mental-psikologis, sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) serta keimanan dan ketaqwaan (Intaq). Manusia secara kodrati merupakan makhluk jasmani (*biologic physical being*), maka dalam hidupnya manusia memiliki kebutuhan pokok yang berkaitan dengan kodrat tersebut. Apabila salah satu atau sebagian kebutuhan fisik tersebut tidak terpenuhi dapat berakibat seseorang menjadi sakit, bahkan bila tidak terpenuhinya secara berlarut-larut dapat meninggal dunia.

Demikian juga dengan kebutuhan psikis bila tidak terpenuhi maka akan mengalami berbagai gangguan kejiwaan. Oleh karena itu, harus diupayakan keseimbangan antara kebutuhan fisik dan kebutuhan psikis. Tidak berbeda halnya dengan kebutuhan sosial, manusia merupakan makhluk sosial (*social being*) yang tidak bisa hidup sendiri sehingga membutuhkan orang lain untuk saling memberi dan menerima atau saling tolong menolong. Dari beberapa teori yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan manusia meliputi fisik, psikis, dan sosial. Analisis kebutuhan korban bencana alam, perlu memperhitungkan kondisi sosial budaya masyarakat dan lingkungan setempat, sehingga analisis dapat tepat sesuai kebutuhan korban (Indah Huruswati, 2011. 8).

2. Penanggulangan Korban Bencana Alam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Bab III pasal 33 dalam penyelenggaraan meliputi prabencana, saat tanggap darurat,

dan pasca bencana. Penanggulangan pada prabencana adalah pencegahan bencana yang meliputi: Identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana; Kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana; Pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana; Penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup, dan penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Kemudian dilanjutkan penanggulangan korban bencana pada saat tanggap darurat yang mencakup: Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya; Penentuan status keadaan darurat bencana; Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; Pemenuhan kebutuhan dasar; Perlindungan terhadap kelompok rentan, dan Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Tahap selanjutnya adalah penanggulangan korban bencana pada pasca bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan: Perbaikan lingkungan daerah bencana; Perbaikan prasarana dan sarana umum; Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; Pemulihan sosial psikologis; Pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik; Pemulihan sosial ekonomi budaya; Pemulihan keamanan dan ketertiban; Pemulihan fungsi pemerintahan; serta Pemulihan fungsi pelayanan publik.

Setelah selesai rehabilitasi kemudian disempurnakan dengan rekonstruksi, hal ini dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, yaitu pembangunan kembali prasarana dan sarana; pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; berpartisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat, peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya; peningkatan fungsi pelayanan publik; dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Bencana alam letusan gunung api mengakibatkan puluhan warga meninggal dunia, luka, trauma psikis, ratusan ternak meninggal, ratusan rumah rusak total dan tanaman terbakar, kegiatan ekonomi terhenti dan kerugian harta benda. Atas dasar hal tersebut, maka penanggulangan korban bencana alam merupakan upaya kemanusiaan yang diberikan dalam rangka perlindungan dan penyelamatan untuk meminimalisir jumlah korban dan mencegah terjadinya permasalahan sosial baru. Kementerian Sosial melalui Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Alam mempunyai tanggung jawab dibidang korban bencana alam secara fungsional baik terhadap kelompok maupun masyarakat. Menurut Renstra Kementerian Sosial tahun 2010-2014 sasaran penanggulangan korban bencana yaitu tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan korban bencana alam serta terpenuhinya kebutuhan darurat bagi korban bencana alam.

Upaya penanggulangan korban bencana alam yang sesuai dengan kebutuhan dasar korban, menurut terminologi yang disepakati masyarakat internasional pendekatan dalam penanganan bencana dikenal dengan *Disaster Risk Reduction* (DRR). Dalam pelaksanaannya Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Alam bekerja dengan sektor lain yaitu dunia usaha, lembaga sosial masyarakat dan masyarakat luas. Hasil yang dicapai antara lain membangun sistem dan mekanisme penanggulangan bencana secara terpadu di pusat dan di daerah melalui kegiatan:

1. Kesiapsiagaan, merupakan upaya untuk meminimalisasi jumlah korban bencana dan kerusakan sarana dan prasarana akibat bencana. Upaya ini dilaksanakan dalam bentuk penyediaan berupa bantuan darurat, peralatan evakuasi, dan mobilisasi kendaraan siaga bencana, penyiapan masyarakat untuk memahami resiko bencana melalui penyuluhan sosial, latihan, simulasi, dan gladi lapangan penanggulangan bencana.
2. Tanggap darurat, merupakan upaya dalam rangka percepatan penanganan korban bencana dan mencegah terjadinya permasalahan sosial baru akibat bencana. Upaya ini dilakukan dalam bentuk aktivitas sistem

penanggulangan bencana melalui upaya penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan bantuan terapi psikososial, serta pelatihan personil terlatih dalam penanggulangan bencana, yaitu Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang berasal dari masyarakat.

3. Pascabencana, merupakan upaya yang dilaksanakan dalam rangka penguatan kondisi fisik dan psikososial korban bencana. Upaya ini dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi sosial secara fisik ataupun nonfisik melalui bantuan stimulan bahan bangunan rumah (BBR), santunan sosial (bantuan biaya bagi korban meninggal), dan bantuan sosial dalam rangka penguatan kondisi psikososial korban.

Sistem dan mekanisme penanggulangan bencana yang telah dibangun oleh Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Alam bersama dengan dunia usaha, lembaga sosial masyarakat dan masyarakat luas serta Tagana sudah berjalan, agar lebih efektif di daerah dikoordinir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Hal ini diperkuat bahwa Tagana ikut mengambil bagian penting dalam penanggulangan bencana alam secara berturut-turut sejak 2004 sampai 2013. Pengalaman penanganan korban, ternyata meskipun penanganan sudah dianggap selesai, tetapi masih selalu saja menyisakan kebutuhan korban lain yang belum terpenuhi pada penanganan awal, sehingga kebutuhan korban harus didata berulang-ulang (Padmiati, 2008:45).

Pemenuhan kebutuhan korban juga harus melibatkan pemerintah dan institusi swasta peduli korban bencana, sehingga kekurangan penanganan yang dilakukan oleh pemerintah dapat diisi oleh institusi swasta, seperti yang dilakukan oleh Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB), yang merupakan gabungan dari tokoh berbagai agama dalam mengemban amanat dari Abdurrahman Wahid dan Mangunwijaya (Wardana, 2013). Penanganan korban bencana alam juga perlu menekankan pada kondisi kearifan lokal (*think globally and act locally*). Kearifan lokal yang dapat dimanfaatkan seperti gugur gunung atau gotong royong dan tolong menolong dalam membersihkan puing-puing akibat bencana alam (Warto, 2008: 31).

C. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia atau suatu kondisi dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena (Nazir, 1983). Lokasi penelitian di Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman dengan alasan pada saat gunung Merapi Meletus tahun 2010 wilayah tersebut terdapat korban terbanyak diantara wilayah lain, baik korban jiwa maupun kerusakan infrastruktur. Jumlah informan tidak ditentukan namun disesuaikan dengan kecukupan informan yang dibutuhkan, informan adalah korban yang bermukim di hunian sementara (Huntara) saat penelitian ini dilaksanakan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi untuk melihat kondisi korban di huntara. Wawancara bertujuan untuk menggali tentang kebutuhan korban bencana secara fisik, psikis, dan sosial di lokasi bencana atau di tempat penampungan sementara baik saat masih di barak maupun setelah di huntara. Kemudian untuk melengkapi data lapangan didukung dokumentasi dan kajian pustaka yang terkait. Setelah data terkumpul kemudian dianalisa secara deskriptif interpretatif, yakni disederhanakan dan dimaknai.

D. Kebutuhan Korban Bencana Alam Gunung Merapi Meletus

Gunung Merapi berada di Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Luas wilayah Kabupaten Sleman 7574,82 km² atau 18 persen dari luas wilayah DIY, terbentang di antara 110°33.00 dan 110°13.00 Bujur Timur, serta 7°34'51" dan 7°47'03" Lintang Selatan (BPS DIY, 2012: 3). Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulonprogo dan Magelang, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul. Wilayah ini kaya potensi wisata, merupakan pusat pendidikan, daerah pertanian, industri, dan kerajinan.

Secara administratif Kabupaten Sleman terbagi atas 17 kecamatan, 86 desa dan 1.212 pedukuhan atau dusun. Dari 17 kecamatan tersebut terdapat satu kecamatan yang rawan terkena bencana alam gunung meletus yaitu Kecamatan Cangkringan yang terdiri dari 5 desa 26 dusun yakni: Kepoharjo, Glagaharjo, Wukirsari, Argomulyo, dan Umbulharjo. Jumlah penduduk di kecamatan tersebut 1.105.309 orang (laki-laki 559.302 orang dan perempuan 556.007 orang). Saat bencana gunung Merapi meletus tahun 2010, di kecamatan tersebut jumlah korban warga yang meninggal dunia 38 orang (sebagian besar dari Dusun Kinahrejo), luka bakar 12 orang, luka ringan 17 orang, sapi meninggal 400 ekor, semua tanaman terbakar. Kemudian jumlah rumah 687, yang rusak 282 (Dinas PU Sleman, 31 Oktober 2010).

Penelitian ini dilaksanakan dengan berkunjung pada korban yang bermukim di Huntara karena rumah korban kebanyakan rusak berat. Penulis mendatangi korban dari rumah ke rumah secara acak untuk menggali kebutuhan korban, baik kebutuhan saat di barak maupun kebutuhan di Huntara dan sekaligus observasi kondisi Huntara dan lingkungan. Mengacu pada kajian teori di depan tentang jenis kebutuhan, maka kebutuhan korban bencana berdasarkan intensitas tergolong kebutuhan primer karena kebutuhan tersebut berkaitan langsung dengan eksistensi manusia, sedangkan berdasarkan waktu pemenuhan kebutuhan korban bencana yang diutamakan adalah kebutuhan sekarang, kemudian berdasarkan subjek yang harus dipenuhi adalah individu dan kelompok. Berdasarkan kajian pustaka di depan, maka kebutuhan korban bencana dapat digolongkan menjadi tiga kategori yakni kebutuhan fisik, psikis, dan sosial.

1. Kebutuhan Fisik: Kebutuhan korban bencana yang utama dan pertama adalah keselamatan merupakan bagian dari kebutuhan fisik yang mutlak bagi para korban. Sedangkan kebutuhan korban pada pra bencana adalah informasi dini dari petugas terkait, aparat daerah, tokoh masyarakat mengenai akan datangnya bencana. Informasi yang dibutuhkan warga dalam upaya penyelamatan diri dan jalan evakuasi yang harus dilalui. Selain itu warga membutuhkan

berbagai hal untuk menunjang kelangsungan hidup berupa: barak pengungsian yang luasnya sesuai dengan jumlah pengungsi, jumlah MCK yang memadai untuk digunakan sejumlah pengungsi, kesiapan “petugas” apabila warga membutuhkan pertolongan, alat angkutan dan alat berat apabila diperlukan untuk evakuasi, cadangan pangan baik oleh pemerintah maupun dari swadaya masyarakat yang telah digalang, salah satunya melalui Kampung Siaga Bencana.

Pada saat bencana, kebutuhan korban adalah tempat tinggal sementara, MCK yang memadai, makanan siap saji, minuman, obat-obatan dan selimut, angkutan untuk mengevakuasi anak-anak dan lanjut usia. Ketika terjadi bencana pertama-tama yang dilakukan oleh korban adalah menyelamatkan diri. Pada suasana yang kalut dan hiruk pikuk maka tidak sempat menyelamatkan harta benda, bagi orang yang berusia lanjut dan anak memerlukan bantuan/pertolongan. Dalam rangka penyelamatan ini yang dibutuhkan korban adalah kewaspadaan terhadap tanda-tanda perubahan alam di lingkungan atau mematuhi peringatan dini yang dilakukan oleh aparat dan segera menyelamatkan diri apabila sudah ada tanda-tanda akan terjadi bencana dan membantu menyelamatkan lanjut usia dan anak-anak bila mampu. Di saat siaga bencana bagi petugas Badan Meterologi dan Geofisika (BMG) diharapkan selalu dan segera menyampaikan laporannya pada aparat terkait dan aparatpun segera menyampaikan berita atau peringatan dini pada masyarakat dengan segala peralatan yang berhubungan dengan penyelamatan. Misalnya truk untuk evakuasi korban khususnya para lanjut usia dan anak-anak.

Terlepas masalah hidup dan mati adalah urusan Tuhan, tetapi secara rasional dengan banyaknya korban yang berjatuh dapat dianalisis kurangnya pengetahuan warga tentang cara penyelamatan. Berbagai upaya telah dilakukan, misal aparat telah memberitahu dan menghimbau pada warga yang berada di zona I (10 km) dari puncak Gunung Merapi untuk segera meninggalkan tempat,

yakni turun ke daerah yang lebih aman. Akan tetapi terdapat warga yang tidak menghiraukan himbauan dari pemerintah atau aparat terkait, mereka lebih percaya kepada Mbah Marijan (orang yang dituakan dan dianggap memiliki supra natural/indera keenam). Kalau Mbah Marijan menyuruh warga untuk turun meninggalkan tempat, mereka baru akan melaksanakan. Akan tetapi yang terjadi Mbah Marijan diam, belum menyampaikan sesuatu kepada warga, ternyata Mbah Marijan telah terpanggang api dan tidak bisa diselamatkan bersama salah seorang wartawan Vivanews bernama Yuniawan Nugroho yang sedang meliput kondisi bencana Merapi saat itu. Kurang maksimalnya usaha penyelamatan oleh warga karena kurangnya pengetahuan mereka.

Setelah usaha penyelamatan diri selesai yang dilakukan baik oleh perorangan, masyarakat, lembaga swasta maupun aparat pemerintah, maka kebutuhan lain yang segera dipenuhi adalah kebutuhan fisik: makan, minum, pakaian, kesehatan, mandi cuci kakus (MCK), dan tempat tinggal sementara. Kebutuhan makan dan minum untuk korban sangat tercukupi baik makanan siap saji maupun makanan mentah. Makanan datang dari berbagai pihak, yakni perorangan, masyarakat, lembaga swasta dan pemerintah. Demikian halnya kebutuhan pakaian, bagi warga yang rumahnya tidak hangus terbakar pada saat siang hari bisa pulang mengambil pakaian, namun ada pula yang mengandalkan pemberian dari pemerintah melalui Dinas Sosial, baik pakaian pantas pakai maupun selimut.

Kebutuhan kesehatan korban bencana terpenuhi dengan kesiapsiagaan dari Dinas Kesehatan, Palang Merah Indonesia dan dibantu dari beberapa unsur terkait misalnya paramedis dan tersedia berbagai macam obat untuk penyakit ringan, misalnya flu, diare, dan luka ringan. Sedangkan untuk penyakit yang berat dirujuk ke Puskesmas terdekat, apabila puskesmas tidak bisa menangani maka dirujuk lagi ke rumah sakit. Kebutuhan fisik yang belum disebut di atas adalah kebutuhan tempat tinggal. Begitu

bencana terjadi para korban sebagian besar dievakuasi ke barak pengungsian, beberapa gedung sekolah, dan rumah penduduk yang aman dari bencana. Setelah beberapa bulan kemudian bagi korban yang rumahnya hangus terbakar maka dibuatkan tempat hunian sementara (Huntara).

Ketika di barak pengungsian, tempatnya kurang memadai karena adanya bencana letusan gunung Merapi berikutnya lebih dahsyat, sehingga zona aman diperluas akibatnya jumlah pengungsi bertambah Termasuk kebutuhan MCK untuk korban bencana juga kurang memadai. Setelah ada Huntara, tempat tinggal mulai rapi jumlah Huntara sesuai dengan jumlah kepala keluarga (KK). Dengan adanya tempat tinggal untuk korban meskipun sementara, minimal korban telah merasa aman dari bencana, cuaca buruk dan gangguan binatang buas.

Penelitian ini meskipun dilakukan di Huntara, tetapi juga menggali kebutuhan korban saat di lokasi bencana, karena penghuni Huntara semula menempati tempat penampungan sementara di barak-barak pengungsi. Masih dalam kebutuhan fisik, salah satu korban bencana mengatakan, bahwa “meskipun pada pasca bencana kami masih menerima jatah hidup (Jadup) berupa beras setiap kepala mendapat 12 kg beras per bulan, uang sejumlah Rp. 150.000,- per bulan dan sembako serta alat dapur,” saat wawancara ini dilakukan jadup telah diterima dua kali.

Korban lain juga menceritakan, bahwa “ternak-ternak yang terpanggang telah diganti oleh pemerintah sejumlah ternak yang mati, dengan rincian sapi yang besar/ induk/babon diganti uang Rp 8.500.000,-, kemudian calon babon (sapi yang sedang hamil) diganti Rp 5.500.000,-, sedangkan anak sapi (pedhet bahasa Jawa) diganti Rp 2.000.000,-”. Bagi warga yang ternaknya mati terkena erupsi Merapi sudah mendapat ganti uang tunai, namun mereka belum dapat beternak kembali karena belum memiliki kandang dan rumputpun juga belum tumbuh.

2. Kebutuhan Psikis: Kebutuhan psikis pada korban bencana tidak bisa lepas dari kebutuhan fisik. Terpenuhinya kebutuhan fisik membantu kebutuhan psikis dapat ikut terpenuhi. Demikian pula terpenuhinya kebutuhan psikis dapat mendukung kebutuhan lainnya. Kondisi psikis yang dialami korban bencana ada perasaan takut yang mendalam atau traumatik akibat datangnya bencana alam, perasaan cemas dan takut bercampur menjadi satu. Untuk itu perlu adanya psikolog, rohaniawan dan seniman untuk membantu memulihkan traumatik korban bencana alam.

Rohaniawan sesuai dengan agama dan kepercayaan korban memberi pencerahan untuk membantu menenangkan hati selalu mengingat Tuhan dan selalu memanjatkan puji syukur kehadiratNya atas keselamatan yang diberikan. Untuk yang beragama Islam diadakan pengajian dan untuk yang beragama selain Islam diadakan kebaktian. Demikian halnya psikolog sesuai dengan keilmuannya memberi solusi pada korban bencana agar terbebas dari traumatik. Memberi motivasi secara umum dan mengajak bermain pada anak-anak agar terbebas dari trauma. Tidak terkecuali para seniman juga ikut andil besar dalam ikut memulihkan traumatik yang ada pada para korban bencana dengan menampilkan keahlian atau kebolehan masing-masing ada yang main musik dan menyanyi dalam rangka menghibur para korban agar terbebas dari kesedihan. Keterpenuhan kebutuhan fisik dan psikis masih ada satu kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan adalah kebutuhan sosial.

3. Kebutuhan Sosial: Manusia merupakan makhluk sosial, artinya manusia tersebut tidak bisa hidup tanpa orang lain, terlebih bagi korban bencana akan lebih sangat terasa dibanding dengan orang-orang yang bukan korban bencana. Di saat mengalami bencana korban sangat membutuhkan orang lain, mereka membutuhkan bantuan dan dukungan orang lain baik secara moral maupun meterial. Kebutuhan sosial korban bencana, baik di tempat penampungan sementara yang berupa barak maupun di

Hunian Sementara (Huntara) adalah kegotongroyongan dari warga. Diantara korban dibutuhkan saling kerjasama dan toleransi, mulai dari pembenahan huntara sampai dengan pemenuhan kebutuhan konsumsi.

Kebutuhan sosial tidak sebatas pada interaksi sosial, termasuk juga kebutuhan pemulihan keberfungsian sosial. Artinya mereka menginginkan dapat kembali melakukan fungsinya sebagai makhluk sosial. Sebagai laki-laki mereka dapat berfungsi kembali sebagai kepala keluarga (bagi yang sudah berkeluarga), sebagai suami dan sebagai ayah. Selain itu, sebagai anggota masyarakat dapat melakukan kegiatan ekonomi dan sosial. Demikian pula halnya bagi korban perempuan yang berfungsi sebagai istri dan ibu dapat melaksanakan kewajiban sehari-hari sesuai dengan profesinya, tidak terkecuali bagi anak-anak juga bisa menikmati kembali masa-masa bermain dan bersekolah. Untuk bersosialisasi sebagaimana warga masyarakat pada umumnya membutuhkan sarana ekonomi, warga yang sapinya mati telah diganti oleh pemerintah, maka uang pengganti sapi sedikit demi sedikit diambil untuk mencukupi keperluan hidup, karena kondisi di Huntara belum memungkinkan untuk mulai beternak sapi kembali.

Berbeda halnya bagi korban bencana yang semula tidak memiliki sapi, maka tidak ada cadangan uang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, mereka menghimpun batu yang berserakan kemudian dijual pada tengkulak yang mendatangi. Kata mereka "yah, lumayanlah rata-rata dua hari sekali per KK mendapatkan hasil Rp 50.000,-. Akan tetapi dengan adanya banjir di Kali Putih, batu dan pasir telah banyak berada di tepi jalan tepatnya di Muntilan, maka tengkulak yang semula banyak berdatangan membeli batu pada warga yang bermukim di Hutara saat peneliti datang sudah jarang tengkulak yang datang." Akhirnya warga Huntara berkurang lagi penghasilannya. Menanggapi hal tersebut sebagai masukan pada instansi yang berkompeten, ternyata setelah tanggap darurat selesai, korban

bencana membutuhkan kegiatan ekonomi untuk kelangsungan hidupnya dan mereka belum mendapatkan jalan keluar. Hal ini dapat digunakan juga sebagai bahan kebijakan pertimbangan/masukan dalam menentukan penanggulangan korban bencana yang serupa di tempat lain.

E. Upaya Penanggulangan Korban Bencana Alam Gunung Api

Upaya pemenuhan kebutuhan korban bencana alam gunung api, mengacu pada Renstra Kemensos tahun 2010-2014 dan kearifan lokal. Upaya penanggulangan korban bencana alam yang dilaksanakan melalui tiga tahapan yakni pra bencana, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai berikut.

- 1. Tahap Pra-bencana:** meliputi sosialisasi pada warga korban tentang penyebab atau sumber bencana alam gunung meletus tersebut dan diinformasikan bahaya dari bencana tersebut terhadap manusia, hewan ternak dan lingkungan. Penataan permukiman, mengosongkan permukiman penduduk minimal 15 km dari pusat bencana, dibuatkan undang-undang material berupa batu, pasir dan kerikil yang boleh diambil di sekitar bencana agar tidak memperparah ketika terjadi bencana atau agar tidak memicu timbulnya bencana yang lebih parah. Pengelolaan lingkungan hidup yakni ketika bencana sudah reda dilaksanakan penghijauan dan tanaman pangan sebagai matapencaharian warga dengan catatan setiap malam harus pulang ke permukiman yang telah direkomendasikan oleh pemerintah daerah. Penguatan ketahanan sosial masyarakat yakni warga dibekali agar selalu bersatu baik antar warga maupun dengan lembaga sosial dan aparat, jangan mudah diadudomba dan dipecahbelah. Ketahanan sosial masyarakat ini berguna sebagai salah satu unsur mitigasi bencana.
- 2. Tahap Tanggap Darurat:** meliputi pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan dan sumber daya yang tersedia sebagai tindakan yang harus dilakukan sebagai penanggulangan korban. Penentuan status kedaruratan bencana,

apabila lingkup bencana tidak terlalu luas dan jumlah korban terbatas hal ini cukup ditanggulangi oleh pemerintah setempat. Apabila wilayah yang terkena bencana luas dan jumlah korban sangat banyak maka bencana tersebut dikategorikan bencana nasional dan penanggulangannya dari tingkat pusat seperti bencana alam gunung Merapi meletus tahun 2010 termasuk kategori bencana nasional karena jumlah korban secara keseluruhan sangat banyak dan kerugian secara materialpun sangat besar bahkan sulit dihitung secara matematis. Penyelamatan dan evakuasi, dalam masa tanggap darurat dilakukan melalui penyelamatan korban dengan mengevakuasi korban dari zona bencana ke zona aman. Pemenuhan kebutuhan dasar, bagi korban bencana yang berhasil diselamatkan dan dievakuasi meliputi kebutuhan fisik, psikis, dan sosial. Perlindungan terhadap kelompok rentan, maksudnya mendahulukan pertolongan kepada balita, anak-anak, wanita, dan orang tua. Misal dalam evakuasi, bagi para remaja, pemuda, bapak silahkan berlari untuk menuju pada zona aman, tetapi bagi yang rentan disediakan truk sebagai pengangkut. Pemulihan segera prasarana dan sarana vital, prasarana dan sarana di lingkungan korban bencana letusan gunung Merapi yang segera terpenuhinya jumlah MCK minimal mendekati jumlah korban. Keluhan utama di lokasi bencana tersebut adalah kurang jumlah MCK dan air bersih.

3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi: Rehabilitasi meliputi perbaikan lingkungan yaitu dibuatkan Huntara kemudian bertahap menjadi Hunian Tetap (Huntap) lengkap dengan prasarana dan sarana, yakni ada kamar tidur, MCK dan air bersih secukupnya. Pemulihan sosial psikologis, yaitu kedatangan para psikolog, rohaniawan dan seniman memberikan terapi sesuai dengan keahlian masing-masing dalam rangka memulihkan traumatik psikologis. Pelayanan kesehatan di lokasi bencana tersebut sudah terlayani dengan baik dari Dinas Kesehatan dan jajarannya telah siap melayani berkaitan dengan kesehatan. Selanjutnya dalam pe-

mulihan sosial ekonomi budaya, hendaknya di lingkungan bencana segera dihidupkan kegiatan ekonomi misal menyediakan sarana dan prasarana salah satunya dibuat pasar darurat, dilakukan latihan berbagai keterampilan home industri yang secara ekonomi dapat menghasilkan uang sekaligus dapat sebagai pemulihan budaya.

Untuk kesempurnaan dalam rehabilitasi maka dilakukan atau dilanjutkan dengan rekonstruksi yaitu melakukan kegiatan pembangunan yang lebih baik daripada kegiatan pembangunan pada saat rehabilitasi. Pembangunan fisik yang dilakukan misal membangun kembali masjid, gereja, gedung sekolah, kantor desa, puskesmas, pasar, dan tempat beternak hewan serta infrastruktur lain yang diperlukan. Digiatkan kembali kegiatan sosial yang pernah ada misal pengajian, kebaktian, kesenian, dan PKK. Ditingkatkan juga kegiatan belajar mengajar di sekolah, dan pelayanan publik.

F. Penutup

Kesimpulan: Kebutuhan warga korban bencana alam gunung meletus meliputi kebutuhan fisik, psikis, dan sosial. Kebutuhan fisik adalah penyelamatan diri, evakuasi, MCK, makan, minum, kesehatan, pakaian, selimut dan tempat tinggal sementara. Kebutuhan psikis yaitu ketenangan secara lahir dan batin. Kebutuhan sosial yakni interaksi sosial dengan keluarga, saudara, tetangga sesama korban, aparat desa/ aparat pemerintah dan warga masyarakat pada umumnya. Kemudian untuk segera terpenuhinya kebutuhan korban bencana, maka upaya penanggulangan yang harus dilaksanakan mencakup tiga tahapan yaitu pra bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Tahap prabencana: sosialisasi kerawanan bencana dan bahayanya, penataan pemukiman, cara penyelamatan diri. Setelah selesai tersebut dilanjutkan tahap tanggap darurat: kajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan dan sumberdaya yang tersedia; penentuan status kedaruratan bencana; penyelamatan dan evakuasi; pemenuhan kebutuhan dasar; perlindungan terhadap kelompok rentan; pemulihan segera prasarana dan sarana vital. Kemudian untuk menyempurnakan penanggulangan ben-

cana maka dilakukan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi perbaikan lingkungan, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan dan pemulihan sosial ekonomi serta budaya.

Rekomendasi: Untuk Kementerian Sosial, hendaknya menghimbau pada Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kota/Kabupaten, dan instansi yang terkait dengan kebencanaan agar menyosialisasikan pada warga melalui kegiatan pelatihan penyuluhan sosial tentang penanggulangan bencana alam baik pada tahap pra bencana (penyebab bencana dan penataan lingkungan), tahap tanggap darurat (usaha penyelamatan diri), maupun tahap rehabilitasi dan rekonstruksi (pemulihan psikologis sosial ekonomi dan kegiatan pembangunan). Untuk Warga Korban Bencana, dianjurkan mau mengikuti pelatihan penyuluhan sosial tentang penanggulangan bencana alam agar dikemudian hari mau dan mampu melaksanakan penanggulangan bencana alam baik pada pra bencana, tanggap darurat maupun pada pasca bencana Dengan harapan apabila terjadi bencana lagi tidak banyak warga yang meninggal dunia, dan dapat segera terjadi pemulihan kembali baik secara fisik, psikis, maupun sosial.

Pustaka Acuan

- Abraham H. Malsow. (1977). *Mashap Ketiga Psikologi Humanistik*. Yogyakarta: Kanisis.
- _____. (1984). *Motivasi dan Kepribadian*. Jakarta: Gramedia.
- BPS. (2012). *Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: BPS.
- Chulaifah. (2001). *Ekses Upaya Penanggulangan Korban Bencana Alam dan Penanganannya*. Yogyakarta. B2P3KS.
- C. Pramuwito. (1999). *Penelitian Ujicoba Model Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: B2P3KS.
- Departemen Sosial Republik Indonesia. (2003). *Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta.
- Etty Padmiati. (2008). *Korban Bencana Merapi Menggapai Harapan*. Yogyakarta: Citra Media.
- Gunawan, dkk. (2009). *Studi Evaluatif tentang Penanggulangan Bencana Alam, Peran Tagana dalam Peningkatan Kesiapsiagaan Masyarakat untuk Mengurangi Resiko Bencana Alam*. Jakarta: P3KS Press.
- Indah Huruswati. (2013). *Masalah Kebutuhan dan Sumberdaya di Daerah Tertinggal*. Jakarta: P3KS Press.
- M. Fadhil Nurdin. (1944). *Pengantar Studi Kesehatan Sosial*. Bandung: Angkasa
- Nazir. (1983). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Rencana Strategis 2010-2014 Kementerian Sosial Republik Indonesia
- Soetji Andari. (2011). *Menguak Korban Bencana Gunung Merapi di Yogyakarta* (Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 10 Nomor 2) Yogyakarta: B2P3KS
- Slamet Sukamto. (2007). *Ekonomi*. Yogyakarta: Yudhistira
- Sunit Agus Tricahyono, dkk. (2011). *Tragedi Merapi Beragam Dilema Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Merapi* (Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 35 Nomor 3)
- Undang-Undang Republik Indonesia No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Warto. (2008). *Kasalehan Sosial dalam Penanggulangan Korban Gempa Bantul*. Yogyakarta: B2P3KS Press.
- Wisnu Wardhana. (2013). *Kiprah FPUB di Lereng Merapi*. Majalah Empati Vol 10, No 3. Yogyakarta: BBPPKS.

Index Penulis

A

Achmadi Jayaputra 154
Adhi Surya Perdana 215
Achmad Cahyadi, Wahyu Hidayat dan Wulandari 207
Akhmad Purnama dan Murdiyanto 183
Anggraeni Primawati dan Ellys Lestari Pambayun 237

C

Chatarina Rusmiyati 349
Chulaifah 379

D

Daud Bahransyaf dan Ratih Probosiwi 225

E

Etty Padmiati 263
E. Yuningtyas Setyawati dan Andreas A. Susanto 27

F

F. Anita Herawati, dkk. 327

G

Gunanto Suryono 294

H

Haryati Roebyantho dan Setyo Sumarno 276
Husmiyati 286

I

Ikawati 45
Ikawati dan Tri Gutomo 335

K

Kissumi Diyanayati 93

M

Mumu Suherlan 117
Munandar Sulaeman dan Siti Homzah 361

P

Partini 1

R

Robert Siburian 13
Rull Rangingisan 254

S

Setyo Sumarno 62
Siti Aminatun 197, 367
Sri Kuntari 171
Sri Prastyowati 80
Supadiyanto 106

T

Tateki Yoga Tursilarini 125
Tyas Eko Raharjo F. 139

V

Victoria Sundari Handoko 301

W

Warto 313